

Erond L. Damanik, Daniel H.P. Simanjuntak, & Daud

POTRET SIANTAR TEMPO DULU:

*Pemanfaatan Bangunan Pusaka Budaya Sebagai Destinasi
Wisata Budaya di Sumatra Utara*



EROND L. DAMANIK, DANIEL H.P. SIMANJUNTAK & DAUD

POTRET SIANTAR TEMPO DULU



*Pemanfaatan Bangunan Pusaka Budaya Sebagai
Destinasi Wisata Budaya di Sumatra Utara*

SIMETRI INSTITUTE
2020



POTRET SIANTAR TEMPO DULU:

*Pemanfaatan Bangunan Pusaka Budaya sebagai
Destinasi Wisata Budaya di Sumatra Utara*

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

*Potret Siantar Tempo Dulu: Pemanfaatan Bangunan Pusaka Budaya
sebagai Destinasi Wisata Budaya di Sumatera Utara*

@Eron L. Damanik, Daniel H.P. Simanjuntak & Daud

Cetakan pertama September 2020

fonts Palatino Linotype, size 11, 266 halaman (8 + lvi + 202)

ISBN: 978-623-7300-06-9

Hak cipta pada penulis

Dilarang mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini dengan cara
apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi atau
mengalihkan menjadi *e-book* tanpa seizin sah dari penerbit.

desain sampul & layout: Tim Simetri Institute

Gambar sampul: Jantung Kota Siantar tahun 1926

Sumber: kitlv.nl

diterbitkan: Simetri Institute, Medan-20225-Sumatera Utara

simetriinstitute@gmail.com

dicetak oleh Sigma Printshop, Yogyakarta

Isi diluar tanggungjawab percetakan

HISTORICAL TOURISM IN PAMATANGSIANTAR AND ITS SURROUNDINGS



1. Museum Simalungun di Siantar
2. Pasanggerahan Kerajaan Siantar
3. Rumah Raja Siantar
4. Pabrik Es Siantar
5. Kantor Walikota Siantar
6. Gedung BRI Siantar
7. Gedung Bappeda Siantar
8. Gedung Djuang Siantar
9. Kantor Telkom Siantar
10. Stasiun Kereta Api Siantar
11. Gudang Kereta Api Siantar
12. Ria Bioskop Siantar
13. Lapangan Merdeka Siantar
14. STM HKBP Siantar
15. Yayasan Perguruan HKBP Siantar
16. STT HKBP Siantar
17. Sekolah Sultan Agung Siantar
18. Gereja RK Jln Sibolga
19. Gereja HKBP Jln Cereja
20. Gereja GKPS Jln Sudirman
21. Rumah Dinas Walikota Siantar
22. Sekolah Taman Asuhan Siantar
23. Rumah Sakit Tentara Siantar
23. Taman Margasatwa Siantar
24. Balai Penelitian Marihat
25. Pasar Horas Siantar
26. Kuil Tionghoa Jln. Panel
27. Rumah Sakit Djasamen Saragih, Siantar
28. Kolam Renang Dettis, Siantar
29. PDAM Tirtauli Siantar
30. Rumah Direktur dan Adm RSUD Siantar
31. Ruko Tionghoa Jln Cipto, Siantar
32. Ruko Tionghoa Jln Bandung Siantar
33. Sekolah USI di Siantar.
34. Tangki Minyak dan Gudang Jln Mataram
35. SMP Negeri 1 Siantar
36. Taman Makam Pahlawan Siantar



*Gambar di atas, belum seluruhnya memasukkan
foto klasik bangunan pusaka budaya di Pematangsiantar.*

Diperbuat oleh: Erond L. Damanik

PENGANTAR PENERBIT

Buku dengan judul “Potret Siantar Tempo Dulu: Pemanfaatan Bangunan Pusaka Budaya Sebagai Destinasi Wisata Budaya di Sumatra Utara” adalah hasil kajian para peneliti dari Universitas Negeri Medan. Buku ini mengetengahkan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi atau objek wisata yang disebut dengan *historical tourism at Pematangsiantar and its surroundings*.

Pada awalnya, buku ini merupakan laporan atau dokumen penelitian yang dipertanggungjawabkan ke institusi di Universitas Negeri Medan. Kemudian, mengingat urgensi dan signifikansi dokumen penelitian bagi publik dan pemangku kepentingan, terutama bagi pemanfaatan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi wisata budaya, kami mengupayakan penerbitannya menjadi buku referensi yang dapat diakses dan dibaca publik.

Pariwisata, pada Abad 21 mengalami perubahan paradigma wisata (*tourism paradigm*). Sebelum Abad 21, wisata berfokus pada keindahan alam (*natural tourism*), mengandalkan panorama atau estetika alamiah ke pariwisata budaya (*cultural tourism*). Namun, bukan berarti bahwa keindahan alam tidak dipedulikan atau tidak diprioritaskan. Merujuk pada *United Nations Educational Scientific and Cultural Education (UNESCO)*, organisasi dunia yang mengurus “warisan kebudayaan dunia” maupun *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)*, organisasi dunia yang mengurus “pariwisata dunia”, membagi konsep destinasi wisata dalam dua tipologi utama, (1) *geopark*, taman bumi, yaitu kekhususan bumi yang mengandung daya tarik alam, peristiwa sejarah, kebudayaan dan manusia yang ada di

sekitarnya, dan (2) *eco-tourism*, wisata untuk melestarikan alam. Keduanya merujuk pada tema utama konservasi lingkungan, yaitu *geo* dan *eco*.

Dalam hal lain, kedua topologi wisata Abad 21 menyatu dengan *world heritage*, sebagai sumber ilmu pengetahuan istimewa tentang peradaban (*civilization*) masyarakat lokal, berciri lintas teritorial. Lebih khusus, UNESCO merumuskan bangunan-bangunan bersejarah yang berkontribusi bagi pengetahuan, *world heritage site* atau Situs Warisan Dunia. Borobudur, Prambanan, Sawahlunto dan lain-lain di Indonesia, adalah objek yang telah ditetapkan sebagai *World Heritage Sites*. Di dalamnya, terdapat cakupan luas lintas negara tentang pengetahuan; sejarah, agama, arsitektur, komunitas lokal dan lain-lain. Jika di level dunia terdapat *world heritage* maka di level negara terdapat *state heritage*; *provincial heritage* ataupun *city heritage*.

Menurut penulis, Sumatra Utara lebih khusus Pematangsiantar, 138 Km dari Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara ideal dikembangkan menjadi destinasi pariwisata budaya yang memanfaatkan bangunan-bangunan pusaka budaya era kolonial. Bangunan-bangunan dimaksud merupakan warisan perkebunan, dikembangkan sejumlah pemodal (*investor*) termasuk Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Utara. Pematangsiantar, *zelfbestuur* Simalungun dari Klan Damanik, adalah kota perkebunan (*plantations city*) yang maju sejak tahun 1917. Lokasinya yang berdekatan dengan Danau Toba di Selatan dan Selat Malaka di Utara, menjadi penyangga destinasi.

Kehebatan dan kemantapan era perkebunan masih terlihat dari beberapa bangunan yang masih eksis di inti kota (*core city*). Namun, sebagian besar mengalami pemusnahan (*demolished*) akibat kekurangan pemahaman tentang objek

sekaligus sentimen-sentimen anti-kolonial yang memuncak sejak tahun 1970-an. Kini, bangunan-bangunan yang tersisa cenderung merupakan kantor, hotel dan toko, sedang lainnya, terutama yang dikuasai privat, nyaris hilang. Buku ini, menjadi salah satu pengingat tentang memori kota dan identitas kolektif yang berciri perkebunan.

Namun, tantangan ke arah itu masih terlalu jauh dan berat, apalagi minimnya *political will* Pemerintah Kota Pematangsiantar. Para perencana kota tidak memiliki kapabilitas menetapkan zonasi kota berbasis *heritage* kota (*city heritage*), zona inti dan pendukung. Kebijakan pemerintah kota dan dinas tata kota cenderung anjlok dan terkalahkan oleh keinginan pengusaha dan privat. Di Pamtangsiantar, tidak ada kebijakan pemerintah kota, terkhusus perencana kota berbasis bangunan pusaka budaya. Bangunan-bangunan era perkebunan yang masih eksis, cenderung terabaikan, termarginalkan, dibiarkan dan mengalami pembusukan sehingga menjadi alasan untuk menggantinya dengan yang baru. Kota Pematangsiantar, lambat laun (*gradually*) kehilangan identitas dan memori kolektif tentang perkebunan. Kota Pematangsiantar akan beralih menjadi kota tanpa jati diri, *particular identification*, untuk dikenang dan diabadikan dalam memori.

Buku ini menjelaskan pemanfaatan bangunan pusaka budaya sesuai UU no. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya*, terutama Bangunan Cagar Budaya, dan UU no. 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan*. Buku ini menawarkan konsep pariwisata budaya berbasis bangunan kolonial, yaitu *City Tours*. Konsep ini, untuk pertama kali adalah mengidentifikasi setiap potensi bangunan yang masih eksis, merencanakan revitalisasi dan menetapkan model *city tourism* yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Pariwisata budaya

berbasis bangunan kolonial di Pematangsiantar memiliki potensi besar karena bersentuhan dengan Danau Toba, objek wisata nasional, wisata perkebunan (agrowisata) dan juga wisata industri (Sei Mangkei) dan laut di Selat Malaka. Kesempatan inilah yang mandasari kami dari penerbit termotivasi untuk menerbitkan buku ini. Buku ini, selain menyajikan foto-foto klasik tentang bangunan periode perkebunan, yang paling terpenting adalah pemamfaatan sebagai destinasi *city tourism* serta model yang ditawarkannya. *Selamat membaca!*

Akhir September 2020

Penerbit

KATA PENGANTAR

Buku yang Anda pegang ini adalah pembuka cakrawala pemikiran terkait pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi wisata. Mengapa disebut pembuka cakrawala pemikiran?. Jawabannya tidak terlepas dari beberapa poin di bawah ini: (1) orientasi kebijakan pembangunan kota yang mengabaikan atau meminggirkan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi wisata; (2) tidak adanya upaya atau kebijakan revitalisasi bangunan pusaka budaya sebagai jatidiri dan memori kolektif kota, dan (3) wisata alam dan belanja yang lebih menghantui sebagian besar penduduk Indonesia. Ketiga alasan di atas, menjadi alasan utama tidak dijadikannya bangunan-bangunan pusaka budaya di perkotaan sebagai objek sekaligus destinasi *city tourism*. Buku yang Anda pegang ini membawa Anda bernostalgia tentang perkebunan yang dirangkum dalam konsepsi “*historical tourism at Pematangsiantar and its surroundings*”.

Di era kolonial, kehadiran kota Pematangsiantar di Sumatera Utara (dahulu disebut Sumatera Timur) adalah peranannya sebagai sebagai salah satu pilar utama wilayah perkebunan Sumatera Timur (*cultuurgebied van Sumatera Ooskust*). Kota Pematangsiantar dikembangkan melalui ‘Kota Perkebunan’ (*plantation city*). Adapun komoditas utama perkebunan di sekitar Pematangsiantar adalah: Teh (1908), Karet (1911), Kopi (1914), Kelapa Sawit (1924) dan Sisal (1924). *Municipal code* (penataan kota di era kolonial) berdampak pada kemunculan Pematangsiantar sebagai *Kota Satelit* (*satellite city*) yang turut mendukung perkembangan pesat kawasan pantai timur Sumatera (*Sumatera Ooskust*).

Peristiwa kesejarahan yang terjadi pada fase kolonialisme itu terekam dengan baik melalui jejak-jejak arsip di Belanda, baik dalam foto maupun buku. Di Pematangsiantar, bukti-bukti historisnya tampak jelas pada beberapa bangunan yang masih berdiri di inti kota. Itulah sebabnya, berbagai detail foto arsip yang tersedia di *KITLV* maupun *Tropen Museum* ataupun bangunan di Pematangsiantar menjadi saksi bisu tentang perkembangan pesat kota Pematangsiantar dewasa ini. Dari berbagai foto-foto yang tersedia itu, sejarawan, antropolog, perencana kota, maupun pemerintah kota dapat mereka ulang jejak-jejak sejarah kelampauan kota.

Dari sana, sebuah rekonstruksi perkembangan kesejarahan kota Pematangsiantar dapat dibentuk. Salah satu bentuknya ialah seperti naskah (buku) ini yang memotret masa lalu Pematangsiantar dan dihubungkan dengan kekiniaannya setelah 70 tahun terbebas dari kolonialisme. Kekhususan buku ini adalah menjadikan bukti-bukti bisu, bangunan periode kolonial di Pematangsiantar menjadi objek dan destinasi wisata kota atau *city tourism*.

Ibarat pepatah, *Kota Yang Baik Adalah Kota Yang Mengingat Masa lalunya'*. Dengan demikian, kehadiran naskah ini menjadi salah satu dokumentasi di era modern tentang perkembangan kota Pematangsiantar. Dari pengerjaan ini, kemudian disusun *follow-up* ataupun rekomendasi kepada pemerintah kota Pematangsiantar guna tetap melindungi, merawat dan melestarikan unit bangunan yang masih tersedia guna ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana tersebut pada UU nomor 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya* ataupun UU no. 5 tahun 2017 tentang *Pemajuan Budaya*.

Pelestarian dan Bangunan Pusaka Budaya di Siantar hanya dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata yang berkontribusi bagi masyarakat. Sebagai destinasi *city*

tourism, bangunan pusaka budaya harus memiliki 3 (tiga) karakteristik khusus, yaitu: (1) dimanfaatkan sebagai ruang publik sehingga dapat diakses oleh setiap orang, tidak tertutup bagi pengunjung, atau pengunjung dapat leluasa memasuki bangunan untuk melihat dan menyaksikan sejarah, pengetahuan, arsitektur dan kekhasan bangunan; (2) memiliki kontribusi bagi pertumbuhan sejarah kota, identitas, dan memori kolektif bagi penduduk kota dan pengunjung dengan minat khusus. Kontribusi, dalam hal ini berkorelasi dengan pendekatan kesejahteraan yakni memberikan insentif kemakmuran bagi masyarakat kota, dan (3) pelestarian bangunan pusaka budaya melalui regulasi pemerintah sehingga terhindar dari demolisasi ataupun pembiaran dari kerusakan.

Bangunan pusaka budaya, dengan ketiga karakteristik di atas memerlukan *political will* pemerintah maupun masyarakat dalam 2 hal, yaitu: (1) penerbitan regulasi khusus melalui Peraturan Daerah yang mengkaji bangunan-bangunan cagar budaya yang potensial serta mewakili sejarah kota melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya kota, dan (2) pemberian insentif bagi pengelola bangunan cagar budaya seperti; (i) insentif pengecutan dan perbaikan bangunan secara periodik, (ii) insentif keringanan pajak bumi dan bangunan, listrik, air dan lain-lain yang berkenan dengan objek, dan (iii) memberikan penanda, berupa prasasti ataupun simbol khusus tentang bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya.

Apabila langkah ini telah dilakukan, pemerintah ataupun institusi pusaka budaya dapat memanfaatkan bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya untuk kepentingan umum. Misalnya; (1) pengupayaan setiap bangunan yang ditetapkan sebagai pusaka budaya untuk dimanfaatkan sebagai ruang

publik; bank, cafe, butik, salon, kantor, restoran, agensi dan lain-lain; (2) bekerjasama dengan biro agensi perjalanan wisata untuk mendorong promosi wisata dan menggaet wisatawan, dan (iii) penciptaan MICE (*meeting, incentive, conference dan exhibition*) di kota melalui kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta, pribadi, baik secara nasional maupun berskala internasional.

Apabila prasyarat di atas telah terpenuhi, bangunan yang telah ditetapkan sebagai pusaka budaya telah mumpuni menjadi destinasi wisata budaya. Pekerjaan terakhir adalah merumuskan dan menetapkan model *city tourism* yang sesuai dengan selera wisatawan yang dipadu dengan karakter khusus lokalitas kota. Melalui model wisata, *city tourism* menjadi alternatif mendorong ekonomi masyarakat kota, menggeliatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan sektor informal dan ekonomi kreatif. Pada gilirannya, kemampuan mengemas bangunan pusaka budaya sebagai destinasi *city tourism*, berkontribusi bagi pendapatan asli daerah dan juga sumber pemasukan bagi masyarakat kota.

Potensi *city tourism* di Pematangsiantar berkualifikasi tinggi apabila dikelola dengan baik. Bukan hanya karena diapit objek wisata bertaraf nasional (Danau Toba), maupun wisata perairan di Selat Malaka, tetapi juga karena kedudukannya sebagai penyangga wisata Danau Toba. Kemudian, potensi lainnya adalah tersedianya objek berupa bangunan pusaka budaya yang potensial dikelola dan sekaligus wisata agro di perkebunan. *City tourism* di Kota Pematangsiantar, sesuai dengan karakteristiknya adalah kombinasi wisata kota dan perkebunan. Buku ini, menawarkan kekhususan Pematangsiantar dalam kerangka pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi wisata, yaitu *city tourism with plantations memories*.

Model *city tourism* yang kami tawarkan dalam buku ini merupakan perenungan dan pengkajian mendalam yang diharapkan memiliki relevansi dengan pengembangan wisata dan tata ruang di kota Pematangsiantar dengan cita-cita dan impian yang terekam dalam *city tourism with plantation memories*. Bagaimanapun juga, rencana indah melalui konsep ini hanya dapat dicapai apabila ada sinergi antar-pihak, berkolaborasi untuk mewujudkan *city tourism* bagi kebaikan semua pihak di Kota Siantar.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes., Rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Baharuddin, ST., M.Pd., Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, Dra Nurmala Berutu, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Marlya Herawati Saragih dan Angzel Vanessa Simanjuntak, dua mahasiswa Pendidikan Antropologi yang jasanya digunakan dalam pengumpulan data. Apresiasi dan penghargaan yang sama disampaikan kepada Pemerintah Kota Siantar, dinas terkait dan semua pihak yang namanya tidak dapat kami sebut satu per satu, namun memiliki kontribusi selama proses pengumpulan data dan informasi selama pengkajian. Kajian ini tidak lain adalah kontribusi Universitas Negeri Medan dalam membantu kebijakan pembangunan kota serta bagi dinas terkait untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, secara khusus oleh bangunan pusaka budaya.

Tiada gading tak retak!. Buku ini masih menyisakan ruang *debateble* yang masih potensil diberikan kritik dan saran konstruktif. Saran dan kritik diharapkan untuk kesempurnaan buku ini dikemudian hari. Harapan kami, sebagai penulis, tentu saja semoga buku ini bermanfaat bagi publik Siantar,

Pemerintah Kota Siantar maupun pemangku kepentingan lainnya yang menaruh atensi dan apresiasi terhadap bangunan pusaka budaya yang masih berdiri di Kota Pematangsiantar. Hal ini sejalan dengan semboyan Kota Siantar, yang ditetapkan Laurimba Saragih, Walikota Siantar pada tahun 1984; *Sapangambei Manoktok Hitei* atau Bekerjasama Meraih Mimpi. Namun, *political will* pemerintah Kota Pematangsiantar adalah pertama dan terutama yang diharapkan guna merealisasikan rencana ini, sekaligus merawat identitas dan memori kolektif kota. *Semoga!*

Medan, Awal September 2020

Penulis:

Eron L. Damanik

Daniel H.P. Simanjuntak

Daud

DAFTAR ISI

Pengantar penerbit	i
Kata pengantar.....	v
Daftar isi	xi
Daftar gambar	xii
Daftar tabel.....	xv
Prolog.....	xix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Masalah, tujuan, luaran dan kontribusi	7
C. Tinjauan pustaka	8
D. Prosedur pelaksanaan.....	15
Bab II Gambaran umum Kota Pamatangsiantar.....	19
Bab III Embrio Kota Pamatangsiantar	29
A. Asal usul nama Siantar	29
B. Kerajaan Siantar	34
Bab IV <i>Gemeente</i> (Kota) Pamatangsiantar	55
Bab V Kota Perkebunan dan Modernisasi Siantar	115
Bab VI Kota Majemuk dan Multibudaya.....	143
Bab VII Gerbang Pariwisata di Sumatera Utara	157
Bab VIII Penutup	165
Epilog.....	167
Daftar pustaka	177
Lampiran	183
Tentang penulis	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Acuan hukum pemamfaatan bangunan pusaka budaya (BPB) di Indonesia	2
Gambar 2	Potensi pengembangan BPB	4
Gambar 3	Signifikansi BPB.....	11
Gambar 4	Proses dan pelaksanaan penelitian	16
Gambar 5	Alur berfikir penelitian.....	17
Gambar 6	Roadmap penelitian.....	17
Gambar 7	Peta Kota Pematangsiantar	19
Gambar 8	Jln Sutomo Pematangsiantar, 1924	21
Gambar 9	Jln Merdeka Pematangsiantar, 1952.....	22
Gambar 10	Peta 7 sub-kultur Simalungun, 1900	26
Gambar 11	Bah Bolon di Pematangsiantar, 1915.....	27
Gambar 12	Pasar di sekitar Bah Bolon, 1925	32
Gambar 13	Wilayah kerajaan Siantar hingga tahun 1885.....	35
Gambar 14	Foto Sang Nualuh Damanik, 1913.....	37
Gambar 15	Lukisan Sang Nualuh Damanik	40
Gambar 16	<i>De Huis van</i> Raja Siantar, 1916	42
Gambar 17	Pasanggerahan Raja Siantar, 2020	43
Gambar 18	Istana Kerajaan Siantar, 1916	44
Gambar 19	Istana Kerajaan Siantar, 1917	45
Gambar 20	Rumah Raja Siantar	46
Gambar 22	Sarmahata Damanik.....	47
Gambar 23	Sawadim Damanik dan Diki S.N. Damanik.....	50
Gambar 24	Ziarah ke Bengkalis, Riau.....	51
Gambar 25	Ziarah ke Pulau Holang, Siantar	52
Gambar 26	Sawadim Damanik di Pulo Tao	53
Gambar 27	<i>Chinatown</i> di Siantar, 1935	57
Gambar 28	Foto Udara Inti Kota Siantar, 1938	58

Gambar 29 Peta Infrastruktur Kota Pamatangsiantar.....	60
Gambar 30 Logo Kota Pamatangsiantar, 1918	62
Gambar 31 <i>Gemeente huis</i> kota Pamatangsiantar	63
Gambar 32 Kantor Otoritas Kota Siantar, 1934.....	66
Gambar 33 <i>De Javasche Bank</i> , 1934.....	68
Gambar 34 <i>Esplanade</i> Kota Siantar.....	69
Gambar 35 <i>Chun Hua School</i> Siantar, 1935	70
Gambar 36 Jembatan Diponegoro, 1930	72
Gambar 37 <i>Ambachtschool</i> Siantar	73
Gambar 38 <i>Native school</i> misi Nijkerk	74
Gambar 39 <i>HVA Boarding School</i>	75
Gambar 40 <i>Zending school</i>	76
Gambar 41 <i>De Javasche Bank</i> , 1934	77
Gambar 42 Konstruksi <i>Javasche Bank</i>	78
Gambar 43 Foto udara kawasan Balaikota Siantar.....	79
Gambar 44 Balaikota Siantar, 1925	80
Gambar 45 <i>Siantar Central Market</i> , 1925	81
Gambar 46 Pasar Horas 2020	82
Gambar 47 <i>Rex Bioskop</i> 1925	83
Gambar 48 Station DSM Siantar, 1935	84
Gambar 49 Potret stasion DSM 1935	85
Gambar 50 <i>Telefon dan Telegraf</i> station, 1925	86
Gambar 51 Kantor pos Siantar, 2020	87
Gambar 52 <i>Polizei Kantor</i> , 1925.....	88
Gambar 53 <i>Simalungun International Club</i> , 1935	89
Gambar 54 <i>Siantar Zwembaad</i>	91
Gambar 55 Pengunjung di Siantar Zwembaad, 1935.....	92
Gambar 56 <i>Siantar Icefabriek</i> , 1930.....	93
Gambar 57 Pabrik Es Siantar, 1953.....	93
Gambar 58 <i>Huis van Controleur</i>	94
Gambar 59 <i>Huis van Asistent Resident</i>	94
Gambar 60 <i>Hospital van Mardjandi Estate</i> , 1935	95

Gambar 61 Kompleks Mardjandi Estate.....	96
Gambar 62 <i>Siantar Central Hospital</i>	97
Gambar 63 RSUD Siantar 2020	98
Gambar 64 <i>Simalungun Central Hospital</i>	100
Gambar 65 Siantar Zoo, 2020	101
Gambar 66 Unta di Siantar Zoo, 2020	102
Gambar 67 Grand Siantar Hotel, 1930	103
Gambar 68 Orange Hotel.....	104
Gambar 69 Kebun Bunga Siantar	106
Gambar 70 Sisi lain Kebun Bunga Siantar.....	107
Gambar 71 <i>Air Bersih Maatschappij</i>	108
Gambar 72 Pipanisasi Air Bersih Maatschappij.....	109
Gambar 73 <i>Density kantoor van Siantar</i>	110
Gambar 74 Museum Simalungun 2020.....	111
Gambar 75 Museum Simalungun 1939.....	112
Gambar 76 <i>Avalokitesvara Buddhist Monastery</i>	113
Gambar 77 Kebun Karet dan Kopi di Siantar	115
Gambar 78 Konversi lahan di Siantar	116
Gambar 79 Planter di perkebunan kopi.....	117
Gambar 80 Perkebunan teh di Siantar	118
Gambar 81 Perkebunan sawit di Siantar	120
Gambar 81 Perkebunan teh di Siantar	121
Gambar 82 Pabrik teh di Siantar.....	122
Gambar 83 Perempuan di bangsal teh Siantar.....	123
Gambar 84 Planter di perkebunan karet Martoba.....	124
Gambar 85 Perkebunan sawit di Sarbelawan	125
Gambar 86 Agro-wisata di Siantar sekitarnya.....	128
Gambar 87 Kuil Budha di Siantar.....	131
Gambar 88 Gereja Protestan di jalan Gereja.....	133
Gambar 89 GKPS Jalan Sudirman	134
Gambar 90 Masjid Agung Pematangsiantar	136
Gambar 91 <i>Avalokitesvara Buddhist Monastery Siantar</i>	137

Gambar 92 <i>Kuil Shree Guru Nanak Devji Gurdaya</i>	138
Gambar 93 Gereja Roma Katolik Siantar	139
Gambar 94 Retreat Fransiskan di Siantar	140
Gambar 95 Karnaval mobil hias di Siantar 1938.....	141
Gambar 96 Kampung Jawa di Siantar.....	144
Gambar 97 Pedagang Tionghoa di Siantar	148
Gambar 98 Buruh Jawa di perkebunan teh	149
Gambar 99 Ziarah makam Tionghoa di Siantar	151
Gambar 100 Peta etnis di Siantar	152
Gambar 101 Sebaran dan pemukiman etnik di Siantar	155
Gambar 102 Culture perform di Siantar, 2017	158
Gambar 103 Atraksi Budaya di Siantar	161
Gambar 104 Beberapa terminal wisata di Siantar	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>European</i> di Siantar-Simalungun, 1920	146
Tabel 2 Penduduk di <i>Gemeente</i> Siantar, 1920	147
Tabel 3 Populasi Siantar, 1930.....	147
Tabel 4 Walikota Siantar 1945-2020.....	153
Tabel 5 Populasi Siantar tahun 2017	154

PROLOG

Mempertahankan Memori Kota Melalui Jelajah Bangunan Pusaka Budaya: *Historical tours at Pematangsiantar and its suronding*

Eronid L. Damanik

1. Pengantar

Tahun 1993-1995, ketika masih kelas I dan II di salah satu sekolah favorit di Pematangsiantar, tidak kurang dari 30 kali masuk ke Siantar Hotel. Maksud kunjungan ke sana ialah dalam rangka berenang, kegiatan ekstrakurikuler yang saya pilih ketika SMA. Di sekitar Siantar Hotel, ke arah tenggara terdapat stasiun kereta api dan gudang-gudang barang besar, di depan Siantar Hotel terdapat Taman Bunga, di samping Taman Bunga terdapat Kantor Telkom. Bersebelahan dengan kantor Telkom terdapat Gedung Juang Nasional. Di seberang jalan Sutomo, berhadapan dengan

Gedung Nasional terdapat Bioskop Ria. Sejajar dengan Bioskop Ria ke arah selatan terdapat Kantor Walikota, Kantor DPRD, Kantor Kependudukan, dan Bank BRI, semuanya berhadapan dengan Taman Bunga.

Pada waktu kelas III semester 5, kegiatan ekstrakurikuler kami dipindahkan dari Siantar Hotel ke Detis di “Pulau Holang”. Tidak kurang dari 10 kali mengunjungi kolam renang di maksud. Kampung *Pulau Holang*, atau *Pamatang*, adalah pusat Kerajaan Siantar, Klan Damanik. Di sekitar kolam renang, terdapat Pasanggerahan Raja serta Rumah Raja Siantar. Tidak jauh dari Rumah Raja, terdapat Pabrik Es. Mengarah ke sebelah barat terdapat Pusat Pasar Horas dan ke arah Timurlaut terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pamatangsiantar. Di sebelah jalan menuju Pulau Holang, terdapat jalan Cipto, *pecinan*, yang ditandai rumah toko (Ruko) berarsitektur Tionghoa. Ke arah tenggara terdapat barak militer yang kini menjadi markas Polisi Militer. Tidak jauh dari Kantor Polisi Militer, di jalan Sibolga, berdiri Gereja Katolik. Dulunya, saya bersekolah pada sebuah Yayasan Pendidikan yang berlokasi di belakang gereja sebelum pindah ke Jalan Melanthon Siregar, saat saya naik ke kelas II.

Di sudut jalan Sudirman terdapat Kantor Pos yang berseberangan dengan Kantor Polisi. Di sebelah kantor polisi terdapat Museum Simalungun, dibangun tahun 1938 dan diresmikan tahun 1939. Museum ini adalah museum ke 3 di Sumatera dan ke 6 di Indonesia yang didirikan sebelum periode kemerdekaan. Kantor polisi agak berhadapan dengan Kantor Pengadilan Negeri. Kurang lebih 25 meter dari kantor pengadilan terdapat Lapangan Adam Malik. Menurut cerita, terdapat terowongan yang menghubungkan Siantar Hotel dengan Sungai (*Bah*) Bolon di sekitar Pulau Holang. Terowongan itu, menurut kisahnya, dipergunakan Raja

Siantar sebagai akses menuju Siantar Hotel pada akhir pekan, untuk bertemu dengan *planters* dan pemerintah kolonial.

Seorang teman akrab saya tinggal di Jalan Simbolon. Hampir setiap minggu, kami *ngumpul* di rumahnya, makan dan minum serta mendengarkan radio komersial yang dimiliki keluarganya. Setiap ke rumahnya, saya berjalan kaki kurang lebih 2,5-3 Km sekali jalan, melewati Gereja HKBP di Jalan Gereja, Rumah Dinas Walikota, Sekolah Taman Asuhan, Taman Margasatwa maupun Rumah Sakit Tentara. Beberapa rumah di sekitar jalan Simbolon berjenis *Single house*, berukuran besar dan berhalaman luas. Teman saya ini, kini bekerja di Kantor Walikota Pematangsiantar.

Seorang teman akrab lainnya, tinggal di Jalan Pantai Timur, Pematangsiantar. Paling tidak, sekali sebulan kami *ngumpul* di rumahnya, makan dan minum serta berdiskusi. Jaraknya yang jauh, menjadi alasan bagi saya untuk di jemput. Perjalanan ke rumahnya melewati Penjara Pantoan, Pabrik Rokok STTC, Yayasan Perguruan HKBP termasuk SMP Negeri-1, ataupun Makam Pahlawan. Saat ini, teman saya ini bekerja pada instansi perpajakan di Kota Pematangsiantar.

Kami bertiga adalah sejoli. Kawan karib dan hingga kini (2020) masih berteman melalui media sosial. Dahulu, setidaknya sesaat masih SMA, dikala musim durian di Tanohdjawa, kami berangkat ke sana. Menumpang mobil teman kami, pemilik salah satu radio komersial di Pematangsiantar. Selama perjalanan, kami melewati Pusat Penelitian Kelapa Sawit Marihat. Di sana terdapat rumah-rumah besar, berpola *single house*. Perkebunan Sawit, Coklat dan Karet. Seorang teman tinggal di sekitar Rumah Sakit Balimbangan, Kabupaten Simalungun. Selain itu, kami juga sering mengunjungi kebun teh di selatan Kota Pematangsiantar, setelah melewati Sekolah Kadet Infanteri

dan Rindam-I Bukit Barisan. Di sekitar kebun teh, terdapat pabrik pengolahan teh di Bah Butong, Sidamanik dan Marjandi.

Pertama kali mengunjungi Medan adalah saat lulus SMA. Kami berangkat ke Medan menumpang Kereta Api untuk tujuan bimbingan test masuk perguruan tinggi negeri. Dari Stasiun Kereta Api, 3 gerbong kereta api mengular hingga ke Stasiun Pembantu Dolog Malangir (Sarbelawan). Di sepanjang jalan, kami melihat dan menyaksikan perkebunan karet. Terkadang, terlihat juga rumah-rumah besar, halaman luas dan berpola *single house*. Pengalaman ringkas dikala SMA di atas, adalah nuansa masa lalu kami, memori kolektif dan identitas kami bertiga, sebuah memori yang sulit dilupakan, walaupun sudah berselang sekitar 20 tahun silam.

Urgensi dan signifikansi bangunan-bangunan itu, baru saya ketahui ketika menjadi asisten dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah, tepatnya ketika mengampu matakuliah Sejarah Sumatera Utara, sejak Februari 2008. Pada waktu bersamaan, saya juga dipercaya menjadi Sekretaris Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed). Melalui peran di jurusan dan pusat studi, saya berkenalan dengan banyak lembaga, akademisi, praktisi dan jurnalist. Pertemuan kami intens membahas demolisasi bangunan bersejarah di Medan. Kenyataan ini menggiring saya untuk membaca lebih banyak buku ataupun referensi.

Perkenalan dengan Dirk A. Buiskool, seorang praktisi perhotelan dan biro perjalanan di Medan, dan juga penulis buku, serta Badan Warisan Sumatra (BWS) memperlihatkan saya foto-foto *Medan Tempoe Doeloe*. Sungguh indah dan menyenangkan. Keaktifan sebagai sekretaris menggiring saya berselancar di internet. Melalui laman *KITLV*, *NIOD* maupun *Tropen Museum Institut*, saya memperoleh ribuan foto klasik

tentang Medan, Tanah Karo, Danau Toba, Rantauprapat, Simalungun dan Pematangsiantar. Dari laman inilah, kecintaan dan keinginan terbentuk untuk menggali lebih jauh tentang kenyataan Sumatera Utara sebelum periode kemerdekaan.

Beberapa karya saya sudah diterbitkan dengan mengandalkan foto-foto era kolonial, seperti *Kisah Dari Deli Jilid I dan II* (2016 dan 2017), *Potret Simalungun Tempo Dulu* (2018), maupun *Penampilan Elitis Swapraja Simalungun* (2019). Ketika saya kuliah di Medan, fenomena yang saya peroleh sama seperti di Siantar. Banyak bangunan bersejarah yang sama sekali tidak saya ketahui di Medan. Begitu lengkap, massif dan indah nya Kota Medan dan Pematangsiantar sewaktu era kolonial. Bangunan-bangunan prospektif, memiliki gaya arsitektur khas, cor beton, menggunakan semen dan batubata, beratap tanah liat dan memiliki tiang-tiang besar berupa kolom, serta memiliki jendela dan pintu besar, karakter khas bangunan tropis, untuk memberikan kesejukan di dalam rumah.

Apa yang ingin saya kemukakan dari pengalaman ketika masih SMA dan Kuliah Sarjana dan Magister, seperti tersebut di atas, terangkum dalam sebuah pernyataan bahwa *“bangunan-bangunan yang disebut di atas, kebanyakan memiliki nuansa sejarah penting dari era perkebunan yang sama sekali tidak saya ketahui selama masih sekolah SMA di Pematangsiantar. Bangunan dimaksud adalah embrio dan bukti sejarah perkembangan sekaligus modernisasi kota yang sebenar-benarnya di Sumatera Utara”*. Walaupun memiliki nuansa sejarah, namun tidak terhindar dari pemusnahan, pembiaran, perubahan dan pergantian bangunan dengan bangunan baru yang dianggap sebagai representasi modernisme. Walaupun pemerhati pusaka budaya, khususnya bangunan cagar budaya di Medan

telah bersuara, tetapi suara mereka kurang di dengar. Pembiaran dan pemusnahan bangunan pusaka budaya tetap saja terlihat setiap harinya, atas nama modernisasi.

Hingga dewasa ini, bangunan-bangunan pusaka budaya, yang dahulunya menjadi pusat-pusat perkebunan; Medan, Pematangsiantar, Tanjungpura, dan Rantauprapat, maupun pusat wisata seperti Gundaling di Brastagi, nyaris menghilang. Bangunan pusaka budaya mewakili modernisasi, pertumbuhan dan perkembangan dianggap: (i) representasi kolonialisme, penjajahan dan eksploitasi alam serta manusia Indonesia di era pendudukan kolonial; (ii) bangunan kolot, lapuk dan tidak memiliki efektifitas serta efisiensi di era modern; (iii) berbiaya mahal, dan tidak relevan di era modern; dan (iv) bertentangan atau paradoks dengan rencana tata ruang dan tata kota.

Kemudian, tidak satupun pemerintah kota atau kabupaten di Sumatera Utara, yang dahulunya menjadi basis perkebunan, mampu mengemas bangunan pusaka budaya menjadi objek/destinasi wisata. Setiap tahun, satu per satu unit bangunan yang ada di pusat-pusat kota perkebunan menghilang, mengalami proses pembiaran, pelapukan dan pengrusakan. Sialnya, dalam jumlah relatif, penduduk Sumatera Utara berwisata ke *George Town* di Pulau Penang, guna melihat bangunan-bangunan peninggalan Inggris. Demikian pula berwisata ke *Intramuros*, di pusat Kota Manila untuk melihat bangunan-bangunan pusaka budaya peninggalan Spanyol di negara itu. Kita juga berwisata ke Yerusalem, mengunjungi Sinagoge Salomo, Gereja Kelahiran, Golgata, dan lain-lain, bahkan mengunjungi Mekah (Arab Saudi), Istanbul (Turki) guna melihat peninggalan-peninggalan pusaka budaya di negara-negara itu.

Ketidakmampuan mengemas bangunan-bangunan pusaka budaya menjadi destinasi wisata, menjual nostalgia yang menguntungkan itu, berimplikasi bagi pembiaran bangunan pusaka budaya di telan zaman, dan pengrusakan. Dalam jangka panjang, tendensi demikian berimplikasi bagi hilangnya memori kolektif kota maupun identitas kota yang tidak dapat terlihat lagi. Kita boleh saja berbangga bahwa kota-kota di Sumatera Utara adalah berembrio dari perkebunan. Perkebunan, dengan kata lain adalah faktor modernisasi, pertumbuhan dan perkembangan wilayah ini, namun jejaknya peninggalannya nyaris tidak ditemukan lagi. Semestinya, bangunan-bangunan pusaka budaya dimaksud dapat dilestarikan serta dimanfaatkan menjadi destinasi wisata menguntungkan sekaligus merawat memori kolektif dan identitas kota.

2. Pelestarian dan pemamfaatan bangunan pusaka budaya

Di Indonesia, budaya benda telah diatur dengan UU no. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya* yang objeknya riil atau kongkrit, dapat disentuh (*tangible heritage*) atau *Pusaka Benda*, terdiri dari (i) benda, (ii) bangunan, (iii) situs, (iv) struktur dan (v) kawasan Cagar Budaya. Sedang budaya tak benda diatur dengan UU no. 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan* yang objeknya abstrak, tidak berwujud (*intangible heritage*) atau *Pusaka Tak Benda* terdiri dari: (i) tradisi lisan, (ii) manuskrip, (iii) adat istiadat, (iv) ritus, (v) pengetahuan tradisional, (vi) teknologi tradisional, (vii) seni, (viii) bahasa, (ix) permainan rakyat, dan (x) olahraga tradisional. Walaupun kedua regulasi mengatur objek berbeda, tetapi keduanya memiliki orientasi sama, pelestarian dan pemamfaatan.

Kedua UU, dengan kata lain sangat *technical* dan taktis guna pelestarian kebudayaan benda maupun tidak benda,

memuat: (i) perlindungan, (ii) pengembangan, dan (iii) kemamfaatan. Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada prinsip pelestarian kebudayaan (sesuai pasal 16-40 UU no. 5 Tahun 2017) mencakup (i) perlindungan yang terdiri dari: (a) inventarisasi, (b) pengamanan, (c) pemeliharaan, (d) penyelamatan, dan (e) publikasi, (ii) pengembangan, dan terakhir (iii) pemanfaatan dan pembinaan. Mengacu pada UU No. 11 tahun 2010 pada Bab I, Pasal 1 poin (1) Cagar Budaya didefinisikan sebagai berikut;

“warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Kemudian, pada poin 3 (ketiga), Bangunan Cagar Budaya atau Bangunan Pusaka Budaya didefinisikan sebagai berikut:

“Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia”.

Kriteria Cagar Budaya, merujuk Bab III, Bagian Kesatu, Pasal 5 menyebutkan kriteria sebagai cagar budaya, terdiri dari: (1) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, (2) memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; (3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, dan (4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kemudian, Bangunan Cagar Budaya sesuai Pasal 7 terdiri dari; (1)

berunsur tunggal atau banyak, dan/atau (2) berdiri sendiri atau menyatu dengan formasi alam. Dasar penyebutan menjadi *Bangunan Cagar Budaya*, merujuk Pasal 33, Bagian Ketiga adalah Penetapan.

Bangunan yang dilindungi atau disebut sebagai Cagar Budaya harus melalui pengkajian *Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)* untuk dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Bupati dan walikota menerbitkan penetapan dan lalu dicatat dalam *Register Nasional Cagar Budaya* untuk mendapat jaminan hukum berupa keterangan status cagar budaya maupun keterangan kepemilikan berdasarkan barang bukti. Sesuai Pasal 42, *Bangunan Cagar Budaya* dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- (2) Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- (3) Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- (4) Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun masih hidup di masyarakat; dan/atau
- (5) Contoh penting kawasan pemukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemamfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Kemudian, Pasal 43 menyebut *Bangunan Cagar Budaya* diusulkan sebagai peringkat provinsi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;

- (2) Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- (3) Langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- (4) Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun masih hidup di dalam masyarakat; dan/atau
- (5) Berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Selanjutnya, Pasal 44 merupakan persyaratan Bangunan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota, antara lain sebagai berikut:

- (1) Sebagai cagar budaya diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- (2) Mewakili masa gaya yang khas;
- (3) Tingkat keterancamannya tinggi;
- (4) Jenisnya sedikit; dan/atau
- (5) Jumlahnya terbatas.

Tujuan penetapan Bangunan Cagar Budaya berturut-turut adalah: (i) pelestarian, (ii) perlindungan, (iii) penyelamatan, (iv) pengamanan, (v) pemeliharaan, (vi) pemugaran, (vii) pengembangan, (viii) penelitian, (ix) revitalisasi, dan (x) pemamfaatan, pendayagunaan Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- (1) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- (2) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;

- (3) Memperkuat kepribadian bangsa
- (4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- (5) Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Kesulitan mendasar yang dihadapi dewasa ini, terkait pemanfaatan bangunan pusaka budaya sebagai objek destinasi *city tourism* di Pamatangsiantar, terangkum dalam 4 persoalan mendasar yang teridentifikasi, sebagai berikut;

- (1) Belum adanya regulasi pemerintah kota dalam merumuskan dan menetapkan pengembangan tata ruang dan tata kota berbasis bangunan pusaka budaya. Kealpaan regulasi berdampak bagi tidak adanya zonasi atau segmen khusus yang mengatur tentang pelestarian bangunan pusaka budaya;
- (2) Belum adanya bangunan yang ditetapkan sebagai pusaka budaya (cagar budaya), baik berskala nasional, provinsi maupun level kota. Ketiadaan ini berdampak bagi demolisasi bangunan yang seharusnya dilestarikan tergerus dengan pengrusakan, pembiaran dan pemusnahan bangunan di Kota Pamatangsiantar;
- (3) Tidak semuanya bangunan pusaka budaya periode kolonial termanfaatkan sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh pengunjung. Beberapa bangunan diantaranya dikuasai oleh badan usaha yang bersifat protektif terhadap publik; dan
- (4) Kurangnya *political will* pemerintah kota dan dinas terkait dalam memajukan *city tourism*. Selama ini, arah dan orientasi kebijakan pariwisata kota masih difokuskan pada atraksi budaya; pesta, carnival, pameran, pertunjukan dan sama sekali tidak

menyentuh bangunan pusaka budaya yang memiliki potensi wisata.

Dengan keterbatasan di atas, bukan mustahil mengemas bangunan era perkebunan menjadi destinasi city tourism di Kota Pamatangsiantar. Mengingat posisinya yang strategis, sebagaimana dikemukakan diawal prolog ini, seharusnya pemerintah kota maupun instansi terkait memiliki keinginan untuk mengemasnya dengan baik. Tinggalkan paradigma lama dan beralihlah ke paradigma wisata baru sebagaimana ditegaskan UNESCO maupun UNWTO yakni wisata warisan budaya yang memberdayakan kultur dan karakteristik lokal. Melalui paradigma *eco-tourism*, bangunan periode perkebunan mampu menampung wisata minat khusus seperti yang terjadi di Eropa dewasa ini.

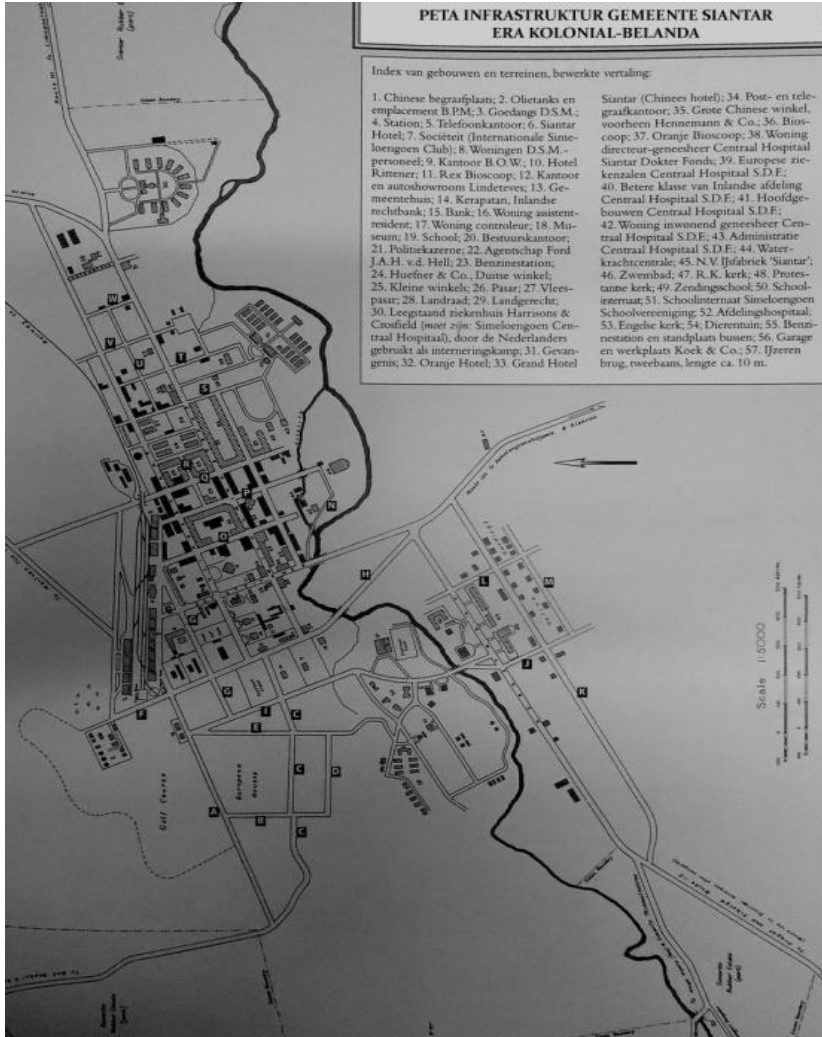
Bagaimanapun juga, perubahan paradigma wisata Abad-21, bukan lagi terfokus pada keindahan alam semata, namun menuntut partisipasi wisatawan untuk berbuat. Pengalaman berbuat ini mengharuskan wisatawan menikmati, melihat dari dekat dan merasakan nostalgia, sensasi dan pengalaman dari masa lalu. Masyarakat lokal, sebagai *host*, memiliki kewajiban dalam penyediaan-penyediaan daya tarik objek, mengemasnya menjadi destinasi serta di dukung oleh insentif maupun pertunjukan. Sebagai catatan, wisata di Abad 21, baik *City Tours* di daerah perkotaan, *Urban Tourism* di daerah metropolitan, ataupun *eco-tourism* menuntut keterlibatan wisatawan terhadap semua objek yang dikunjungi. Wisata Abad 21, dengan demikian menuntut pengalaman aktif pada destinasi, yaitu nostalgia masa lalu yang didukung karakteristik budaya lokal.

3. Bangunan pusaka budaya di Kota Siantar

Merujuk pada *Peta Infrastruktur Gemeente Siantar* tahun 1926, tampak beberapa unit bangunan, kantor, pemukiman, dan keletakannya di inti kota Pematangsiantar, yaitu: 1) pemukiman orang Tionghoa, 2) tangki minyak *Batafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*, 3) Gudang *Deli Spoorweg Maatschappij (DSM)*, 4) Stasiun DSM, 5) Kantor Telepon, 6) Siantar Hotel, 7) *Societeit (International Simalungun Club)*, 8) Kediaman pejabat DSM, 9) Kantor Dinas Pekerjaan Umum (B.O.W), 10) *Hotel Rittener*, 11) *Rex Bioskop*, 12) kantor *showroom mobil Lindeteves*, 13) Kantor Walikota, 14) Kantor Kerapatan dan Bank Pribumi, 15) Bank, 16) kediaman Asisten Residen, 17) kediaman Kontrolleur, 18) Museum Simalungun, 19) sekolah, 20) kantor pejabat pemerintah.

Selanjutnya terdapat 21) kantor polisi, 22) kantor agen mobil Ford, 23) stasiun bensin, 24) kantor *Hufner and co*, 25) kantor dan bengkel, 26) pusat pasar, 27) kantor dinas pasar, 28) pengadilan Siantar, 29, pengadilan tinggi, 30) rumah direktur *Harison and Crosfield* berdekatan dengan *Simalungun Central Hospital*, 31) *Gevangenis*, 32) Hotel Orange, 33) Grand Hotel Siantar, 34) Kantor Pos dan Telegraf, 35) *Grote Chines Winkel*, 36) bioskop, 37) Orange Bioskop, 38) kediaman direktur *Central Hospital Siantar*, 39) rumah direktur sekolah *Central Hospital SDF*, 40) sekolah perawat pribumi *Central Hospital SDF*, 41) Kantor Kepala *Central Hospital SDF*, 42) kediaman Kepala *Central Hospital SDF*, 43) administrasi *Central Hospital SDF*, 44) Perusahaan airminum, 45) pabrik es Siantar, 46) Kolam Renang, 47) Gereja Katolik, 48) gereja Protestan, 49) Sekolah Zending, 50) sekolah perkebunan berasrama, 51) sekolah berasrama persatuan pribumi Simalungun, 52) rumah sakit perkebunan, 53) Gereja Engels, 54) *Dierentuin*, 55) stasiun pengisian bensin untuk Bus, 56) garasi dan bengkel *Koek and*

Co, dan 57) Jembatan Diponegoro. Adapun bangunan infrastruktur di Kota Pematangsiantar bertahun 1926, ditunjukkan pada peta di bawah ini.



Peta Infrastruktur Pematangsiantar tahun 1926

Sumber: Nederlandsch Indies, 1995

Berdasar pada peta bertahun 1926 di atas, bangunan pusaka budaya di Kota Pematangsiantar dibagi dalam 4 (empat) segmen utama, yaitu:

Segmen	No	Nama Objek/Bangunan
<i>Kebun Bunga</i>	1	Kebun Bunga, alun-alun (<i>Esplanade</i>)
	2	Kantor Walikota (<i>Gemeente huis</i>)
	3	Kantor DPRD (Kantor Kerapatan Kerajaan Siantar)
	4	Kantor Bapeda (Kantor Dinas Pekerjaan Umum, BOW)
	5	Bank BRI (<i>Javasche bank</i>)
	6	Kantor Pengadilan Negeri (<i>landraad</i>)
	7	Bioskop Ria (<i>Rex Bioskoop</i>)
	8	Siantar Hotel
	9	Gedung Djuang (<i>Simalungun international club</i>)
	10	Kantor Telkom (<i>telefonkantoor</i>)
	11	Stasiun Kereta Api (<i>DSM Station</i>)
	12	Pergudangan Kereta Api (<i>DSM Goedang</i>)
	13	Tangki Minyak (<i>Olitank BPM</i>) Jln Mataram
	14	Hotel Bandung (<i>Ritenner hotel</i>)
<i>Pulau Holang</i>	1	Pasanggerahan Kerajaan Siantar
	2	Raja Siantar Huis
	3	Pabrik Es
	4	Riatur Inn (<i>Grand Siantar Hotel</i>)
	5	Pusat Pasar (<i>Siantar Central Market</i>)
	6	Kolam renang (<i>Zwimbaad</i>)
	7	Perusahaan air minum (<i>water-krachtcentrale</i>)
	8	Gereja Katolik Jln Sibolga (<i>R.K. Kerk</i>)
	9	Museum Simalungun

	10	<i>Simalungun Central Hospital (RSUD Siantar)</i>
	17	Kantor pos dan telegraf
	18	<i>Hotel Orange (Riang Bioskoop)</i>
	19	Ruko berarsitektur Tionghoa di Jln Cipto
	20	Barak Militer (Polisi Militer)
<i>Jalan Simbolon</i>	1	Rumah Dinas Walikota (<i>woning asisten resident</i>)
	2	Rumah Dinas Kontrolleur (<i>woning controleur</i>)
	3	<i>Protestan Kerk (Gereja HKBP) Jln. Gereja</i>
	4	<i>HVA Boarding school (Taman Asuhan)</i>
	5	<i>Siantar Central Hospital (Rumah sakit Tentara)</i>
	6	Rumah Direktur <i>Siantar Central Hospital</i>
	7	Sekolah Perawat <i>Siantar Central Hospital</i>
	8	Kantor Kepala <i>Siantar Central Hospital</i>
	9	Kediaman Kepala <i>Siantar Central Hospital</i>
	10	Kantor Administrasi <i>Siantar Central Hospital</i>
	11	Rumah Direktur <i>Harrison and Crosfield</i>
	12	Taman Margasatwa
	13	Sekolah zending
<i>Jalan Asahan</i>	1	Rumah sakit perkebunan (Yayasan Perguruan HKBP Siantar)
	2	Sekolah berasrama persatuan pribumi Simalungun (SMPN 1 Pematangsiantar)
	3	<i>Engels Kerk (Gereja HKBP Jln Asahan)</i>
	4	Pemakaman orang Eropa (Taman Pahlawan Nagur)
	5	Penjara Pantoan (garasi dan bengkel <i>Koek and Co</i>)

4. *City tourism* sebagai alternatif

Wisata kota atau wisata perkotaan (*city tourism*) berbeda dari jenis pariwisata lainnya. Perbedaannya terletak bahwa kota memiliki kepadatan yang tinggi dari sajian budaya yang beragam di wilayah relatif kecil, namun cukup menarik berbagai jenis wisatawan. Kemudian, sebagian besar atraksi dan fasilitas yang menarik minat wisatawan, yang mengarah pada interaksi wisatawan dan penduduk lokal. *City tourism* berbeda dengan *urban tourism*, yang cenderung menyuguhkan modernisme seperti hiburan seperti di Paris, New York, dan Milan, yang disebut dengan *urban metropolitan*.

Wisata Kota (*city tourism*) merupakan segmen perjalanan yang tumbuh paling cepat di dunia, dan merubah sifat pariwisata kota menjadi semakin terlihat di banyak kota di dunia. Kebangkitan *mass-tourisme* tahun 1960-an, *city tourism*, secara konsisten menjadi salah satu segmen pertumbuhan tercepat dari fenomena perjalanan di negara-negara ekonomi maju (Ashworth, 1989; 2011). Kota menjadi tujuan migrasi, bukan hanya untuk urusan bisnis, perdagangan, pendidikan ataupun mencari pekerjaan, namun menjadi tempat berkumpulnya para masyarakat dengan tujuan mencari kesenangan.

Pertumbuhan substansi pariwisata kota di dorong oleh kekuatan spasial, sosial, ekonomi dan teknologi (Postma, Buda, Gugerell, 2017). Proses urbanisasi di seluruh dunia menyebabkan peningkatan jumlah orang yang tinggal di kota dan merasa lebih terhubung dengan kota dan gaya hidup perkotaan. Kenyataan ini menunjukkan tingginya masyarakat keluar mengunjungi kota (ETOA, 2014). Pertumbuhan *city tourism* tercermin dalam 4 proses yang saling terkait; (1) kehadiran wisatawan, (2) keinginan otoritas dan perusahaan lokal menyambut wisatawan di wilayah mereka; (3)

penolakan pariwisata, yaitu sikap negatif terhadap pariwisata, dan (4) pandangan pariwisata yang melaluinya dunia ditafsirkan (Stock, 2007). Dengan demikian, implikasi ekonomi dan sosial, spasial pariwisata kota menjadi signifikan. Di level global, pariwisata kota tingkat nasional dan regional telah menjadi pendorong ekonomi yang penting.

City tourism, difasilitasi akses seluler ke informasi, wisawatan semakin mencari, menemukan dan mengonsumsi “pengalaman lokal” dan batas antara wisatawan dan pendudukan menjadi semakin kabur (Bock, 2015). *City tourism* berdampak bagi perkembangan kota di masa depan. *City tourism*, dengan demikian memerlukan pendekatan interdisipliner akan diperlukan untuk memahami sepenuhnya tantangan yang ditimbulkan oleh pariwisata kota serta untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk integrasi pariwisata yang berhasil ke dalam pembangunan kota di masa depan (Bock, 2015).

Lebih dari setengah populasi dunia bermukim di kota, dan diestimasi pada tahun 2030, diperkirakan sekitar 5 milyar penduduk tinggal di daerah perkotaan. Sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan, tujuan wisata terbesar di dunia adalah kota. Setiap tahunnya, ratusan ribu penduduk mengunjungi kota. Merujuk Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*, *city tourism* atau wisata kota ataupun pariwisata kota adalah “perjalanan yang dilakukan para pelancong ke kota atau tempat dengan kepadatan penduduk tinggi, dan durasi perjalanan dilakukan singkat, biasanya 1-3 hari” (UNWTO, 2012).

Merujuk data pada *Euromonitor International* (2015), kunjungan wisatawan internasional tahun 2013 meningkat sebesar 4,8%. Kemudian, 100 kota terkemuka di dunia

mengalami pertumbuhan sebesar 5,4% pada tahun yang sama. Kunjungan ke kota mencakup bisnis, pendidikan, dan kunjungan keluarga, mendorong peningkatan pariwisata kota yang teramati saat liburan. Meskipun *sun & beach holidays* mengalami pertumbuhan sebesar 31% dalam lima tahun terakhir, (mewakili 29% dari semua perjalanan liburan), segmen liburan wisata telah tumbuh sebesar 28% (mencapai pangsa pasar sebesar 23%). Segmen perjalanan kota meningkat sebesar 72% selama 5 tahun hingga mencapai 21%. Di beberapa kota, perjalanan kota melampaui *sun & beach holidays* sebagai liburan yang paling populer. Di Inggris misalnya, 42% mengambil liburan kota pada tahun 2014, dibanding 38% melakukan *sun & beach holidays* pada tahun yang sama (ABTA, 2014).

Peningkatan popularitas kota dipengaruhi 4 faktor, yaitu: (i) urbanisasi diyakini memperkuat tren pariwisata kota karena masyarakat yang tinggal di kota cenderung berasosiasi dengan kota dan kecenderungan mengunjungi kota lain (UNWTO, 2014); (ii) perkembangan maskapai bertarif rendah berdampak besar pada popularitas perjalanan kota, terutama karena fakta bahwa mereka membuat penerbangan lebih terjangkau, memperluas dan meningkatkan jangkauan penerbangan, sehingga menawarkan lebih banyak kota pilihan tujuan dan membuatnya lebih mudah diakses dari semakin banyak titik keberangkatan daripada masa lalu. Kenyataan ini berdampak bagi tersedianya kota-kota yang menyajikan biaya rendah (Dunne, Flanagan & Buckley, 2010).

Selanjutnya, (iii) kecenderungan proporsi penduduk yang melakukan perjalanan per tahun terus meningkat. Terdapat kecenderungan peningkatan jumlah hari libur yang lebih pendek daripada hanya satu hari libur utama per tahun (Tripadvisor, 2015), dan (iv) meningkatnya ketersediaan dan

penetrasi layanan berbasis internet selama siklus perjalanan, informasi yang mudah diakses, dan kemudahan pemesanan online, serta menemukan informasi selama berada di suatu daerah destinasi berdampak bagi kemudahan wisata kota.

City tourism, selain menginginkan nilai ekonomi, sekaligus menginginkan pengalaman budaya, dasar waktu luang untuk memperoleh nilai-nilai masyarakat modern. Penciptaan pengalaman budaya dan terutama atraksi menjadi bagian fundamental dari masyarakat global. Dalam konteks ini, museum misalnya, memainkan peran penting sebagai “pabrik makna” bagi pengalaman budaya pengunjung (Rooijackers, 1999). Motivasi budaya dalam pariwisata sejajar dengan meningkatnya minat budaya secara umum. Namun, Richards (2001) meyakini bahwa alih-alih peningkatan motivasi budaya, terdapat kunjungan singkat sehingga meningkatkan jumlah pengunjung ke semua jenis atraksi.

Menurut UNWTO (2002), penciptaan suatu destinasi wisata budaya tidak terbatas pada kota atau daerah yang menawarkan latar belakang budaya yang bagus atau warisan yang kaya. Kebangkitan pariwisata *heritage*, terkait dengan perasaan nostalgia yang terkait dengan disorientasi yang dihasilkan modernitas, yang telah menyebabkan peningkatan jumlah anggota organisasi yang berdedikasi pada konservasi heritage dan minat renovasi untuk mengunjungi aset heritage (Richards, 2001). Nostalgia, merupakan sumber ekonomi; nostalgia menjadi bisnis yang menguntungkan.

City tourism di Pematangsiantar adalah pariwisata *heritage* (*heritage city tourism*), berfokus pada bangunan-bangunan ‘pusaka budaya’ peninggalan era perkebunan. Mengapa bangunan ini menjadi penting?. Jawabannya ialah bahwa perkebunan menjadi faktor utama modernisasi, pertumbuhan dan perkembangan ‘Kampung Siantar’ menjadi ‘Kota

perkebunan' (*plantation city*) dan kemudian menjadi kota administratif (*gemeente*). Tanpa perkebunan, niscaya Kampung Siantar mendapat pengaruh 'Barat' seperti terekam pada beberapa bangunan yang masih eksis di jantung kota Siantar. Siantar, yang sebelum periode perkebunan masih merupakan daerah kecil, wilayah klan Damanik, kerajaan swapraja yang berpusat di Pulau Holang, berputar 300 derajat menjadi kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara (*residentie van Ooskust van Sumatra*) sejak tahun 1907.

Sejumlah bangunan dan infrastruktur didirikan pemerintah kolonial dan pengusaha Belanda guna mendukung *municipal* Siantar. Bangunan-bangunan dimaksud ialah hotel, sekolah, pabrik, kantor dinas, kolam renang, air minum, kantor walikota, bank, *showroom*, bengkel, rumahsakit, pusat penelitian, bioskop, rumah ibadah, stasiun kereta api, rumah toko, pusat pasar, makam, listrik, air minum, kantor pengadilan, museum, barak militer, kantor polisi, kantor pos, telepon dan telegraf, *Societat*, dan lain-lain. Semua ini menambah keindahan peralihan dari sebuah kampung menjadi kota di Sumatera Timur.

Namun, sebagian besar bangunan-bangunan dari periode perkebunan ini sudah musnah (*demolished*). Salah satu alasan terkuat, selain sentimen anti-kolonial, juga dipengaruhi alasan ekonomi yang menganggap bangunan-bangunan dimaksud tidak bernilai, tidak relevan dengan perkembangan masa kini, ataupun ketinggalan zaman. Akan tetapi, tidak seluruhnya bangunan-bangunan dimaksud telah hilang. Sebagian kecil, terutama yang dimanfaatkan sebagai kantor swasta dan sedikit bangunan pemerintah masih eksis di inti kota. Bangunan-bangunan yang masih eksis ini menjadi penanda terhadap kesuksesan perkebunan di masa lalu.

Tidak adanya upaya melestarikan bangunan-bangunan periode kolonial, dikhawatirkan menghapus atau menghilangkan jejak keberhasilan perkebunan di masa lalu. Kehilangan jejak ini, pada gilirannya membuat kota tanpa identitas atau memori kolektif. Masyarakat kota tidak mengetahui masa lalu kotanya. *City tourism*, terkait dengan tema utama kajian ini adalah wisata bangunan pusaka budaya (*cultural heritage building tourism*).

Mengapa tema *cultural heritage building tourism* menjadi penting?. Jawabannya dirangkum pada 4 poin berikut ini: (1) melestarikan bangunan pusaka budaya yang masih tersisa sebagai bukti historis, *memory collective* dan identitas kota (*city identity*) yang dipengaruhi, terutama oleh perkebunan; (2) membantu perkembangan kota melalui sektor pariwisata, memberikan insentif kepada ekonomi masyarakat serta memajukan kota yang ber-identitas; (3) pemanfaatan bangunan pusaka budaya sebagai ruang publik, yang dapat dikunjungi serta dipelajari guna menumbuhkan pemahaman terhadap arsitektur kota, terutama bagi masyarakat, pelajar dan pelancong yang datang ke kota, dan (4) mendorong pertumbuhan ekonomi kota melalui program urbanisasi yang berimplikasi bagi ketersediaan sektor-sektor atau destinasi kunjungan di kota.

5. *Cultural heritage building tourism*

Apabila berkunjung ke berbagai negara di belahan dunia, wisata bangunan pusaka budaya menjadi daftar pertama dalam kunjungan. Berkunjung ke Paris untuk melihat *Menara Eiffel*, atau *Coloseum* di Roma, atau bangunan bertahun 72 Masehi di *Pompey*, atau *Intramuros* di Pilipina, Tembok Berlin, Tembok Raksasa di Tiongkok, atau *Hagia Sophia* di Istanbul, Turkey, *Al Aqsa* (Sinagoge) maupun *Nativity Church* di

Yerusalem, Gereja St. Petrus di Vatikan, termasuk ke Arab Saudi maupun ke kota-kota lain seperti di Maroko, Yunani, Mesir dan lain-lain, semua yang dikunjungi adalah bangunan pusaka budaya yang menandai peradaban kotanya. Bangunan-bangunan pusaka budaya tersebut berinti pokok, nostalgia, kenangan, memori dari masa lalu, tetapi memiliki keuntungan ekonomi yang relatif besar.

Dua lembaga dunia, baik UNESCO maupun UNWTO berupaya melindungi bangunan pusaka budaya diberbagai negara sebagai *world heritage*, dikemas sebagai jati diri dunia, peradaban bangsa lintas negara (teritorial). Struktur bumi yang menyimpan ilmu pengetahuan, keunikan dan daya tarik dikemas sebagai "taman bumi" (*geopark*) seperti di Vietnam, Amerika Serikat dan beberapa diantaranya terdapat di Indonesia. Jumlah kunjungan ke negara-negara yang memiliki bangunan pusaka budaya, apalagi monumental, ternyata memiliki kontribusi ekonomi yang sangat tinggi. Ekonomi kota bergerak disebabkan jumlah kunjungan yang relatif tinggi.

Negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Israel, berlomba melestarikan bangunan pusaka budaya yang bernilai sejarah. Selain pengunjung bermaksud beribadah, sekaligus berwisata rohani dan juga berwisata sejarah. Di Indonesia, kota-kota seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Sumatera Barat, bahkan Medan dan Pematangsiantar memiliki potensi yang tinggi menggaet wisatawan dari Eropa. Ikatan emosional mereka dengan Sumatera Utara misalnya, terbangun sejak periode perkebunan. Berita-berita "*tempoe doeloe*" baik melalui koran (surat kabar) dan laporan-laporan resmi pemerintah kolonial, serta foto-foto yang tersimpan di badan arsip dunia, seperti KITLV (Leiden, Belanda), menyimpan nostalgia yang mengingatkan mereka tentang

Sumatera Timur. Potensi wisata bangunan pusaka budaya, semestinya dikembangkan dengan baik, sehingga kota-kota di Indonesia, termasuk Pematangsiantar, tidak selamanya menghabiskan anggaran dari negara, namun memiliki alternatif besar (penghasilan lain) untuk menyumbang pendapatan daerah.

Jumlah pengunjung ke Istanbul, Turkey tergolong tinggi untuk melihat langsung bangunan pusaka budaya yang dilindungi UNESCO. Misalnya, *Hagia Sophia* atau “*Aya Sofya*” (bahasa Yunani), *sancta Sophia* (bahasa Latin) atau “Kebijaksanaan Suci” di Istanbul, Turki. *Hagia Sophia* didirikan Konstantinus Agung, bergaya arsitektur Romawi Timur, dirancang Isidore dari Miletus dan Anthemius dari Tralles, dua ahli ukir dari Yunani dan mulai dibangun tahun 532 M. Pembangunannya dilakukan atas perintah Yustinianus I, Kaisar Romawi Timur. Pada awalnya, *Hagia Sophia* adalah Gereja (Katedral Ortodoks) dan tempat kedudukan *Patriark Ekumenis Konstantinopel*. *Hagia Sophia*, pada tahun 1204-1261 menjadi Katedral Katolik Roma di bawah kekuasaan Kaisar Latin Konstantinopel. Kemudian, pada 29 Mei 1453 hingga 1931 di ubah menjadi mesjid di bawah Kesultanan Utsmani, Mehmed II.

Selanjutnya, pada 1 Februari 1935, Mustafa Kemal Ataturk, mengubah *Hagia Sophia* menjadi Museum. Akhirnya, sejak 10 Juli 2020, *Hagia Sophia* dikonversi menjadi mesjid. *Hagia Sophia* adalah katedral terbesar kedua di dunia setelah Katedral Sevilla selesai dibangun tahun 1520. *Hagia Shopia* merupakan peninggalan Kekaisaran Kristiani Bizantium selama 900 tahun dan Kesultanan Muslim Ottoman selama 500 tahun. *Hagia Sophia*, oleh Komite Warisan Dunia di bawah UNESCO ditetapkan menjadi Situs Warisan Dunia (*world heritage site*), sebuah konsep pelestarian berbasis lintas negara-negara di

dunia. Di Sumatera Utara, Kaldera Danau Toba, pada tahun 2020 ditetapkan sebagai *UNESCO Global Geopark (UGG)* dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Penetapan ini, melingkupi 4 UGG, yaitu Batur, Cileteuh, Gunung Sewu dan Rinjani yang dikembangkan melalui *Global Geopark* dan *Asia Pacific Geoparks Network* dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Kerjasama kedua organisasi, UNESCO maupun UNWTO adalah menjaga dan mempromosikan objek-objek menjadi destinasi wisata yang dimaksudkan bukan sekedar merawat objek namun juga mengurangi kemiskinan. UNESCO memberikan predikat kepada objek-objek bersejarah untuk dilindungi dan menjadi destinasi wisata sejarah. Misalnya Candi Borobudur, Prambanan, Sawahlunto dan lain-lain di Indonesia. Apakah penetapan Kaldera Toba sebagai '*Geopark*' dapat memacu wisata di Sumatera Utara?.

Kaldera Toba, memadukan wisata alam (*geopark* dan *ecotourism*) dengan kebudayaan masyarakat lokal. Kedua promosi warisan dunia dalam bentuk wisata ini dikemas untuk melestarikan lingkungan dan alam sehingga tetap terjaga. Dalam bentuk yang lebih kecil, keduanya, geopark dan *eco-tourism* menginginkan pariwisata berbasis budaya (*tourism-based culture*), salah satu konsep wisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata ini dibedakan dari minat-minat khusus lainnya seperti alam dan petualangan (*adventure*). Pariwisata budaya memiliki 12 objek destinasi: (1) bahasa, (2) masyarakat, (3) kerajinan tangan, (4) makanan dan kebiasaan makan, (5) musik dan kesenian, (6) sejarah suatu tempat, (7) cara kerja dan teknologi, (8) agama yang dinyatakan dalam cerita, (9) bentuk dan karakter khusus arsitektur, (10) tata cara berpakaian penduduk setempat, (11) sistem pendidikan, dan (12) aktifitas pada waktu senggang.

Nostalgia dapat dibentuk melalui wisata bangunan pusaka budaya, *eco-tourism* maupun *world heritage*. Ketiganya memicu pengalaman wisatawan sesuai dengan karakteristik alam, kebudayaan dan lingkungan di lokasi destinasi wisata.

Di daerah perkotaan, model wisata yang relevan dikembangkan adalah *city tourism* yang dapat dikemas dalam wisata bangunan pusaka budaya yang didukung oleh *souvenir shop*, atraksi budaya, kuliner dan lain-lain. Narasi-narasi yang tercatat pada bangunan pusaka budaya, baik dalam ragam arsitektur, fungsi awal, struktur bangunan, serta cerita-cerita yang tersirat pada bangunan memiliki daya tarik bagi wisatawan. Kenyataan inilah yang sering terabaikan penggiat wisata ataupun pemerintah di Indonesia. Berfikir pengembangan terasa sulit dan tergantikan pragmatisme yaitu menghabiskan anggaran yang dialokasikan negara tanpa memberikan umpan balik (*feedback*) bagi negara. Seringkali pula, anggaran habis tanpa menyentuh objek destinasi. Milyaran anggaran tersedot namun seluruh objek tidak terlindungi dengan baik. Bahkan, ironisnya, objek-objek yang ada, yang seharusnya masih dapat dilestarikan, justru menghilang satu persatu. Fenomena di Kota Medan misalnya, hampir satu dasawarsa berorasi melalui media, seminar dan audiensi tentang penyelamatan bangunan bersejarah di kota itu, namun, *political will* pemerintah sangat minim.

Kajian ini, secara spesifik membahas model wisata bangunan pusaka budaya di Kota Pematangsiantar. Satu catatan penting adalah bangunan pusaka budaya yang dimaksud dalam kajian ini ialah peninggalan periode perkebunan. Karena itu, wisata bangunan pusaka budaya yang dimaksud dalam kajian ini terfokus pada bangunan-bangunan peninggalan kolonial. Bangunan ini adalah jati diri kota, ikon kota, identitas dan memori kolektif yang

semestinya dirawat dan dilestarikan. Bangunan-bangunan pusaka budaya bukanlah bangunan tak bernilai ekonomi, sosial dan pengetahuan. Di balik bangunan pusaka budaya terdapat pengetahuan arsitektur, struktur bangunan, kebermanfaatan awal, pengelolaan tata ruang, modifikasi sesuai iklim tropis, alasan mengapa bangunan didirikan, serta cerita-cerita lain yang tersirat dalam bangunan. Bangunan pusaka budaya, dengan demikian menyimpan potensi-potensi 'nostalgia' yang sangat baik bagi wisatawan.

Hingga saat ini, (penelitian dilakukan tahun 2020), situasi bangunan pusaka budaya di Kota Pematangsiantar memiliki nasib yang sama dengan kota lain di Indonesia seperti DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya maupun Medan. Kota-kota ini, dahulunya menjadi basis administrasi, industri dan perkebunan, memiliki bangunan yang megah di zamannya. Bangunan-bangunan itu menandai kekhususan teritorial sesuai dengan peruntukan kota pada periode kolonial. DKI Jakarta (dahulu disebut *Batavia*) adalah pusat pemerintahan di mana Gubernur Jenderal berkuasa. Dari Jakarta, pemerintahan digerakkan untuk mengontrol seluruh *Netherland Indies* (Indonesia). Tidak mengherankan jika bangunan-bangunan seperti di *Weltreveden* (Depok) misalnya, menjadi pemukiman elit orang Eropa di Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, tidak mengherankan juga apabila sejumlah besar bangunan, kantor, pertokoan, bioskop, pelabuhan udara dan laut, serta markas kepolisian dan militer terdapat di dalamnya.

Lain halnya dengan Surabaya, Semarang dan Yogyakarta, yang sejak dahulu dimaksudkan sebagai basis industri dan perkebunan di Pulau Jawa. Produk-produk perkebunan seperti gula, teh, kina, termasuk opium diproduksi dan dikembangkan di Surabaya dan Semarang. Bahkan, industri

rokok terbesar di Indonesia terdapat di Kudus dan Surabaya. Pabrik rokok terbesar di Surabaya, yang didirikan sejak era kolonialisme di Pulau Jawa mengembangkan *fieldtrip* di Surabaya untuk mengunjungi Museum H.M. Sampoerna, Monumen Kapal Selam, Tugu Hiu dan Buaya, Hotel Yamamoto, Museum dan Lapangan Pahlawan di Kota Surabaya dan lain-lain. Pada hakikatnya, *fieldtrip* yang dirancang Museum H.M. Sampoerna di Surabaya adalah bagian dari mengangkat masa lalu Surabaya dari bangunan-bangunan pusaka budaya bersejarah di Kota Pahlawan itu.

Di Pematangsiantar, tidak seluruhnya bangunan periode perkebunan dimusnahkan. Sebagian besar masih berdiri terutama bangunan yang dikuasai pemerintah. Namun, bangunan-bangunan yang dikuasai swasta cenderung telah dirobohkan dan diganti dengan bangunan baru. Bangunan pusaka budaya yang dikuasai pemerintah, tidak seluruhnya berdiri (eksis) tetapi beberapa diantaranya tidak luput dari pemusnahan. Sebagian kecil sedang dalam proses pembiaran, sedang sebagian kecil lainnya telah digantikan dengan bangunan baru. Pernyataan ini berarti bahwa, walaupun bangunan dikuasai pemerintah, individu ataupun swasta, tetapi nasib bangunan tidak luput dari proses pemusnahan.

Kekhususan perkebunan di Kota Pematangsiantar adalah jantung kota tersebut yang disebut dengan Peradaban Eropa (*Europe Civilization*). Sebagai jantung kota, kekhususan yang terdapat di kota-kota Eropa adalah infrastruktur yang saling terkait antara urusan pemerintahan, bisnis, jasa, hiburan dan transportasi. Di Kota Pematangsiantar, peradaban ini terekam di sekitar alun-alun (*esplanade*) atau ruang terbuka untuk umum, kini disebut Lapangan Kebun Bunga. *Esplanade* menjadi tempat pejabat pemerintah, tuan kebun (*planter*), nyonya (*meneer*), dan usawahan lain untuk mendapat angin

segar (di Sumatra Utara disebut dengan makan angin). *Esplanade* juga menjadi tempat lari pagi atau sore atau *go around*, kini populer dengan ungkapan *raun-raun*. *Esplanade* dibangun tepat di inti atau jantung kota (*the hearth of city*). *Esplanade* menjadi titik permulaan, tolak ukur menghitung atau pangkal pengukuran jarak kilometer atau titik nol (*ground zero*) terhadap daerah lain di sekitarnya.



Jantung Kota Pematangsiantar tahun 1930

Foto bertahun 1930 di atas di potret dari *Javasche Bank* (kini menjadi Bank Rakyat Indonesia cabang Pematangsiantar) adalah jantung Kota Pematangsiantar. Pada gambar di sebelah kanan tertulis hotel, yaitu Siantar Hotel, milik seorang Swiss, dibangun tahun 1925. Seajar dengan Siantar Hotel tertulis station, yaitu Stasiun Kereta Api DSM (*Delispoorweg Maatschappij*), sebuah moda transportasi pertama di Sumatera Utara yang dibangun sejak tahun 1883. Jaringan kereta api ke Siantar mulai dibangun sejak tahun 1917 ketika Pematangsiantar resmi menjadi wilayah *Netherland India* tahun 1907 dan menjadi bagian dari wilayah perkebunan Sumatera Timur (*cultuurgebied van Sumatra Ooskust*) sejak tahun 1920. Harus dibedakan bahwa, Pematangsiantar dan Simalungun telah menjadi ekspansi perkebunan sejak tahun 1907.

Komoditas teh misalnya, mulai ditanam sejak 1907, karet tahun 1911, kelapa sawit sejak tahun 1917, dan sisal sejak tahun 1924. Pengusaha Eropa terbesar yang menguasai perkebunan di Siantar adalah HVA (*Handels Vereniging Amsterdam*) atau Persekutuan Dagang dari Amsterdam. Kini, nasionalisasi perkebunan milik Belanda tahun 1958-1962, mengonversi HVA menjadi PTPN-4 di Indonesia.

Stasiun Kereta Api dan gudang-gudang barang memiliki areal yang luas. Dari Pematangsiantar, kereta api melaju ke stasiun pembantu di Dolog Malangir dan kemudian ke stasiun besar di Tebingtinggi dan selanjutnya ke Medan. Transportasi kereta api merupakan moda transportasi awal dan memiliki arti penting yang sangat tinggi untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang, dari Siantar menuju Medan dan Pelabuhan Belawan, demikian pula sebaliknya. Pada awalnya, Siantar Hotel beralamat di *Hotelweg* (Jalan Hotel) dan kini diganti dengan Jalan W.R. Supratman. Demikian pula stasiun Kereta Api, awalnya disebut *Stationweg*, namun kini diganti dengan Jalan W.R. Supratman. Di sudut kiri jalan W.R. Supratman menghadap Lapangan Adam Malik, berdiri Riang Bioskop, dahulunya disebut *Orange Bioskop*.

Di sudut kanan jalan Surabaya menuju stasiun kereta api, terdapat *Simalungun International Club*, yakni bangunan khusus bagi 'Kerah Putih' (*Societat*), yakni kumpulan pejabat, pengusaha, kepolisian, militer, jaksa, hakim, kepala dinas dan lain-lain. *Simalungun International Club* adalah semacam cafe untuk menikmati kopi, teh, musik, dansa, membaca koran, menerima sekaligus mengirim surat ke Eropa serta berbincang tentang program kerja dan kebijakan. 'Kerah Putih' adalah analogi bagi kumpulan high class, kasta tertinggi pekerjaan yang dianggap terhormat di era perkebunan. 'Kerah Putih' adalah golongan kaya, pemilik perkebunan, bangkir, pemilik

toko, kepala pejabat, asisten residen, kontroleur, kepala rumah sakit, yaitu seluruh individu yang memiliki struktur dan kelas tertinggi di masyarakat. 'Kerah Putih' adalah kerah kemeja putih yang dibalut dengan jas berwarna hitam, mengenakan dasi kupu-kupu, bertopi putih dan bersepatu hitam. Biasanya, mantel berwarna putih ditenteng di tengah, memegang rokok cerutu, sambil memegang koran. Ciri-ciri demikian, menjadi identitas khusus bagi 'Kerah Putih' yang menandai strata, dan kelas dalam masyarakat. Gedung assosiasi 'Kerah Putih', *Simalungun International Club*, berada di Jalan Merdeka, Pematangsiantar, tidak jauh dari Lapangan Parkir Pariwisata yang mengantarainya dengan Kebun Bunga. *Simalungun International Club*, pada masa kini berubah menjadi Gedung Djuang Nasional, yaitu kantor bagi Dewan Harian Daerah (DHD) 45, para veteran dan pejuang kemerdekaan tahun 1945. Gedung ini masih eksis, namun tidak berfungsi. Pernah difungsikan menjadi *cafe*, tetapi tidak bertahan lama. Tampaknya, bangunan ini sedang dalam proses pembiaran.

Gedung bertingkat dua, menghadap Jalan Merdeka (*Julianastraat*) adalah *Gemeentehuis*. Bangunan *Gemeentehuis* adalah *City Hall*, atau *Town Hall*, yaitu Balaikota, yakni kantor bagi walikota (*burgermeister*) atau *Major*, yakni pemimpin kota yang dipilih dan ditentukan secara periodik. Pematangsiantar ditetapkan menjadi *Gemeente* (kotapraja atau kotamadya) pada tahun 1917. Penyerahan tanah menjadi areal kota dipisahkan dari *zelfbestuur* (swapraja) Klan Damanik yang berpusat di Pulau Holang (Pamatang). Penyerahan lahan kepada *Gemeente*, dilakukan Riah Kadim Waldemar Damanik, Pemangku Raja Siantar tahun 1917-1924.

Penyerahan tanah dilakukan dalam bentuk hibah, anugerah atau pemberian seluas 1024 hektar. Garis pembatas *zelfbestuur territorial* dengan *gemeente*, di sebelah timur

dipisahkan oleh sungai yaitu Bah Bolon. Sedang di sebelah barat dibatasi oleh tangki minyak milik *Batafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* di jalan Mataram. Pada awalnya, wilayah *Gemeente* menyerupai wilayah persegi panjang, diantara Bah Bolon di sebelah timur dan jalan Mataram di sebelah barat. Kemudian, disebelah selatan adalah *Siantar Central Hospital* (Rumah Sakit Tentara) dan di sebelah selatan berbatasan dengan *afdeeling hospital* atau rumah sakit perkebunan HVA dan kini dikuasai oleh Yayasan Perguruan HKBP Pematangsiantar. Wilayah *Gemeente* Siantar terlihat dengan jelas seperti pada peta yang ditunjukkan pada prolog ini.

Diantara *Gemeente huis* (Balaikota) dan Siantar Hotel di Jantung Kota Siantar, terdapat sebagian kecil *alun-alun* atau *esplanade*, atau kini disebut Kebun Bunga. Pada foto di atas, tampak bahwa *esplanade* masih dalam bentuk sempurna. Keempat sisi *esplanade* telah ditanami pohon trembesi, tumbuhan khusus untuk memberi kesejukan kota, diimport dari Amerika Latin. *Esplanade* kurang lebih berukuran 4 hektar yang melebar dari Bioskop Ria (*Orange bioskoop*) hingga *Siantar Hotel*, *Simalungun International Club* maupun *Gemeente Huis*. Wilayah ini merupakan sentrum kota, di mana aktifitas pemerintahan, ekonomi dan bisnis digerakkan. Sementara terletak jauh di Stasiun Kereta Api, situasinya masih terlihat hutan belantara yang masih asri. Namun, seluruhnya yang tampak pada foto dan peta di atas, telah berubah drastis pada saat ini. Kota Pematangsiantar, yang dahulunya (tahun 1917) hanya 1024 hektar, kini menjadi kota kedua terbesar di Provinsi Sumatera Utara, setelah Kota Medan.

Bagian dari Segmen Pulau Holang ini sangat penting diuraikan. Suatu kenyataan di Eropa bahwa *Gemeente Huis* harus berada di tengah kota. Balaikota menjadi *Ground zero* (titik nol). Balaikota harus berdekatan dengan hotel, bank,

maupun transportasi (kereta api). Balaikota harus memiliki *esplanade* serta didukung oleh fasilitas lain seperti pengadilan (*landraad*), pekerjaan umum (*BOW*) dan bioskop. Paradigma ini menyuguhkan sesuatu yang memiliki makna terdalam. Setiap orang yang memiliki kepentingan ke kota, diantar kereta api, berurusan ke kantor walikota, dan jika memerlukan uang dapat menemukan bank terdekat, serta bermalam di hotel. Di siang atau malam hari, pengunjung kota dapat menikmati keindahan alam di *esplanade*, menonton di bioskop ataupun menikmati minuman dan membaca koran di cafe. Perkembangan kota Siantar pada tahun 1938 tergolong relatif cepat seperti ditunjukkan pada foto di bawah ini.



Foto Udara (*luftoto*) Jantung Kota Siantar, 1938

Sumber: kitlv.nl

Wisata bangunan pusaka budaya di Kota Pematangsiantar saat ini memiliki potensi tinggi apabila dikembangkan dengan baik. Terdapat 5 alasan utamanya, yaitu: (1) Kota Pematangsiantar adalah kota terbesar kedua di Sumatera Utara yang diapit oleh Danau Toba (kawasan wisata nasional) dan Sei Mangkei (kawasan industri nasional) yang terhubung ke Selat Malaka; (2) Kota Pematangsiantar adalah 'kota pelajar' yakni kota migrasi bagi pelajar setingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Ribuan siswa dan mahasiswa setiap tahun bermigrasi ke Siantar untuk bersekolah. Demikian pula sebagian besar mencari pekerjaan di sektor formal dan informal, (3) Kota Pematangsiantar adalah kota perkebunan dan diapit perkebunan dari Kabupaten Simalungun. Perkebunan memiliki potensi menjadi wisata agro yang melibatkan perusahaan perkebunan seperti PTPN-4 dan juga *Goodyear* maupun Lonsum, (4) Kota Pematangsiantar adalah kota majemuk dan multikultur.

Meskipun majemuk dan multikultur, kota ini dianugerahi sebagai "*Tolerance City*" di Indonesia tahun 2016-2018. Situasi majemuk dan multikultur menjadi aset wisata karena keragaman budaya, kuliner, atraksi dan performa budaya dan insentif lainnya, dan (5) Kota Pematangsiantar memiliki pertumbuhan drastis dalam 2 3 dekade terakhir. Perluasan kota dan pembangunan kota menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor perdagangan dan ekonomi jasa lainnya. Kini, Kota Pematangsiantar memunculkan ikon-ikon baru seperti '*Monumen Becak Siantar*' di samping Simalungun International Club ataupun Kebun Bunga, Viharaya Maitreya yang memiliki *Monumen Kwan Im* tertinggi di Sumatera Utara, di sekitar Jalan Panei, termasuk, meskipun masih terkendala adalah pembangunan Monumen

Raja Sang Nualuh Damanik, raja Siantar yang dimakzulkan Belanda tahun 1907, sang pengentas dari Siantar.

Wisata bangunan pusaka budaya di Pematangsiantar, dengan demikian adalah membangun konsep wisata yang mengandalkan bangunan-bangun pusaka budaya. Konsep wisata ini dipadu dengan *city tourism* yang melibatkan destinasi kekinian, kuliner dan atraksi budaya berkelanjutan. Kombinasi dari ketiga konsep ini, bertujuan menambah daya tarik kota, menjaga identitas dan memori kolektif yang berhubungan dengan bangunan pusaka budaya di Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu, hal utama dan terutama dalam perancangan wisata ini adalah pelestarian dan pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai jati diri, identitas dan memori kolektif. Kota yang baik, sebagaimana kami sebut diawal adalah kota yang mempertahankan identitasnya, embrio dan modernisasi yang menjadi pangkal pertumbuhannya.

Apabila bangunan-bangunan pusaka budaya ini dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik, sebagai kantor, ruang publik, cafe, butik, salon, agensi, museum, perpustakaan, galeri dan lain-lain, maka objek dapat lestari. Kesempatan tidak datang dua kali. Sekali bangunan-bangunan pusaka budaya itu hilang, maka sulit membangunnya kembali. Jikapun dibangun, ada nuansa yang hilang, alur cerita dan skenario yang tidak sejalan. Pecinta wisata bangunan pusaka budaya bukanlah minat khusus, melainkan wisata yang menyentuh setiap orang. Cerita-cerita di balik bangunan itu mengundang decak kagum, rasa hormat dan bangga terhadap masa lalu. Di sana terdapat sebuah nilai dan makna yaitu 'nostalgia'.

Museum Perkebunan Indonesia (Musperin) berkedudukan di Medan misalnya, memanfaatkan bangunan pusaka budaya

sebagai gedung museum. Sejak dibangun tahun 2016, hingga kini telah mengundang ratusan orang Eropa. Para pengunjung internasional ini adalah peneliti, penulis, pengelola, jurnalis bahkan cucu pendiri perusahaan Kereta Api DSM dan pengelola perusahaan kapal pelayaran milik kerajaan Belanda, Dlyoid pernah hadir di Musperin. Mereka ini memiliki kerinduan terhadap kreasi dan daya cipta yang ditorehkan leluhurnya bagi bangsa lain. Momen-momen seperti ini berpotensi mencitrakan warga kota yang peduli atau justru barbar terhadap warisan budaya. Pengembangan wisata kota, baik *city tourism* maupun *cultural building heritage tourism* dapat digerakkan individu atau swasta dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat. Namun, tanpa political will pemerintah, pemanfaatan bangunan pusaka budaya sebagai daya tarik wisata kota, secara perlahan dan pasti akan menemukan kesulitan. Tangan-tangan brilliant, dengan kreasi tinggi dan imagi relevan, sangat dibutuhkan untuk melindungi dan memanfaatkan bangunan pusaka budaya di perkotaan. Bangunan pusaka budaya tersebut merupakan jati diri, identitas dan memori kolektif yang menorehkan semua sisi dan aspek di kota.

Karya berupa buku ini adalah pengkajian dan perenungan mendalam para pengkajinya untuk membantu pemerintah kota Pematangsiantar serta *stakeholder* lainnya yang berkepentingan terhadap wisata kota. Kami hanya memiliki ide dan gagasan yang selanjutnya harus diambilalih (*take over*) oleh pemerintah dan *stakeholder* dalam rangka optimalisasi wisata kota, yang berkontribusi bagi pengembangan kota dan alternatif kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial warga kota. Tanpa adanya upaya relevan dalam menata bangunan pusaka budaya di Kota Pematangsiantar, niscaya, konsep wisata yang kami tawarkan ini akan mengalami kebuntuan

dan hanya akan ada dalam kepala pengkajinya. Dengan demikian, dibutuhkan sinergi, kolaborasi dalam merumuskan kebijakan guna mendapat hasil maksimal bagi masyarakat, pemerintah kota maupun *stakeholder* yang memiliki interest terhadap wisata kota, khususnya wisata bangunan bersejarah di Kota Pamatangsiantar. *Semoga!*

Medan, pertengahan September 2020

ELD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Faktor perkebunan merupakan determinan pendirian bangunan-bangunan ikonik (selanjutnya disebut Pusaka Budaya) seperti perkantoran, perbankan, sekolah, rumah ibadah, kolam renang, bioskop, pusat pasar, kantor walikota, kantor pos, hotel, jalan dan jembatan, lapangan olahraga, ruang terbuka umum, kantor polisi, barak militer, pabrik es, termasuk pabrik di perkebunan (kelapa sawit, teh, karet) ataupun pemukiman-pemukiman tenaga kerja (*emplasmen*) dan lain-lain. Lebih dari separuh pusaka budaya era kolonial di Siantar masih berdiri megah; dimanfaatkan sebagai kantor, toko ataupun restoran. Namun, sebagian telah punah (*demolished*) serta sengaja dibiarkan terlantar. Kajian ini bukan bermaksud untuk membentuk dan menjalin memori kota tetapi yang paling menentukan adalah pemanfaatan pusaka budaya yang ada memiliki keberdampakan sosial dan ekonomi bagi masyarakat kota.

Bangunan-bangunan pusaka budaya harus dilestarikan sesuai UU No. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya*, di mana salah satu objeknya adalah Bangunan Bersejarah. Kemudian, UU no 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan* mengatur tentang pokok-pokok pikiran yang dikandung bangunan bersejarah perlu mendapat perhatian guna memperkuat jati diri bangsa. Teknis pemanfaatan pusaka budaya dituangkan dalam Permendikbud no 45 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Dalam kerangka itu, tidak ada alasan lain kecuali satu opsi

yakni memanfaatkan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi wisata sehingga memiliki signifikansi bagi masyarakat luas. Berdasar uraian di atas, basis hukum kajian dirumuskan pada Gambar 1 di bawah ini:

Bangunan Pusaka Budaya	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Permendikbud No. 5 Tahun 2018 tentang Teknis Penyusunan PPKD
Setiap bangunan yang memiliki usia lebih dari 50 tahun, mewakili gaya dan arsitektur khas, sebagai bukti kehidupan di masa lalu dan bermanfaat bagi pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Setiap bangunan yang memiliki usia lebih dari 50 tahun, mewakili gaya dan arsitektur khas, sebagai bukti kehidupan di masa lalu dan bermanfaat bagi pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • perencanaan; • konsolidasi data • pengolahan data; • analisis atas hasil pengolahan data; dan • penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Gambar 1. Acuan hukum pemanfaatan bangunan pusaka budaya (BPB) di Indonesia

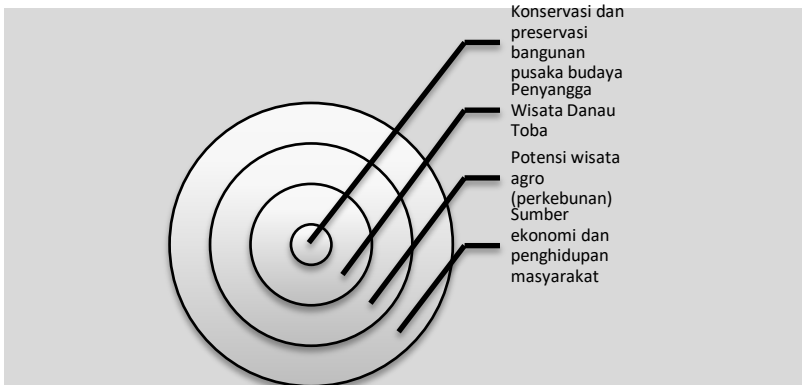
Lebih spesifik, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan pemanfaatan pusaka budaya sebagai

destinasi wisata di Kota Siantar. Masalah difokuskan pada pusaka budaya era kolonial, yaitu bangunan-bangunan era kolonial yang masih tersisa sebagai destinasi wisata budaya. Pusaka budaya dimaksud bukan saja pertanda kegemilangan perkebunan, perubahan citra kampung menjadi kota, pertanda modernisasi, namun yang paling menentukan adalah pemanfaatan menjadi objek atau destinasi wisata budaya. Pusaka budaya era kolonial, beberapa diantaranya masih berdiri megah, dimanfaatkan sebagai kantor, toko atau galeri, namun sebagian telah punah (*demolished*) serta sebagian tengah dibiarkan (proses sistemik pengrusakan). Memori perkembangan Kota Siantar terekam jelas pada dokumentasi foto-foto kolonial yang tersimpan di *Kitlv* dan *Tropen Museum Institute*, keduanya berkedudukan di Belanda. Kajian ini memanfaatkan arsip foto-foto kolonial tentang pusaka budaya era kolonial di Kota Siantar sebagai material kajian dan alat analisis.

Upaya pemanfaatan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi wisata, ditengarai beberapa determinan: (1) konservasi, pelestarian dan preservasi bangunan pusaka budaya sebagai bukti historis, monumen perkebunan dan objek wisata sejarah dan budaya, (2) menghidupkan kota Pematangsiantar sebagai penyangga Danau Toba yang kini diplot sebagai Destinasi Wisata Nasional, (3) koneksitas antara Danau Toba dan Sei Mangke ke Pelabuhan Tanjungbalai ataupun Boga di Batubara, (4) potensi wisata agro (perkebunan) terutama teh, kelapa sawit dan karet, dan (5) perluasan aspek penghidupan ekonomi bagi masyarakat di Kota Siantar.

Kelima determinan di atas, bukan saja bermanfaat bagi pelestarian ikonik perkebunan namun berkontribusi aktif bagi

sumber-sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Potensi pemanfaatan bangunan pusaka budaya memiliki signifikansi seperti tampak pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Potensi pengembangan bangunan pusaka budaya

Siantar, atau tepatnya Pematangsiantar adalah kota terbesar kedua (*2nd Biggest City*) di Provinsi Sumatera Utara. Siantar adalah kota perkebunan (*plantations city*), kota yang berkembang karena faktor perkebunan (Damanik, 2016). Peradaban Eropa, sebagai pengaruh perkebunan tertancap di jantung kota Siantar di sekitar Titik Nol (*ground zero*). Titik Nol terletak di *Esplanade* (sekarang Kebun Bunga), segitiga jantung kota yang menghubungkan Kantor Walikota (*Townhall*), Stasiun Kereta Api (*Spoorweg station*) dan Siantar Hotel. Segitiga ini, hingga kini, masih jelas terlihat di Kota Siantar. Kecuali Medan, tidak ada kota lain di Sumatera Utara seindah kota Pematangsiantar pada era kolonial. Orientasi dan pemanfaatan ruang berbasis selatan-utara.

Di selatan adalah pemukiman bangsa Eropa (*Europeanwijk*), di tengah adalah zona inti kota, kompleks perkantoran, pusat

pasar (*central market*), pemukiman orang Cina (*Chinessewijk*) dan India (*Indianwijk*). Berdampingan dengan zona inti, dipisahkan oleh Bah (Sungai) Bolon, terdapat Pulau Holang, pemukiman swapraja (*self-government*) atau *zelbestuur* Siantar (*Nativewijk*) dari klan Damanik. Di arah utara adalah zona pengembangan berupa lapangan olahraga, penjara, rumah sakit dan sekolah. Di pinggiran kota, terdapat pemukiman *migrant inlanders* seperti Kampung Karo, Kampung Jawa, Kampung Toba, Kampung Timbanggalung, dan lain-lain (Damanik dan Dasuha, 2016).

Hingga tahun 1907, Siantar masih terisolasi dari hingar bingar modernisasi. Wilayahnya tertutup hutan belantara dan populasinya homogen, etnik Simalungun. Bila merujuk Anderson pada lawatannya tahun 1823 disebut bahwa populasi "*Seantar*" [Siantar], "*Principal State of Semalongan*" [Simalungun] tidak lebih dari 2000 *inhabitans* (Anderson, 1971). Namun, menjelang Akhir Abad 19, Siantar telah berkembang sedikit lebih maju. *Natives* Siantar telah berkembang hingga ke Bandar Pulou (Asahan), Boga (Batubara), Padang (Tebingtinggi), Bedagei dan Serdang (Dijk, 1894). Orang Simalungun memasuki Abad 20 berkembang hingga ke pantai timur Sumatera Utara, menguasai perdagangan di Selat Malaka.

Sejak tahun 1907, Siantar berkembang menjadi sebuah pusat industri berbasis perkebunan di Sumatera Utara. Sejumlah komoditas dibudidayakan, berturut-turut mulai dari teh, karet, kelapa sawit, sisal dan coklat (Damanik, 2017). Semuanya terhampar luas di Siantar dan sekitarnya. Tidak hanya menjadi wilayah perkebunan, di Siantar berdiri pabrik-pabrik pengolahan sumberdaya perkebunan seperti pabrik kelapa sawit, pabrik teh, pabrik karet, pabrik kopra, dan juga

pabrik es. Kota Siantar terletak diantara Danau Toba di Selatan dan Selat Malaka di Utara. Posisinya menjadi pintu gerbang utama (*main gate*) manusia, barang dan jasa serta unit-unit sosial budaya lainnya.

Penaklukan Kerajaan Marga (*clan kingdom*) di Siantar, klan Damanik tahun 1907, berupa *Korte Verklaring* (Pernyataan Singkat), menjadi momentum Siantar mendapat pengaruh modernisasi. Siantar yang dahulunya terisolasi, berkembang menjadi kota modern, kota perkebunan, penyangga kota Medan, kota transit ke pusat destinasi populer di awal Abad 20, *Tuktuk Sipiak* (Parapat) dan Danau Toba (Damanik, 2016). Semenjak tahun 1907, Siantar berputar drastis, 360 derajat berubah wujud sebagai kota perkebunan. Konsekuensi logis perkebunan berkontribusi positif bagi perubahan kampung menjadi kota (*gemeente*) tahun 1917, yaitu Kota Pematangsiantar. Kemudian, faktor perkebunan berdampak pada penyatuan wilayah Siantar sebagai daerah perkebunan menjanjikan di Sumatera Utara sejak tahun 1920 (*Cultuurgebied van Ooskust van Sumatra*) (Tidemann, 1922).

Sebagaimana disebut di atas, memori perkembangan kota terekam jelas pada dokumentasi arsip kolonial di Belanda. Dokumentasi dimaksud dihadirkan sebagai bukti fisik dan material kajian yang dikomparasi dengan situasi masa kini. Akhirnya, situasi masa kini berimplikasi bagi pemamfaatan bangunan pusaka budaya era kolonial sebagai destinasi wisata. Urgensi dan signifikansi kajian ini terletak pada 3 determinan: (1) belum adanya kebijakan resmi, baik pemerintah maupun komunitas (pemerhati) bangunan pusaka budaya di Siantar, (2) pemanfaatan bangunan pusaka budaya masih bersifat parsial yang lepas dari konsepsi pariwisata berbasis budaya, dan (3) menentukan langkah konservasi atau

preservasi yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan pusaka budaya sesuai amanah UU no 11 Tahun 2010 dan UU no 5 Tahun 2017 tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan. Kajian ini bermanfaat untuk menyiapkan naskah akademik pemanfaatan bangunan pusaka budaya sebagaimana digariskan oleh regulasi pemerintah dalam UU maupun Permendikbud.

B. Masalah, tujuan, luaran dan kontribusi

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, kajian ini memfokuskan diri pada bangunan-bangunan era kolonial sebagai destinasi wisata. Secara spesifik, masalah difokuskan pada dua poin; (1) situasi dan kondisi terkini bangunan era kolonial di Kota Siantar; dan (2) pemodelan wisata memanfaatkan bangunan era kolonial sebagai destinasi wisata budaya di Sumatera Utara.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk menemukan model pemanfaatan bangunan-bangunan era kolonial sebagai destinasi wisata budaya di Provinsi Sumatera Utara. Luaran (*output*) kajian adalah (1) artikel publikasi ilmiah bereputasi di jurnal terindeks *Web of Science (WOS)*, di *Asian Research Institute Journal*, (2) Kekayaan Intelektual (KI) pada pemodelan, (3) Hak Cipta, dan (4) buku ber-ISBN bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Kajian berkontribusi pada lima aspek, dirumuskan sebagai berikut: (1) pelestarian bangunan-bangunan era kolonial sebagai ikon dan monumen kota, (2) bertambahnya kuantitas destinasi wisata di kota, (3) optimalisasi fungsi bangunan era kolonial dalam kerangka *City Tours*, (4) menyangga wisata alam Danau Toba dan Agro perkebunan, dan (5) alternatif sumber penghidupan ekonomi bagi masyarakat.

C. Tinjauan pustaka

Regulasi Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan adanya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan pusaka budaya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya*, Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan*, serta Permendikbud no 45 Tahun 2018 tentang *Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)*. Berdasar pada ketentuan ini, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk turut berpartisipasi dalam melakukan kajian pemanfaatan bangunan pusaka budaya.

Perguruan tinggi adalah mitra pemerintah untuk melakukan studi kelayakan, analisis substansi dan perumusan kerangka kebijakan dalam konservasi, preservasi ataupun perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan pusaka budaya. Bangunan-bangunan pusaka budaya di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Medan bahkan Pematangsiantar belum mendapat apresiasi terutama dalam pemanfaatannya sebagai destinasi wisata budaya. Salah satu tujuan pemanfaatan bangunan pusaka budaya adalah pariwisata. Sebagai catatan, di Provinsi Sumatera Utara, pariwisata bukanlah fenomena masa kini.

Pemerintah Kolonial Belanda, khususnya sejak tahun 1924 telah mengemas Danau Toba dan Brastagi sebagai objek wisata unggulan di *Netherland Hindia* (baca Indonesia) kecuali Bali. Kedua objek destinasi di Sumatera Utara ini memadukan keindahan alam. Brastagi yang tropis, berhawa dingin dan sejuk menimbulkan memori bagi orang Eropa di Sumatera Timur untuk mengobati kerinduannya terhadap kampung halamannya di Eropa. Itulah sebabnya, hampir keseluruhan

pengusaha-pengusaha perkebunan memiliki *villa* (tempat peristirahatan) di Gundaling. Kemudian, Danau Toba, dengan keindahan alam dan air yang sejuk, masuk dalam Atlas Dunia (Globe) sejak Herman Neubroner van der Tuuk tahun 1848, dikemas menjadi tujuan destinasi. Keduanya, dikemas oleh *KPM Line*, badan pelayaran Kerajaan Belanda untuk mempromosikan Danau Toba dan Brastagi di kancah internasional (Damanik, 2016).

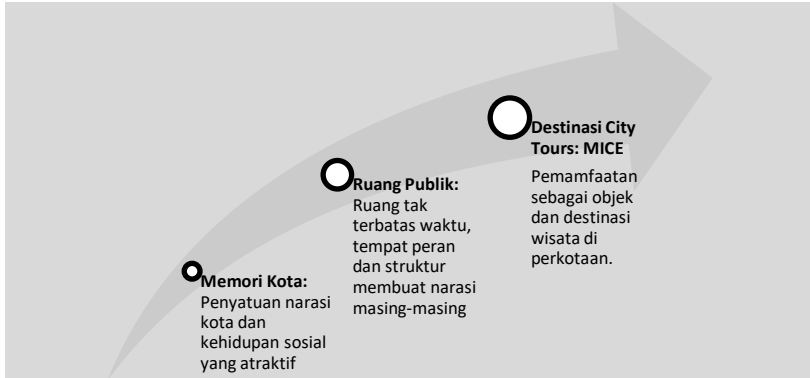
Paradoks dengan Bali yang pariwisatanya terus melejit, Danau Toba dan Brastagi terus merosot hingga titik nadir. Kajian ini, secara khusus berupaya menganalisis pariwisata Sumatera Utara. Namun, kajian tidak mengambil setting di Danau Toba maupun Brastagi sebagai objek kajian, akan tetapi di Kota Siantar. Di lokasi ini, objek kajian diprioritaskan bagi wisata budaya dalam konsep *city tour*, yang memanfaatkan bangunan-bangunan era kolonial. Korelasi kajian ini dengan Danau Toba misalnya, apabila kajian ini berdaya guna, maka predikat Siantar sebagai 'penyangga' (*buffer*) wisata akan berdampak holistik bagi masyarakatnya. Pariwisata budaya dalam konsep *city tour* adalah pemanfaatan artefaktual kota sebagai destinasi wisata.

Artefaktual kota adalah bangunan-bangunan ikonik yang dimanfaatkan sebagai *galery*, *cafeshop*, butik, *souvenirshop*, *arts performance*, bank dan lain-lain yang sekaligus sebagai ruang publik. Di negara-negara Barat seperti di Berlin dan Manila di *Intramuros* (Kota Bertembok), dua kota yang pernah saya (peneliti) jelajahi, menjual artefaktual kota beraroma historis sebagai destinasi wisata. Bahkan, di Surabaya, *City Tour* dikelola oleh dengan menghubungkan Jembatan Merah, Hotel Yamato, Monumen Kapal Selam, Tugu Pahlawan, Tugu Hiu dan Buaya, Pabrik Rokok Dji Sam Soe dan lain-lain dengan

layanan mobil gratis. Pengalaman ini saya dapatkan ketika masih kuliah di Surabaya.

Pariwisata di Abad Modern, terutama sejak Awal Abad 21 bergeser dari keindahan alam (natural) ke pariwisata budaya (*cultural tourism*). Alam menyajikan anugerah (ciptaan Tuhan) sementara manusia hanya berdiam diri. Berbeda dengan pariwisata budaya, di mana destinasi yang ditawarkan adalah kecerdasan, peradaban dan kebudayaan manusia dalam mengolah alam. Pariwisata budaya bukan menawarkan eksotisme, namun lebih kepada penonjolan *local wisdom* yang mencakup *local knowledge*, *local technology*, maupun *local intelligence*. Ketiga *local wisdom* ini bermuara pada peradaban manusia. Itulah sebabnya, pariwisata budaya sangat digemari dengan cara keterlibatan dalam berbuat (*ecovoluntourism*).

Pada masyarakat atau lingkungan perkotaan (*urban environment*), pariwisata budaya diwujudkan dengan *city tours*, yaitu berwisata dengan mengunjungi bangunan pusaka budaya serta seluruh aktifitas yang terdapat didalamnya. Konsep ini, *city tours*, adalah pengembangan pariwisata di lingkungan kota yang mengemas artefaktual sejarah sebagai destinasi wisata. Berdasar uraian ini, bangunan budaya atau pusaka budaya memiliki nilai dan fungsi bagi masyarakat, ditunjukkan pada Gambar 3, yaitu:



Gambar 3. Signifikansi Bangunan Pusaka Budaya

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, kajian ini memfokuskan diri pada bangunan era kolonial yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Dua pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis melalui arsip foto yang terdokumentasi di KITLV ataupun *Tropen Museum Institute*. Pendekatan selanjutnya adalah pariwisata budaya. Pendekatan pertama bertujuan untuk membangkitkan memori kota di masa lalu: permulaan pembangunan, pemanfaatan dan orientasi ruang, serta keadaan masyarakatnya. Dalam hal ini, sumber yang dianalisis adalah foto, yakni arsip dokumentasi dari era kolonial. Adapun maksud penggunaan arsip foto ialah menyusun kembali narasi sejarah sosial kota dan masyarakat di Siantar. Pendekatan kedua bertujuan untuk memandang kebermanfaatan bangunan pusaka budaya dalam konsep pariwisata budaya yang disebut dengan *city tours*.

Pendekatan historis memandang arsip foto sebagai sumber sejarah. Dalam hal ini, jejak perkebunan yang termanifestasi pada bangunan kolonial di Kota Siantar dapat dilacak. Foto adalah catatan yang direkayasa secara canggih, hasil hubungan sekilas antara orang yang difoto dengan fotografer

(Taylor, 2008). Foto tidaklah semata-mata kenangan terhadap masa lalu. Foto bukanlah sekedar gambar diam (tidak bergerak) yang dihasilkan melalui teknologi cahaya lewat kamera. Foto baik karena di sengaja (*by design*) maupun *in situ* atau alamiah (*natural*) adalah potret (*potrait*) mewakili masanya yang berfungsi sebagai sumber dan alat bantu analisis. Foto memiliki nilai tekstual dan kontekstual yang didalamnya tersirat situasi, kondisi, keadaan, artefaktual ataupun peristiwa di masa lalu. Arsip foto tidaklah bisu, namun berbicara mewakili zamannya. Foto, baik alamiah maupun pesanan (*by design*) menjadi sumber ide, gagasan ataupun prakarsa untuk menjelaskan 'sesuatu' yang penting bagi kehidupan masa kini.

Menurut Taylor (2008) arsip foto (*beeld*) atau *picture* (bahasa Inggris) dijadikan alat penting memahami kedudukan masyarakat dalam sejarah. Senada dengan Taylor, penulis Breman (1992), menyebut bahwa foto merupakan sarana pendukung yang penting untuk memperoleh transparansi hubungan sosial. Dalam jumlah terbatas, foto yang pengambilannya di atur (*by design*) dan hampir semuanya dibuat oleh tukang potret (fotografer) komersial menurut pesanan. Dalam kajian ini, foto arsip kolonial tentang bangunan era kolonial di Siantar memiliki fungsi seperti: (1) perekam objek dan subjek pada eranya, (2) media ekspresi subjek, (3) mengkomunikasikan ide dan gagasan, (4) kesenangan, dan (5) dokumen pribadi (arsip pribadi).

Sebagai alat bantu analisis sejarah tekstual dan kontekstual, arsip membantu analisis kesejarahan tentang: *pertama* design dan tata ruang di era kolonial, *kedua* memahami teks dan kontekstual historis masyarakat dan kebudayaan di era lampau, *ketiga* jejak (bukti) digital peradaban manusia dan

lingkungan di masa lampau, *keempat* lukisan atau gambaran tentang situasi, keadaan, dan peristiwa pada era lampau serta *kelima* refleksi konstruksi kesadaran guna memperkokoh identitas nasional. Foto bermanfaat membentuk narasi (Nordholt, Purwanto dan Saptari, 2008). Foto menjadi bukti riil terhadap sesuatu peristiwa di masa lampau yang dapat di lihat pada masa kini (*real object can be seen*). Foto berguna menghadirkan kebudayaan materil untuk dipahami (*to present material culture to be viewed*).

Pada dasarnya, foto dapat berbicara dengan mata (*speak to the eyes*). Foto bukan saja melukiskan kenangan terhadap masa lalu tetapi daripadanya kebudayaan dapat didefensikan. Selain dapat memperkaya kisah-kisah sejarah, foto dapat membuka dan menawarkan topik-topik penulisan. Loderics (2008) misalnya, menguraikan kota Medan berdasar foto yang tampak dari ragam bangunan dan arsitektur yang ada di dalamnya. Penulis lainnya adalah Buiskool (2005) yang menulis buku panduan wisata sejarah (*historical tours*). Bangunan-bangunan berarsitektur *art deco*, *empire style*, *moghul*, *European transition* maupun *modern* dan lain-lain. Beragam gaya ini menggambarkan mahakarya arsitektur guna menopang keindahan kota di zamannya. Kajian Hidayat, Ganie dan Harefa (2018) menitikberatkan pada estetika bangunan di Medan, ataupun Hutaauruk dan Rambe (2017), tentang Tjong A. Fie Mansion di Kota Medan, berbeda dengan maksud dan tujuan kajian ini.

Penulis lain seperti van Anrooij (2014), menyebut bahwa foto-foto dan peta-peta memperlihatkan gambaran tentang bagaimana *Deli Maatschappij* berfungsi dan memberikan kontribusi dalam membuka dan membangun Pantai Timur Sumatera. Di kota lain seperti Semarang, Wijanarka (2007)

menulis tentang desain arsitektur kawasan bersejarah yang banyak merujuk pada foto-foto dari era kolonial. Menurut Wijanarka (2007) berdasarkan foto arsip kolonial ditemukan tentang desain atau tata ruang kota Semarang sehingga dapat ditentukan kawasan bersejarah di kota itu. Demikian pula Adishakti (1997) di Yogyakarta tentang konservasi bangunan bersejarah sebagai *Historic-tourist City*.

Demikian halnya Basundoro (2009) pada kajiannya tentang Malang dan Surabaya yang tidak bisa lepas dari foto sebagai unit analisis. Bahkan, sejarah kota-kota di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan telah ditulis dengan baik oleh Colombijn (2005). Buku dengan judul: *The Social World of Batavia* di tulis Taylor (2003) guna mendeskripsikan kehidupan sosial di *Batavia*. Salah satu alat bantu analisis yang digunakan Taylor guna mendeskripsikan kehidupan sosial di *Batavia* adalah mengikutsertakan foto-foto dari era kolonial. Analisis Taylor (2008) tentang Aceh berdasarkan foto-foto arsip kolonial Belanda. Menurut Taylor (2008), orang Aceh tidak berpengalaman bergaul dengan orang-orang Indonesia dari tempat lain, sama seperti halnya banyak dari mereka yang merasa sulit hidup dalam negara Belanda.

Penulis Kusno (2009) pada bukunya: *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif* menjadikan foto sebagai unit analisisnya tentang Kota Jakarta. Ruang publik dengan segala artefak yang dihadirkan membantu untuk mengingat momen-momen yang dapat diingat kembali. Jika ruang publik, berikutan dengan artefaknya hilang, maka manusia kehilangan tempat merajut memori kolektif. Kemudian, arsip-arsip foto kolonial telah diulas untuk membentuk narasi kebudayaan dan masyarakat Simalungun pada era kolonial (Damanik, 2018). Pendek kata, foto bukan saja menggambarkan situasi masa lalu, tetapi juga

menjadi alat analisis guna membenteng persoalan kekinian sesuai dengan bidang kajian yang digeluti para sarjana. Terhadap foto itu, para sarjana bukan hanya sekedar mengamati dan memahaminya, tetapi yang paling penting adalah menemukan kontekstual foto serta memberikan narasi dan deskripsi guna menemukan makna (*meaning*) pada masa kini. Karena itu, foto adalah *real object can be seen, to present material culture to be viewed dan speak to the eyes*. Dengan foto, pengamat memiliki material untuk membentuk narasi, membingkai keterkaitan masa lalu dan masa kini dalam konsepsi wisata budaya atau wisata sejarah.

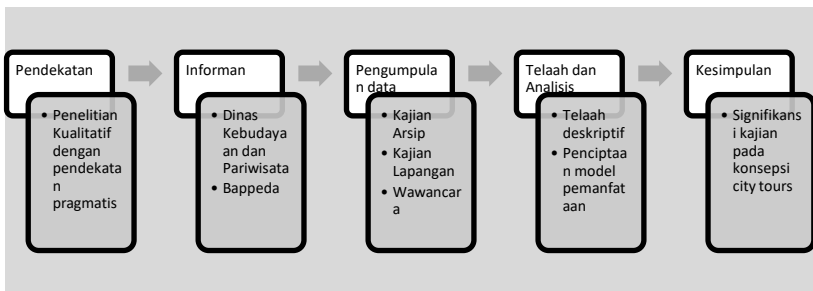
D. Prosedur pelaksanaan

Kajian dijalankan secara kualitatif dengan pandangan metodologis pragmatis (Creswell 2007, 2014). Pandangan metodologis pragmatis didasarkan pada pendekatan *nomothetic* yang bersifat kausal-fungsional (Ritzer 1988) guna memahami manusia secara holistik yang dibentuk melalui narasi berdasar pandangan rinci informan dalam lingkungan alami (Creswell 2014). Pendekatan pragmatis memandang realitas secara tunggal dan ganda, percaya bahwa pengetahuan bersifat objektif dan subjektif, memiliki pandangan yang bias dan tidak memihak serta pertanyaan penelitian menentukan pilihan metodologi dan retorika karena validitas ada dalam semua pendekatan (Creswell 2011).

Pendekatan pragmatisme adalah pilihan ideal karena mengikuti desain metode campuran (Johnson 2004). Berbagai perspektif mampu memberi informasi terbaik tentang masalah (Greene 2008), atau berguna pada saat informasi tunggal dari satu sumber tidak mencukupi (Creswell 2011). Data-data

dikumpulkan melalui kajian arsip, kajian lapangan dan wawancara mendalam. Kajian arsip adalah interpretasi terhadap arsip foto, peta ataupun laskap kota Siantar pada era kolonial. Artip diperoleh dari KITLV maupun Troppen Museum Institut, baik secara online ataupun kehadiran di Jakarta. Kajian lapangan dilaksanakan melalui kehadiran dilokasi penelitian.

Amatan difokuskan pada bangunan-bangunan memorial dan ikonik dari era kolonial Belanda. Wawancara mendalam difokuskan pada pemanfaatan dan fungsi-fungsi bangunan era kolonial pada masa kini sebagai destinasi wisata budaya. Siginifikansi wawancara, pada kajian ini berkontribusi untuk mendapatkan penegasan, rekognisi dan keberdampakan bangunan era kolonial dalam pariwisata masa kini. Analisis kualitatif-deskriftif dipergunakan untuk memahami objek kajian. Analisis difokuskan untuk memahami signifikansi bangunan era kolonial dalam konsepsi pariwisata budaya. Berdasar uraian di atas, berikut disarikan langkah-langkah penelitian, tampak pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Proses dan mekanisme penelitian

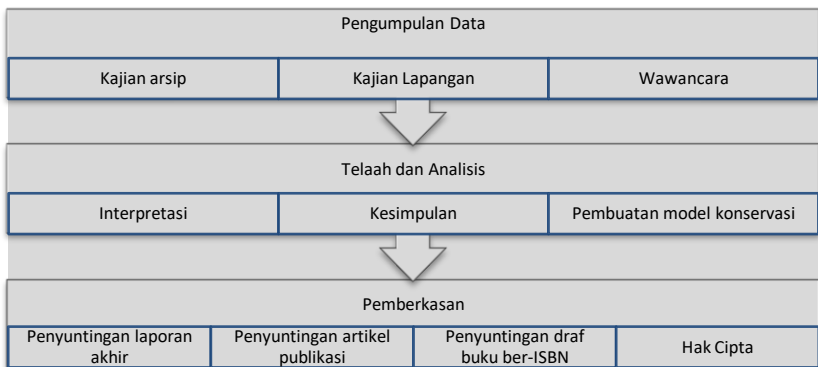
Adapun target kajian, di luar output yang dipersyaratkan pada penelitian ini adalah upaya konservasi mencakup

pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan pusaka budaya sebagaimana diamanatkan oleh ketiga regulasi pemerintah (UU no. 11 Tahun 2010; UU no. 5 Tahun 2017, dan Permendikbud no. 45 Tahun 2018). Berdasar pada ketentuan ini, alur berfikir penelitian dirumuskan sebagai berikut pada Gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Alur berfikir penelitian

Berdasar pada uraian di atas, adapun peta jalan (*roadmap*) kajian ini diringkas sebagai berikut pada Gambar 6 di bawah ini:



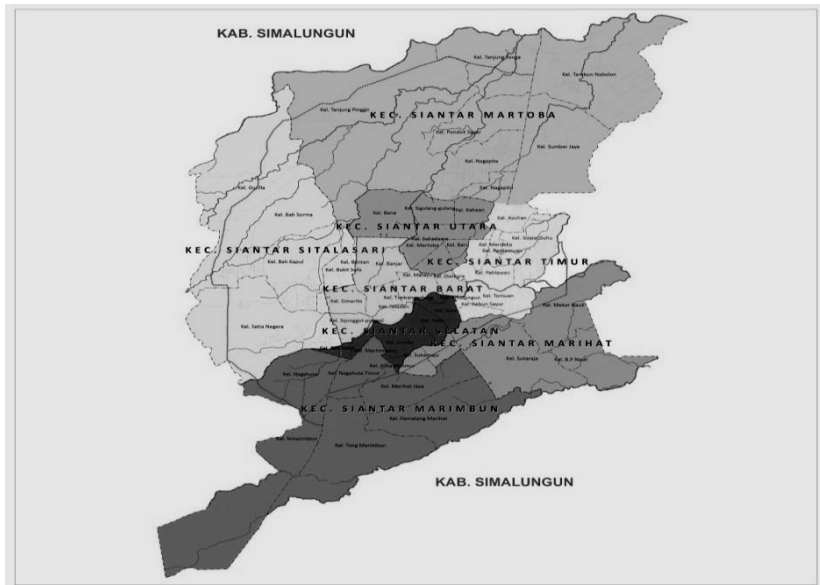
Gambar 6. Roadmap Penelitian

BAB II

GAMBARAN UMUM

KOTA PAMATANGSIANTAR

Siantar atau yang kini lebih dikenal dengan nama Pematangsiantar adalah wilayah administratif setingkat kota (*city*) dipimpin seorang walikota (*Burgermeister* atau *Mayor*). Pematangsiantar merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Kota Medan yaitu ibukota Provinsi Sumatera Utara. Pematangsiantar terletak di titik transit menuju pantai timur Sumatra Utara maupun pantai Barat Sumatra dan kota ini terletak sejauh 125 Km dari Medan.



Gambar 7. Peta Kota Pematangsiantar
Skala 1: 30.000

Secara astronomis Pematangsiantar terletak pada $2^{\circ} 53' 20''$ - $3^{\circ} 01' 00''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 1' 00''$ - $99^{\circ} 6' 35''$ Bujur Timur. Suhu rata-rata pada tahun 2016 berada diantara rata-rata antara $30,3^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum rata-rata $21,1^{\circ}\text{C}$. Sepanjang tahun 2016, kelembaban udara mencapai rata-rata 84 persen. Kelembaban tertinggi berada pada bulan Oktober dan Desember yang mencapai 88 persen. Curah hujan rata-rata mencapai 229 mm dengan curah hujan tertinggi berada pada bulan April yang mencapai 341 mm. Membandingkan luas wilayah berdasarkan kecamatan maka Kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas $22,723 \text{ Km}^2$ merupakan kecamatan terluas di Kota Pematangsiantar. Luas kecamatan ini sebanding dengan 28,41 persen dari total luas Kota Pematangsiantar.

Kota Pematangsiantar berada persis ditengah-tengah Kabupaten Simalungun. Sebagaimana diketahui bahwa, Siantar adalah salah satu wilayah subkultur dari 7 (tujuh) subkultur di Simalungun yakni: Silimahuta, Purba, Dolog Silau, Raya, Panei, Siantar dan Tanoh Jawa. Kota Pematangsiantar terletak pada ketinggian 400-500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan total luas daratan sekitar $79,971 \text{ Km}^2$. Berdasar pada ketinggian itu, kondisi tanah di Pematangsiantar sangat cocok dengan perkebunan seperti teh, kopi, sisal, karet dan kelapa sawit. Komoditas ini pula yang dikembangkan sejumlah pengusaha mancanegara yang menginvestasikan modalnya di Pematangsiantar terutama sejak tahun 1907.



Gambar 8. Jalan Sutomo (*Wilhelminastraat*) Siantar, 1924
Sumber: kitlv.nl

Kota Pematangsiantar terletak di dekat garis khatulistiwa. Keletakan ini berdampak pada kondisi daerah yang tropis. Wilayah Kota Pematangsiantar tergolong datar dan beriklim sedang. Keadaan tanah cenderung datar sangat cocok bagi pemukiman penduduk. Karena alasan ini pemerintah kolonial menata (*municipal code*) 'Kampung Siantar' menjadi sebuah kotamadya (*gemeente*).

Di kota Pematangsiantar mengalir sungai disebut dengan Sungai (*Bah*) Bolon. Sungai ini mengalir dari selatan hingga ke utara dan bermuara ke Selat Malaka. Sungai ini membelah inti kota Pematangsiantar menjadi dua bagian di era kolonial Belanda. Salah satu bagian, yakni ke arah timur Bah Bolon adalah pemukiman pribumi (*inlander*) sedangkan ke arah Barat sungai menjadi wilayah *gemeente* sejak tahun 1917.

Kampung Pamatang yang sering disebut dengan *Pulau Holang* (*tanoh antara*), adalah lokasi penguasa lokal yang

disebut dengan Kerajaan Siantar dari klan (marga) Damanik. Kerajaan ini adalah salah satu dari 7 subkultur Kerajaan Simalungun. Kampung Pamatang percis berada di samping Bah Bolon. Pemilihan kampung awal yang menjadi embrio Pematangsiantar ini didasarkan ketersediaan air sebagaimana lazimnya dalam sejarah. Hulu Bah Bolon berada di hutan yang terletak di sekitar Nagahuta. Dari hulu Bah Bolon ini, pada tahun 1918 pemerintah Belanda membangun perusahaan air minum (*Ayer Bersih Maatschappij*) yang saat ini dikenal dengan PDAM Tirtauli.



Gambar 9. Jalan Merdeka Siantar, 1952

Sumber: Tropen Museum Institut

Pada era kolonial Belanda, berdasarkan pemukiman masyarakatnya, maka Siantar dapat dibagi empat kategori. *Pertama* adalah pemukiman Eropa atau sering disebut *Weltreveden* atau *Europeanwijk*. Pemukiman ini terletak di

sekitar jalan Simbolon. Kawasan ini merupakan kawasan elite dimana walikota dan pejabat-pejabat pemerintah maupun Tuan Kebun (*Planters*) tinggal di kawasan ini. Pemukiman ini berada di dalam *Gemeente* Siantar. Kategori kedua ialah *Chineswijk* atau pemukiman orang Tionghoa. Lokasi pemukiman ini berada di sekitar inti kota. Pada umumnya, mereka ini adalah *coelie contract* yang berhasil memantapkan hidupnya dan beralih menjadi pedagang di Siantar. Pemukiman mereka adalah seperti di Jalan *Wilheminastraat* (jalan Sutomo) dan Jalan Merdeka dan sekitarnya.

Selanjutnya, kategori pemukiman *ketiga* adalah *Kerajaanwijk* yaitu pemukiman bagi keluarga Kerajaan Siantar dan bangsawan ataupun Abdi Dalem (*partongah*) kerajaan Siantar. Mereka ini adalah pemerintah lokal (swapraja) atau *zelfbestuur* di Siantar yakni klan Damanik. Pemukiman mereka terletak di Pulau Holang yang sering disebut Kampung Pamatang di Siantar. Pemukiman ini terletak di dalam *Gemeente* Siantar. Sedangkan pemukiman *keempat* adalah *inlanderswijk* atau pemukiman pribumi. Pemukiman ini terletak diluar *gemeente* Siantar dan secara umum menjadi pemukiman *imigrant population* atau populasi pendatang.

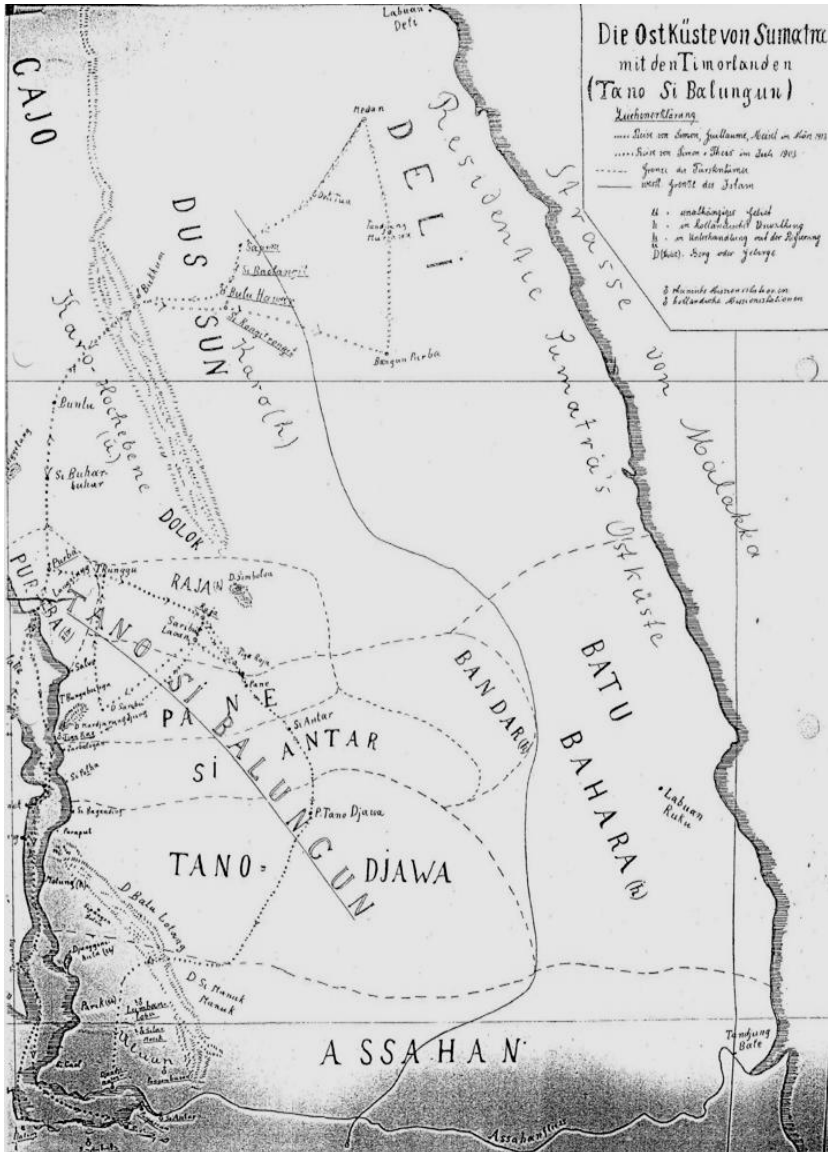
Pada umumnya, pemukiman seperti ini menyebar dan mengelilingi *Gemeente* Siantar seperti Kampung Kristen (pendatang Toba), Tomuan (pendatang Karo dan India), Martoba (Pendatang Toba), Nagahuta (Simalungun), Timbanggalung (pendatang Mandailing, Arab dan Minangkabau), Bah Korah (pendatang Jawa) dan lain-lain. Penting diketahui bahwa, pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kampung-kampung etnik ini digabungkan dengan *Gemeente* Siantar. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1956 sejalan dengan penataan daerah

administrasi di Sumatera Utara, maka *Gemeente* diganti dengan nama '*Kotamadya*' dan Siantar ditetapkan sebagai *Daerah Tingkat-II Kotamadya Pematangsiantar*. Sejalan dengan penambahan kampung-kampung etnik menjadi wilayah *Kotamadya Pematangsiantar*, maka luas wilayah kota inipun bertambah sangat luas, sekitar 9 kali lebih luas dari era kolonial Belanda.

Demikian halnya populasi kota ini bertambah signifikan sejalan dengan potensi ekonomi yang dikandung di dalamnya. Populasi kota ini bertambah pesat terutama sejak tahun 1945 sehubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Rumah-rumah *planters* dan orang Belanda yang disebut tidak bertuan sejak penyerahannya kepada Jepang, diambil alih elite, pendatang, militer dan masyarakat serta menjadi pemukim tetap di Siantar.

Untuk dapat mencapai Kota Pematangsiantar, dapat dilakukan melalui transportasi darat yakni Bus dan Kereta Api. Transportasi udara dapat ditempuh dari pantai timur yakni *Kuala Namu International Airport (KNIA)* ataupun dari bagian tengah Sumatra melalui *Silangit International Airport*. Kereta Api dari Kota Pematangsiantar dilayani dari Medan-Tinggi Tinggi atau sebaliknya. Sedangkan angkutan Bus datang dari berbagai penjuru seperti Kabanjahe-Pamatangraya-Siantar, atau Tarutung-Parapat-Siantar, atau Tanjungbalai-Pardagangan-Siantar, ataupun dari Medan-Tebingtinggi-Siantar. Posisi demikian ini berdampak pada kehadiran Kota Pematangsiantar sebagai '*Kota Transit*' dengan berbagai tujuan. Kota ini pasti di lewati masyarakat dari pantai timur Sumatera Utara yang hendak berlibur ke Danau Toba.

Pada umumnya, transportasi dalam kota dilayani oleh Angkutan Kota (Angkot), Becak Motor, Transport Daring seperti *Gojek*, *Grab*, dan angkutan lainnya. Perhentian *Angkutan Kota*, *Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)* maupun *Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)* berada di Terminal Parluasan maupun Tanjung Pinggir. Terminal ini menjadi titik transit bagi hampir seluruh angkutan dalam dan luar kota. Kemudian, perhentian sementara (*halte*) angkutan dalam kota berada di pusat pasar (*central market*) yakni Pasar Horas. Beberapa merk bus yang melayani berbagai rute di dalam dan keluar Sumatera Utara yang berasal dari Pematangsiantar ialah seperti *Indah Transport (Intra)*, *Sentosa Transport (Sentra)*, dan *Sejahtera*. Beberapa *taxi* yang berasal dari Pematangsiantar dan melayani rute di Sumatera Utara adalah seperti *Paradep Taxi*, *Nice Taxi*, *Raya Taxi*, dan lain sebagainya.



Gambar 10. 7 (tujuh) Subkultur wilayah Simalungun, 1900

Sumber: BRMG, 1900



Gambar 11. Bah Bolon di Siantar, 1915
Sumber: kitlv.nl

BAB III

EMBRIO KOTA PEMATANGSIANTAR

A. Asal usul nama Siantar

Lebih kurang 50 tahun sebelum kedatangan Belanda di Siantar tahun 1885, telah lebih dulu seorang Inggris menjelajahi wilayah ini. Tersebut tahun 1823, seorang Inggris bernama John Anderson menjelajahi pantai timur Sumatera atas perintah Gubernur Pulau Penang bernama W.H. Philips. Penjelajahan dalam rangka *political of economy* ke pesisir timur Sumatera itu terbit dalam memoar perjalanannya: *'Mission to the East Coast of Sumatera'*. Pada bukunya itu, Anderson melaporkan tentang sebuah wilayah yang berdampingan dengan Bedagei dan Asahan yang bernama *'Seantar'* atau tepatnya *'Siantar'*. Wilayah *Siantar* adalah salah satu dari wilayah *Principal State* (Negara Induk) Simalungun.

Catatan Anderson menjadi petunjuk bahwa daerah dimaksud adalah *'Siantar'*. Dengan demikian, dipastikan bahwa, *Siantar* adalah *homeland* atau ulayat sukubangsa (*ethnic group*) Simalungun. Menurut catatan Anderson, *Principal State* Simalungun memiliki kekuasaan yang besar dan mutlak (*most powerful principian state*). Salah satu dari *principal state* dimaksud adalah Kerajaan Siantar.

Sepanjang penyelidikan kepustakaan, catatan Anderson ini menjadi referensi pertama yang menulis dan mencatat nama wilayah bernama *Siantar*. Wilayah *Siantar* sebagaimana dikunjungi Anderson pada tahun 1823 itu terletak berdampingan dengan *Padang* (Tebingtinggi) dan Asahan. Anderson (1971) mencatat sebagai berikut:

Semalongan [Simalungun] the principal states are Seantar [*Siantar*], Silow [*Silou*], Tanah Jawa [*Tanoh Jawa*], Purba, Rajah [*Raya*], Nagasaribu, Muntopanei [*Panei*], Pagar Tengah [*Pagar Tongah*], Ria Mahriat [*Marihat*], Bundar [*Bandar*], Krian Usang [*kemungkinan Raya Usang*]...All independent states under separate rajahs, many of them speaking different dialects and of various habits and manners. All these states are inland of Delli, Sirdang, Bedagei, and Assahan. The country throughout is represented to very populous.

Bila merujuk catatan Anderson, ditemukan bahwa wilayah *Siantar* masih merupakan hutan belantara. Aneka jenis kayu tumbuh di hutan-hutan *Siantar* dengan berdiameter lebih dari 1 meter dengan tinggi mencapai 40 meter. Aneka hewan-pun terdapat di wilayah ini. Salah satunya adalah burung Enggang (*Onggang*). Nama burung ini masuk menjadi salah satu tarian orang Simalungun yang disebut dengan *Tortor Toping Huda-huda* (Tari Topeng Kuda-kuda). Jenis tarian ini adalah hiburan pada saat meninggal tetapi dipercaya memiliki kekuatan magis. Burung Enggang adalah kendaraan pembawa arwah (roh) orang meninggal ke nirwana sebagaimana tercatat dalam tradisi Hindu (Holt, 1969).

Wilayah *Siantar* pada tahun 1823 dilaporkan Anderson (1971) telah menjual getah lilin (*wax*), gading (*ivory*), kapas (*cotton*), tembakau (*tobacco*), kuda (*horse*) maupun budak (*slaves*). Anderson (1971) mencatat sebagai berikut:

there are principal Batta states (the rajahs of which are the most powerful), with which there is a communication from Delli. Seantar, the first, is in the interior of Padang; Tanah Jawa, five days journey from Delli; Sillow in the interior of

Bedagei, three days journey from the borders of the territory of Delli. From Seantar comes wax, ivory, cotton, pulse, tobacco, slaves and horses. From Tanah Jawa and Sillow comes gold, wax, ivory, cotton, tobacco and slaves.

Adapun penduduk Siantar sebagaimana di catat Anderson mencapai 2.000 jiwa (*inhabitant*). Tentulah angka ini merupakan estimasi Anderson semata berdasar informasi yang diterimanya. Hal ini karena pada saat itu, pencacahan penduduk belum pernah dilakukan. Penduduk Siantar disebut Anderson berinteraksi dengan masyarakat lainnya seperti di Bedagei, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Kampung (Tanjung) Balei dan Kisaran. Komoditas perdagangan mereka ialah hasil hutan seperti rotan, kapas, kayu, bambu, maupun hasil kerajinan tangan berupa kriya tradisional (*hiou*) maupun jenis anyaman lainnya. Disamping itu, terdapat hasil pertanian seperti padi maupun hasil tangkapan seperti ikan, ayam, kuda, dan lain-lain yang berhasil di demostikasi.

Masyarakat Simalungun di Siantar menjadi penghubung (*broker*) perdagangan yang menghubungkan masyarakat *Tubba* (Toba) di sekitar Danau Toba dengan para pedagang asing (*foreigner trader*) di pesisir timur yakni Selat Malaka. Masyarakat dari wilayah ini berdagang dan membentuk pasar-pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam bahasa Simalungun, tempat berkumpulnya pembeli dan penjual itu disebut dengan '*Bandar*'. Orang Melayu menyebutnya '*Kota*' sedangkan orang Karo menyebutnya '*Pertumbukan*' (Perret, 2010).

Istilah *Bandar* pada bahasa Simalungun adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli pada setiap hari. Karena itu, *Bandar* berbeda dengan '*tiga*' yang cenderung bersifat

musiman dan biasanya mingguan. Tiga *'Bandar'* di Simalungun yang terkenal sebelum era kedatangan Anderson tahun 1823 maupun kedatangan Belanda tahun 1885 ialah Pamatang Bandar, Bandar Pulo yang berdekatan dengan Kampung (Tanjung) Balei, dan Bandar Pardagangan. Di tempat-tempat ini, masyarakat selalu ramai untuk membeli dan menjual barang, barter dan berinteraksi.



Gambar 12. Pasar di sekitar Bah Bolon, Siantar 1925

Sumber: kitlv.nl

Istilah *'siantar'* telah dipergunakan sebagai kata penunjuk lokasi (daerah) jauh sebelum era kolonial Belanda tahun 1885. Istilah *'siantar'* berasal dari bahasa Simalungun yang bermakna *'terletak diantara'*, yaitu dua perairan luas yakni *'laut daur'* (Danau Toba) di sebelah selatan dan Selat Malaka di sebelah timur. Sebagaimana diketahui, wilayah Siantar berada di tengah-tengah Desa Induk (*partuanon*) Kerajaan Siantar

yaitu Sipolha dan Sidamanik di arah selatan, MARIHAT di sebelah timur, Nagahuta di sebelah barat dan Dolog Marlawan, Bandar, Kota Padang dan Tanjungkasau di sebelah utara.

Dalam catatan Anderson tahun 1823 nama Siantar dicatat dengan '*Seantar*'. Selanjutnya, dalam catatan kolonial, ejaan Siantar sering ditulis dengan '*Si Antar*'. Sesungguhnya penulisan ini adalah salah. Konsep '*Si*' bukanlah kata depan, dan konsep '*Antar*' bukanlah nomina atau adjektiva. Kedua kata itu harus di tulis rangkai (menyatu) yaitu '*Siantar*'.

Dalam beberapa tulisan, nama *Siantar* sering ditulis dengan nama '*Siantar Matio*'. Penulisan ini sesungguhnya salah kaprah. Menurut cerita rakyat (*folklore*) Simalungun nama yang benar adalah '*Siantar na Lihou*' atau 'Siantar nan Indah'. Penyebutan ini merujuk pada keadaan wilayah Siantar yang relatif datar, hutan ditumbuhi aneka jenis kayu nan rindang, diapit dua perairan besar (Danau Toba dan Selat Malaka), terdapat kicauan aneka jenis burung, terdapat padang savana, dan dialiri sungai (*Bah*) Bolon.

Berangkat dari uraian ini, jelas sekali bahwa nama *Siantar* berasal dari bahasa Simalungun yang berarti '*berada atau terletak diantara*'. Nama sebagaimana dicatat Anderson yakni '*Seantar*', ataupun sumber kolonial yang menulis '*Si Antar*' adalah merupakan kelaziman yang sering terjadi oleh seorang pengamat yang bukan menulis dirinya sendiri. Demikian pula bahwa penyebutan '*Siantar Matio*' tidaklah tepat melainkan '*Siantar na Lihou*' (Siantar nan Indah).

Istilah ini merujuk pada keadaan geografis Siantar yang berada di wilayah datar, beriklim sejuk, terdapat animalia dan flora, serta dibelah oleh sungai Bah Bolon dan tepat berada diantara dua perairan besar yakni Danau Toba (*Laut Daur*) di

sebelah selatan dan Selat Malaka di sebelah timur. Jika merujuk pada pengertian ini, maka tidak mengherankan apabila posisi geografis Kota Pematangsiantar dewasa ini menjadi daerah transit yang berasal dari pantai barat Sumatera ke arah pantai timur maupun dari pantai timur ke arah pantai barat.

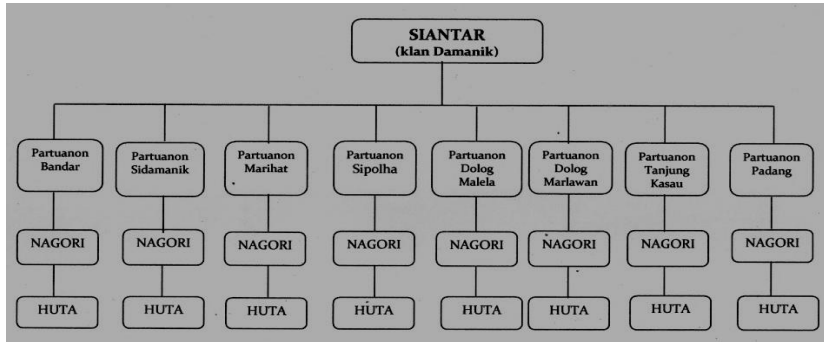
Salah satu karakter Pematangsiantar dewasa ini adalah posisinya yang berada di gerbang (*gate*) menuju *Tuktuk Sipiak* (Parapat) yang berdampingan dengan Danau Toba. Pada masa sekarang ini, Kepemimpinan Nasional melalui Presiden Joko Widodo sedang menggiatkan pertumbuhan Danau Toba menjadi destinasi wisata unggulan bertaraf nasional di Indonesia.

B. Kerajaan Siantar

Sebelum tahun 1885, adapun wilayah Siantar meliputi teritorial mulai dari perbatasan Danau Toba di selatan hingga Selat Malaka. Teritori ini dikenal dengan nama 'Kerajaan Siantar'. Pemimpin tertinggi yaitu Raja Siantar tinggal di *Rumah Bolon* (istana) yang terletak di *Kampung Holang*, (sekarang disebut dengan Kampung Pamatang) yang terletak di sisi kiri *Bah* (Sungai) Bolon yang membelah Kota Siantar. Kerajaan ini terdiri dari 8 (delapan) wilayah *partuanon* (Desa Induk) yakni: i) Bandar, ii) Sidamanik, iii) Marihat, iv) Sipolha, v) Dolog Malela, vi) Dolog Marlawan, vii) Tanjung Kasau dan viii) Padang (Tebing Tinggi).

Tiga wilayah disebut terakhir: *Padang* (Tebing Tinggi), Dolog Marlawan dan Tanjung Kasau dikeluarkan Belanda dari teritorial Siantar. Teritorial *Padang* (Tebing Tinggi) dibuka pertama kali oleh Bandar Kajum Damanik dilepaskan dari Siantar tahun 1880 dimasukkan ke wilayah Deli Serdang dan

kini menjadi Kota Tebing Tinggi. Sedangkan Dolog Marlawan dikeluarkan tahun 1883 dan digabung ke Deli Serdang dan kini menjadi Serdang Bedagei, dan Tanjung Kasau dikeluarkan tahun 1885 dan dilebur ke Asahan dan kini menjadi wilayah Batubara.



Gambar 13. Wilayah Kerajaan Siantar hingga tahun 1885
 Sumber: Damanik, 2017

Alasan pengerdilan wilayah teritorial Siantar ini disamping karena alasan agama Islam yang dominan dianut masyarakat di ketiga wilayah itu, juga sebagai strategi mengerdilkan kekuasaan dan wilayah Siantar. Lagi pula, seperti disebut Kroesen (1881) bahwa bilamana ketiga wilayah itu dikeluarkan dari Siantar dan digabung ke Melayu maka lebih mudah mendapatkan tanahnya guna ekspansi perkebunan.

Tindakan pencaplokan ketiga wilayah itu dilakukan sendiri oleh Belanda tanpa mendapat persetujuan Mapir Damanik sebagai penguasa lokal di Siantar. Walaupun mendapat protes dari pemimpin Siantar itu, tetapi tetap saja tidak berhasil mengembalikan ketiga wilayah dimaksud dalam genggamannya Kerajaan Siantar. Protes Mapir Damanik

terhadap pencaplokan itu dilakukan Mapir Damanik dengan menyerang pos Belanda di Batubara tahun 1886.

Pasca wafatnya Mapir Damanik tahun 1887, maka seharusnya tahta Siantar dipegang Sang Naualuh Damanik. Namun, karena belum akil baliq, maka sementara waktu tahta itu dipegang Itam Damanik dari wilayah Bah Bolag, yakni *pakcik* Sang Naualuh Damanik. Kemudian, pada tahun 1889, Sang Naualuh Damanik dinobatkan menjadi pemimpin (raja) di Siantar. Ia adalah garis keturunan langsung (putra mahkota) atau *parana* yang berhak meneruskan tahta ayahnya.

Di Siantar, *partuanon* Bandar, Sidamanik, Sipolha dan Marihat memiliki status istimewa jika dibandingkan daerah lainnya. Keistimewaan itu tampak pada kedudukannya sebagai pemangku raja (*dewan harajaan*) di Siantar bilamana raja meninggal dunia, atau karena putra mahkota (*parana*) belum akil baliq (dewasa) atau dewasa secara hukum ataupun karena kondisi lainnya.

Desa Induk (*partuanon*) Kerajaan Siantar seperti Sipolha, Sidamanik, Marihat, Siantar, Dolog Malela (Gunung Malela), Tanjung Kasau, Sarbelawan, Dolog Marlawan hingga Padang (Tebing Tinggi) di kepalai seorang Raja Kecil (*Tuan*) yang masih memiliki kekerabatan dengan Raja Siantar. Seluruh wilayah ini menjadi satu kesatuan dengan Kerajaan Siantar dengan ibukota (*pamatang*) yakni di Pulau Holang, Kampung Pamatang terletak di inti kota Pematangsiantar dewasa ini.



Gambar 14. Foto Sang Naualuh Damanik, 1913
'Pioner Toleransi dan Pengentas dari Siantar'
Sumber: Damanik, 2017

Tersebut raja-raja Siantar pasca Sang Naualuh Damanik adalah Riahata Damanik dan Riah Kadim Damanik (keduanya dari *Partuanon* Marihat dan Sidamanik) yang memerintah tahun 1911-1916, Waldemar Damanik yakni anak Sang Naualuh Damanik yang bukan putra mahkota (1916-1923) dan Sawadim Damanik dari *Partuanon* Bandar (1924-1946). Seorang *pangulu balei* (sekretaris) raja yang terkenal di Siantar adalah Djaudin Saragih, yakni ayah dari Djasamen Saragih, seorang dokter (sekaligus dokter pertama orang Simalungun) yang tewas dibunuh tahun 1946 sewaktu revolusi yang menghantam bangsawan di Sumatera Timur. Nama dokter ini diabadikan sebagai nama rumah sakit Kota (*Gemeente Krankenhaus*) di Siantar yang disebut dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Siantar.

Pada era kolonial Belanda, penguasa lokal yakni Kerajaan Siantar klan Damanik disebut dengan *Zelfbestuur* (pemerintahan swapraja). *Zelfbestuur* memiliki kawula (penduduk) sendiri yang umumnya adalah *inlanders* (pribumi) sedangkan kawula (penduduk) pemerintahan kolonial pada umumnya adalah orang Eropa dan India dan Tionghoa. Raja Siantar yang terkenal gigih melawan Belanda adalah Sangma Damanik dengan gelar *Sang Naualuh Damanik*. Sang Naualuh berarti *Delapan Keutamaan* yang menjadi karakter dan kepribadiannya. Ia menolak berdamai, tunduk dan menjadi bawahan Belanda. Berbagai tawaran perdamaian dibuat Belanda, tetapi tidak mampu membujuk Sang Naualuh Damanik mengakui kedaulatan Belanda. Sebanyak 17 fitnah sengaja diperbuat Belanda untuk melemahkan Sang Naualuh Damanik.

Akhirnya Sang Naualuh Damanik di tangkap Belanda tahun 1904. Ia dipenjarakan di penjara kolonial di Pantoan dan

Batubara. Pada tahun 1906, pemenjarannya dipindahkan ke penjara Sukamulya Medan. Pada bulan September 1906, Sang Nauluh Damanik di hukum (vonis) buang (*internir*) ke Bengkalis, Riau. Hukum pembuangan (pengasingan) itu dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Kehakiman Belanda. Selama 7 tahun di pembuangan Bengkalis, Sang Nauluh Damanik meninggal dunia sebagai wira bangsa pada tahun 1913. Jasadnya di kuburkan di lokasi pengasingannya di Dusun Senggoro, Kelurahan Bantan, Bengkalis, Kepulauan Riau.

Selama menjadi raja di Siantar sejak 1889-1904, Sang Nauluh Damanik menjadi pioner pembangunan *Nagori* Siantar. Ia membangun pekan (*tiga*) yang tidak jauh dari istana Kerajaan Siantar yang kini disebut dengan Pasar Horas. Ia juga merintis pembangunan jalan setapak dari Pematang hingga Pardagangan yang kini disebut dengan Jalan Sang Nauluh Damanik. Ia juga memberikan izin lokasi pembangunan Gereja RMG (kini HKBP jalan Gereja) di Pematangsiantar. Ia juga memberikan izin lokasi pembangunan Mesjid di jalan Kartini yang sekarang disebut Mesjid Agung Pematangsiantar.

Selain itu, ia juga membangun *sopou bolon* sebagai sanggar seni dan tari di jalan Simbolon yang kini menjadi lokasi Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar. Ia juga mengizinkan pendirian rumah potong hewan di jalan Nias, Kampung Kristen di Siantar Selatan. Kiranya, walaupun singkat memerintah di Siantar, Sang Nauluh Damanik sangat tepat diberi apresiasi sebagai '*Sosok Pembaharu*' sekaligus '*Tokoh Toleransi*' di Pematangsiantar. Karena kedua kepeloporan yang dilakukan Sang Nauluh Damanik ini, maka kiranya

kepada sangat tepat dikatakan sebagai '*Sang Pengentas dari Siantar*'.



Gambar 15. Lukisan Sang Naualuh Damanik
Sumber: Koleksi Mr. Djariaman Damanik

Pada masa-masa pembuangan di Bengkulu antara tahun 1907-1913, Sang Nauluh Damanik lebih mendedikasikan diri pada Tuhannya, yakni Allah SWT. Agama Islam yang diterimanya pada tahun 1902 menjelma pada Delapan Keutamaan (*Sang Nauluh*) yang menjadi gelar kebangsawanannya. Di Bengkulu, Sang Nauluh menjadi mubaligh (penyiar) agama Islam. Sehari-hari ia hanya dapat berdakwah. Ia sangat disegani sebagai 'Raja Batak' yang berwibawa. Di Bengkulu, ia memprakarsai sebuah pesantren tradisional yang kini menjadi sebuah sekolah (MTA) dan juga membangun sebuah rumah ibadah (Mesjid) di Jalan Senggoro, Bengkulu.

Pasca pemakjulan, penangkapan dan pemakjulan Sang Nauluh Damanik di Siantar, maka seluruh wilayah dari 7 Kerajaan Simalungun menjadi takluk dan tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Sebagai pernyataan tunduk, maka pada tahun 1907 sebanyak 7 (tujuh) kerajaan Simalungun beserta 29 Desa Induk (*partuanon*) menandatangani Plakat Pendek atau *Korte Verklaring* (Perjanjian Singkat). Penandatanganan *Korte Verklaring* tahun 1907 itu menjadi awal kolonialisme di Siantar dan Simalungun.

Pada waktu itu, Siantar masih menjadi wilayah yang tergabung ke *Onderafdeling Simalungun en Karolanden* dengan ibukota (pamatang) di Saribudolog yang dibentuk pada tahun 1907. Kemudian, pada tahun 1912, ibukota *Onderafdeling Simalungun en Karolanden* dipindahkan dari Saribudolog ke Pematangsiantar. Kemudian, sejak tahun 1917, Pematangsiantar dikeluarkan dari *Onderafdeling Simalungun en Karolanden* dan dibentuk menjadi wilayah administratif sendiri yang disebut dengan *gemeente* Siantar. Baik

Onderafdeling Simalungun en Karolanden maupun *Gemeente Siantar* menjadi wilayah Keresidenan Pantai Timur Sumatera (*residentie Ooskust van Sumatra*) yang dibentuk tahun 1887 dimana Medan menjadi ibukotanya.



Gambar 16. De Huis van Radja Siantar, 1916

Sumber: Tropen museum institut

Dipastikan bahwa, Sang Nauluh Damanik adalah raja Simalungun yang terakhir melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pasca penangkapan dan pembuangannya tahun 1907, tidak satupun dari 7 (tujuh) raja Simalungun yang berkuasa melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda. Raja-raja Simalungun pasca tahun 1907 cenderung menjadi *'anak emas'* Belanda. Mereka menjadi kaki tangan Belanda untuk mengamankan gejolak kawula raja, mengadili dan menahannya.

Raja-raja Simalungun pasca 1907 cenderung menggadaikan tanah (konsesi) berupa *erpacht* (hak pakai) kepada Belanda dan pengusaha mancanegara lainnya. Mereka mendapatkan sewa tanah (*land rente*) dari penggadaian tanah itu. Para raja ini, bukan saja menjadi penguasa *zelfbestuur* (pemerintah swapraja) tetapi sekaligus sebagai Pamongpraja Belanda. Mereka mendapatkan gaji, pakaian dinas, mobil dan hak-hak istimewa memungut pajak dari kawulanya masing-masing. Kondisi seperti ini sangat terasa seperti di Siantar pasca Sang Nauluh Damanik, di Panei, Raya, Tanoh Djawa dan Dolog Silau. Di wilayah-wilayah ini, sebagian besar tanah-tanah kawula digadaikan raja kepada pengusaha perkebunan asing.



Gambar 17. Pasanggaerahan Raja Siantar, 2020

Sumber: Dok. Penelitian 2020

Pada era sebelum kedatangan Belanda, istana (*palace*) atau dalam bahasa Simalungun disebut *Rumah Bolon* kerajaan

Siantar berdiri megah di Kampung Pamatang, Pulau Holang, Siantar. Rumah Bolon itu berbentuk persegi panjang berukuran 15 x 30 meter. Terdapat tiang-tiang utama sebagai sokoguru bangunan berbentuk *tiang jonjong* (penyangga berdiri) terutama bangunan bagian belakang. Di bagian depan, terdapat bangunan berupa teras (*surambi*) yang ditopang oleh *tiang galang* (penyangga datar). Dinding istana ini terbuat dari tepas (bilah bambu yang dianyam) serta beratapkan ijuk. Bentuk atapnya menyerupai pelana (melengkung) dan dibagian puncak sebelah belakang dan muka terdapat replika kepala kerbau sebagai pembeda dengan rumah masyarakat.



Gambar 18. Istana (Rumahbolon) Kerajaan Siantar, 1917

Sumber: Kitlv.nl.

Istana ini dikabarkan terbakar pada tahun 1919 yang menghancurkan keseluruhan bangunan. Sebagai bangunan pengganti istana, maka pemerintah kolonial di Siantar membangun Pesanggerahan yang terbuat dari cor beton. Di Pasanggerahan inilah raja-raja Siantar pasca pembuangan Sang Nauluh Damanik menerima tamu atau menerima kunjungan kenegaraan dari Belanda. Sedangkan rumah tinggal raja terletak tidak jauh dari Pasanggerahan ini yang kini berada dekat pada sebuah pohon Beringin. Kedua bangunan tersebut masih berdiri di Pulau Holang, Kampung Pamatang di Siantar.



Gambar 19. Istana (Rumahbolon) Kerajaan Siantar, 1917

Sumber: Kitlv.nl.

Tampak pada foto paling atas adalah *de Huis van Radja Siantar* atau disebut Rumah Kediaman Raja Siantar tahun 1916. Foto dibawahnya adalah Pesanggerahan Kerajaan Siantar sejak 1920. Terletak di pulau Holang atau sering disebut Kampung Pamatang, di Siantar. Kampung ini merupakan embrio Kota Pematangsiantar. Dari Pamatang inilah, Raja Siantar mengendalikan pemerintahan lokalnya serta mengontrol Desa Induk (*Partuanon*) mulai dari Sipolha, Sidamanik, Marihat, Dolog Marlawan, Padang, Bandar, hingga Tanjung Kasau.



Gambar 20. Rumah Raja Siantar
Sumber: kitlv.nl

Foto bersumber dari *Tropen Museum Institut* ini memperlihatkan bentuk rumah bercirikan arsitektur Simalungun menyerupai pelana. Terdiri dari dua bagian yakni bagian belakang (ruang utama) dan bagian depan berupa serambi atau teras. Tampak bahwa jalan masih setapak, tanpa aspal dan dibahu kiri dan kananya masih ditumbuhi rumput. Tampak pula sebuah pohon Beringin yang hingga kini masih

tumbuh di sekitar lokasi istana ini. Rumah raja atau *Rumah Bolon* ini berdiri dengan kombinasi tiang berdiri (*tiang jongjong*) dan tiang galang (*tiang tidur*) sehingga menyerupai rumah panggung. Atapnya terbuat dari ijuk, berdinding tebal dan bilah kayu. Bagian serambi atau teras ditopang oleh tiang galang sedangkan bagian inti rumah ditopang tiang berdiri.

Ukuran *Rumah Bolon* mencapai 15 x 30 meter berbentuk persegi panjang. *Rumah Bolon* Siantar ini terbakar tahun 1919 yang kemudian diganti dengan rumah cor beton yang hingga kini masih berdiri megah di Kampung Pamatang, Kota Pematangsiantar. Disekitar Pasanggerahan Raja Siantar sekarang ini di Pamatang, terdapat rumah raja yang terletak sekitar 30 meter. Rumah ini berdekatan dengan pohon beringin. Di rumah inilah raja tinggal sedangkan di Pasanggerahan adalah tempat menerima tamu-tamu kerajaan seperti 'Toean Keboen' (*planters*) maupun pemerintah kolonial.



Gambar 21. Sarmahata Damanik
Sumber: Simalungun ethnic

Foto di atas adalah Sarmahata Damanik, putra Sang Naualuh Damanik yang lahir di Bengkalis, Kepulauan Riau pada saat menjalani pembuangan (*internir*). Ia lahir tahun 1909 dan meninggal tahun 1976 serta dimakamkan di Tanjung Balai. Pasca kembalinya dari Bengkalis, Sarmahata Damanik setelah dewasa tidak pernah diresmikan (*patampe i sihilap*) menjadi raja di Siantar. Justru, Belanda senantiasa mengangkat Pemangku Raja di Siantar. Alasannya ialah adanya kekhawatiran balas dendam apabila keturunan langsung Sang Naualuh Damanik diangkat sebagai raja di Siantar. Ibu Sarmahata Damanik yakni istri Sang Naualuh Damanik meninggal dan dimakamkan di Pemakaman Islam Jalan Panei Pematangsiantar.

Keturunan dari Sarmahata Damanik adalah Syahalam Damanik yang wafat tahun 2010 di Jakarta. Sedangkan keturunan Syahalam Damanik adalah Difi Sang Nuan Damanik yang tinggal di Jakarta. Difi Sang Nuan Damanik menjadi '*Pemegang Tahta Adat Kerajaan Siantar*' yakni nama lain sebagai sebutan Raja Siantar di era pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Berturut-turut Pemangku Raja Siantar pasca pembuangan Sang Naualuh Damanik adalah sebagai berikut: i) Riahata Damanik dan Riahkadim Damanik (1911-1916) yang berasal dari Desa Induk (*partuanon*) Marihat dan Sidamanik, ii) Riahkadim Waldemar Damanik (1916-1923) yakni anak Sang Naualuh Damanik yang lahir bukan dari putra mahkota. Pemangku raja inilah yang memberikan tanah Siantar menjadi tanah kota (*gemeente*) dalam bentuk: *hibah, anugerah dan pemberian*. Selanjutnya, iii) adalah Sawadim Damanik (1924-1946) yang berasal dari Desa Induk (*partuanon*) Bandar.

Pemangku raja inilah yang menjadi anak emas Belanda hingga diberikan *Satya Lencana Kesetiaan* pada tahun 1938 di Siantar. Ia berhasil selamat dari gejolak pembunuhan bangsawan yang bergelora 3 Maret 1946. Pada saat itu, Sawadim Damanik sedang berada di Pamatang Bandar. Namun demikian, pada saat gejolak pembunuhan bangsawan terendus oleh *spionase* Inggris pada sore hari tanggal 2 Maret 1946, maka Pasanggerahan dan Kediaman Raja Siantar dijaga ketat oleh serdadu Inggris. Itulah sebabnya, kedua bangunan vital Kerajaan Siantar itu masih berdiri hingga saat ini.

Djaudin Saragih adalah *Pangulu Balei* (sekretaris raja) atau *mangkubumi* Kerajaan Siantar pada era Sawadim Damanik. Djaudin Saragih adalah ayah Djasamen Saragih, dokter pertama dari orang Simalungun. Djasamen Saragih tewas dibunuh pada gejolak pembunuhan bangsawan tahun 1946. Kini, nama Djasamen Saragih diabadikan sebagai nama Rumah sakit Daerah Kota Pematangsiantar. Foto diatas dipetik pada saat keduanya berlibur di Pulo Tao, dekat Simanindo Danau Toba. Di Pulo Tao, Kerajaan Siantar memiliki villa yang di bangun pengusaha kolonial.



Gambar 22. Sawadim Damanik (dua di Kiri, pemangkau raja Siantar 1925-1946) dan Diki Sang Nuan Damanik (pemangku raja Siantar tahun 2010-sekarang)

Foto di atas memperlihatkan Sawadim Damanik, Pemangku Raja Siantar mengenakan seragam *Bestluur Ambtenar* atau pejabat kolonial. Sebagaimana diketahui, penguasa lokal disamping tetap menjadi pemerintah swapraja (*zelfbestuur*) juga sekaligus menjadi pejabat pamong praja (*Bestuur Ambtenar*). Jika sebagai *zelfbestuur* maka raja mengenakan pakaian tradisional (*perhatikan foto dibawah*), sedangkan sebagai pegawai pamong praja maka raja memiliki seragam sendiri. Sebagai *zelfbestuur*, maka raja mengenakan busana tradisional Simalungun mulai dari penutup kepala (*gotong*), kemeja (*toluk balanga*), selendang (*suri-suri*), pisau (*pisou halasan*), ikat pinggang (*ponding*) dan aksesoris lainnya. Penguasa lokal seperti Sawadim Damanik memiliki kendaraan dinas yang diberikan oleh pemerintah kolonial sebagai 'hadiah' terhadap kesetiannya bagi Belanda.



Gambar 23. Walikota Pematangsiantar dan Istri Ziarah ke pusara Sang Nauluh Damanik di Bengkalis, 2017.

Sumber: Humas Pemko Siantar

Mereka juga diperkenankan menjalankan peradilan yang disebut dengan 'Kerapatan' baik 'Kerapatan Adat' dan 'Kerapatan Na Bolon' yang berfungsi untuk mengadili kawula kerajaan yakni kaum *inlanders* (rakyat raja). Mereka ini juga mendapatkan penghasilan berupa gaji sebagai pegawai pamong praja dan juga mendapatkan *land rente* terhadap tanah-tanah yang digadaikan kepada pengusaha perkebunan. Pemerintah *zelfbestuur* ini biasanya diperalat Belanda untuk menciptakan keamanan bagi kawula raja. Sama seperti orang India atau Tionghoa yang memiliki 'Kapitan' ataupun 'Mayor' yang secara khusus bertugas untuk menangani dan mengatur kawulanya masing-masing.



*Gambar 24. Walikota Siantar ziarah di Pulau Holang
Sumber: Humas Pemko Siantar*

Di Kota Pematangsiantar, nama Sang Nualuh Damanik telah ditetapkan sebagai: i) nama stadion, ii) nama jalan sepanjang 50 Km, dan iii) tahun lahirnya ditetapkan ulang tahun kota Pematangsiantar. Penetapan ini merupakan apresiasi Pemerintah Kota Pematangsiantar terhadap jasa-jasa, kepeloporan dan kepioneran Sang Nualuh Damanik bagi pertumbuhan kota Siantar. Hal ini karena Siantar adalah embrio lahirnya kota Pematangsiantar yang multietnik, multibudaya, tetapi tetap mencerminkan solidaritas dan bertumbuhnya toleransi. Itulah sebabnya, setiap bulan April, Pemerintah Kota Siantar melakukan ziarah bersama baik ke pusara Sang Nualuh Damanik di Bengkalis, Riau maupun di

Jerat Partongah (bangsawan) Sang Nualuh Damanik di Pematangsiantar.



Gambar 25. Sawadim Damanik (pemangku Raja Siantar) dan Djaudin Saragih (Pangulu Balei atau Sekretaris Raja Siantar) di vila Pulo Tao-Danau Toba, 1936

Sumber: kitlv.nl

BAB IV GEMEENTE (KOTA) PAMATANGSIANTAR

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Siantar tidak saja mengakibatkan mengerdilnya wilayah Kerajaan Siantar berupa lepasnya Kota Padang, Dolog Marlawan dan Tanjung Kasau ke daerah-daerah Melayu. Kehadiran Belanda ini juga berdampak pada carut marutnya pemerintahan lokal di Kerajaan Siantar berupa terbuangnya Sang Naualuh Damanik ke Bengkalis. Ironisnya, pasca pembuangan itu, tidak satupun putra mahkota (*parana*) di Kerajaan Siantar menduduki tahta Kerajaan Siantar. Belanda melakukan politik adu domba di internal keluarga istana maupun Desa Induk (*Partuanon*) Kerajaan Siantar.

Selain itu, pemerintah kolonial berperan menata wilayah Siantar Simalungun yang dikenal dengan sebutan *afdeling* (kabupaten Simalungun) dan *gemeente* (kotamadya) Siantar. Pada tahun 1906 dan nyatanya pada tahun 1912, ketujuh subkultur kerajaan Simalungun dibentuk menjadi satu *afdeling* yakni *afdeling* Simalungun. Namun, pada tahun 1917, satu daerah subkultur yakni Siantar dikeluarkan dari *afdeling* Simalungun dan ditata menjadi sebuah kota perkebunan (*plantation city*) yang disebut dengan *Gemeente* Siantar.

Namun demikian, tidak semua desa induk (*partuanon*) Kerajaan Siantar yang digabung menjadi *gemeente*, melainkan hanya Siantar saja. Itulah sebabnya, dalam tulisan Belanda, nama Siantar disebut dengan *Gemeente* Pematangsiantar, yaitu Kota yang dibentuk dari ibukota (*pamatang*) Kerajaan Siantar yakni Siantar. Sedangkan Sipolha, Sidamanik, Marihat, dan

Bandar tidak digabung ke *Gemeente* Siantar meskipun diantara mereka masih terikat oleh kekerabatan (*kinship ties*).

Pembentukan *Gemeente* (Kotapraja) Siantar terjadi pasca pembuangan raja Siantar Sang Na Ualuh Damanik ke Bengkalis pada tahun 1906. Ibukota Kerajaan Siantar yakni Pamatang berada dalam tangan kekuasaan penjajah Belanda yang dijaga ketat oleh pasukan KNIL. Upaya menuju *Gemeente* Siantar, maka hal pertama dilakukan pemerintahan kolonial Belanda adalah reorganisasi pemerintahan menurut versi kolonial. Hal pertama ini adalah mengganti Sang Naualuh Damanik sebagai penguasa lokal di Siantar kepada dua pemangku kerajaan dari Sidamanik dan Marihat.

Dengan demikian, penunjukan kedua pemangku ini jelas akan memihak keinginan dan mendukung rencana kolonial di Siantar. Namun keduanya dimakjulkan Belanda dan menyerahkan tahta Kerajaan Siantar kepada Riah Kadim Waldemar Damanik. Pengembalian ini sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan lahan di Siantar kepada pemerintah kolonial guna dijadikan sebagai tanah *Gemeente*. Hal ini dilakukan Belanda mengingat dua pemangku raja sebelumnya tidak berhak menyerahkan tanah kepada Belanda. Justru yang paling *legitimate* dalam urusan penyerahan itu adalah keturunan Sang Naualuh Damanik. Pilihan pada saat itu jatuh pada Riah Kadim Waldemar Damanik karena sudah dianggap berpendidikan dan pro Belanda.

Penyerahan tanah di Kerajaan Siantar kepada Belanda guna keperluan tanah *Gemeente* dalam bentuk, *hibah, anugerah dan pemberian* terjadi pada era Kerajaan Siantar di pimpin Riah Kadim Waldemar Damanik. Pasca penyerahan (serah terima) tanah selesai tahun 1923, maka pada tahun 1924 dirinya diganti sebagai raja dan diserahkan kepada Sawadim

Damanik dari Desa Induk (*partuanon*) Bandar. Karena itu itu tampak sekali bahwa rencana Belanda mendudukkan Riah Kadim Waldemar Damanik sebagai raja di Siantar adalah untuk *legitimate*-nya penyerahan tanah kepada Belanda guna keperluan tanah *gemeente*.



Gambar 26. Chinatown (Pecinan) di Jalan Cipto Siantar, 1935

Sumber: kitlv.nl

Setelah Belanda berhasil mereorganisasi pemerintahan, maka Pematangsiantar dibentuk menjadi menjadi kota modern. Beberapa faktor mempengaruhi kondisi sosial politik Pematangsiantar pasca pembuangan Sang Na Ualuh Damanik di antaranya adalah perpindahan kedudukan kontrolir dari Pardagangan Tomuan ke Pematangsiantar pada tahun 1907 berkantor sementara di istana raja Siantar (*rumah bolon*), perluasan ekonomi perkebunan disertai masuknya kaum migran dari Jawa sebagai buruh kontrak dan pemukim Toba yang didatangkan atas kerjasama *zending* RMG dan

pemerintah Belanda dengan tujuan sosial, ekonomi dan politik.

Perkebunan adalah faktor utama masuknya kolonialisme Belanda ke Siantar. Hal ini disebabkan tanah subur dan berada di dataran rendah yang sangat cocok untuk perkebunan karet, kopi, tembakau dan sisal, serta kelapa sawit menciptakan Siantar tanah dollar (*Dollarland*). Sebenarnya sebelum Simalungun secara umum dijadikan Belanda sebagai daerah perkebunan (*cultuurgebied der Oostkust van Sumatra*) sejak 1 Juli 1920 sudah sejak tahun 1890 konsesi diberikan pemerintah kolonial kepada para pengusaha perkebunan (*onderneming*) membuka perkebunan di daerah Tanah Jawa dan Siantar.

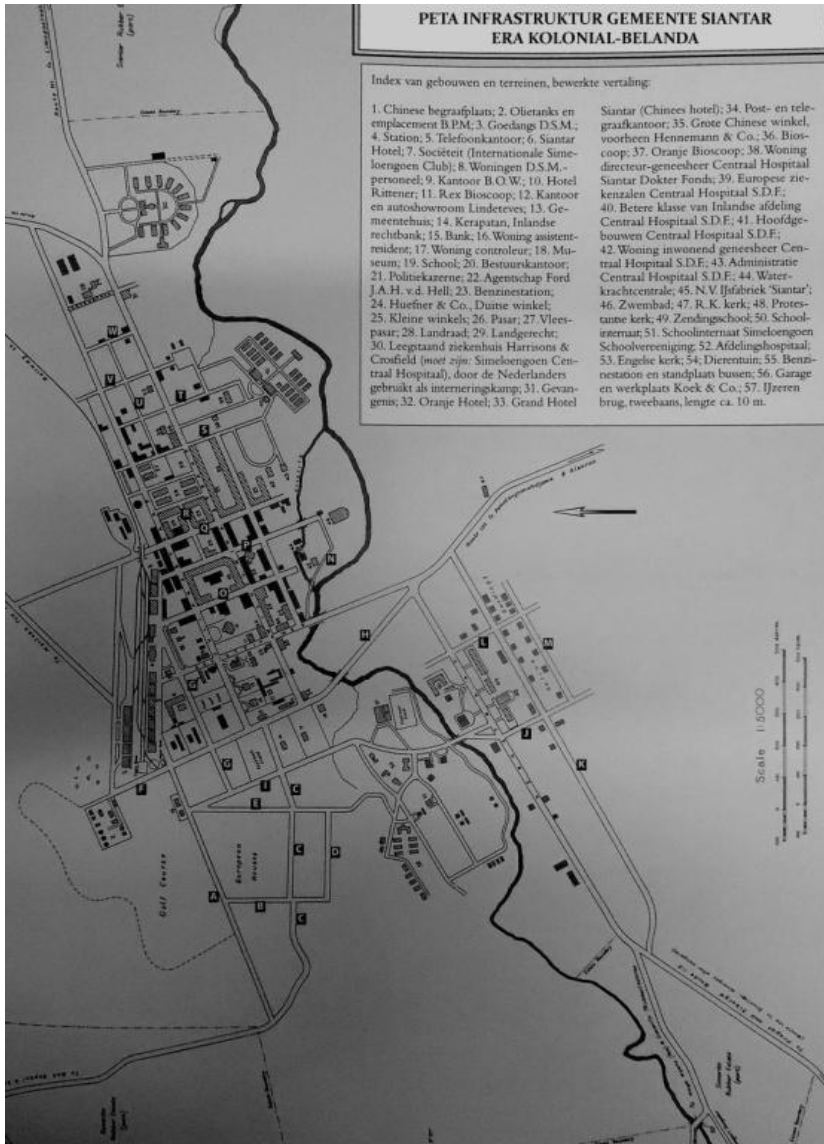


*Gambar 27. Foto Udara (luftoto) inti kota Siantar, 1938
Sumber: kitlv.nl*

Atas kebijakan politik kolonial Belanda, pengusaha-pengusaha perkebunan asing seperti *Rubber Plantation Trust* (perusahaan Inggris), *Handelsvereniging Amsterdam* (Belanda) antara tahun 1908-1920 berhasil memperoleh kontrak tanah di Siantar dan Tanah Jawa. Tahun 1908 *Siantar Estate* perkebunan pertama di Siantar dibuka, mula-mula diusahakan tanaman karet dan kopi. Tahun 1911 di Nagahuta diusahakan perkebunan teh berikut pabrik pengolahannya. Kebun teh ini yang pertama diusahakan di Simalungun.

Akhirnya pada tahun 1917, secara resmi ibukota tradisional Kerajaan Siantar dijadikan kotamadya (*Gemeente*) yang dikukuhkan dengan dikeluarkannya *besluit* (ketetapan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda J. Van Limburg Stirum yang dicatat dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) Nomor 285 tanggal 27 Juni 1917 di keluarkan di *Buitenzorg* (Bogor) dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 1917. Dalam *besluit* itu diputuskan bahwa nama daerah otonomi baru itu bernama Kota Pematangsiantar (*Gemeente Pematangsiantar*) dalam lingkup wilayah pemerintahan Sumatera Timur berkedudukan di Pematangsiantar.

Pada tanggal 12 Desember 1923 Waldemar sebagai raja Siantar tanpa meminta persetujuan *harajaan* Siantar menandatangani penyerahan hibah atas tanah di Pematangsiantar menjadi perluasan *gemeente* Pematangsiantar dengan pengecualian: i) tanah-tanah yang termasuk di dalam lingkungan *Pamatang* (tanah kosong) yang mana berada rumah raja Siantar (rumah batu) pengganti istana yang terbakar pada tahun 1919, ii) tanah-tanah yang dipergunakan pemerintah, dan iii) tanah-tanah yang sudah mendapat hak kontrak dari pengusaha jawatan perkeretaapian *Deli Spoorweg Maatshappij*.



Gambar 28. Peta Infrastruktur Pematangsiantar

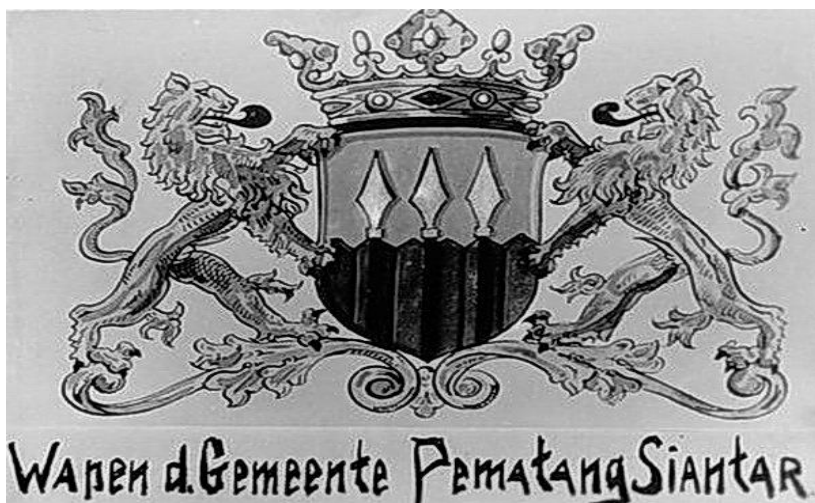
Sumber: kitlv.nl

Penyerahan hibah tanah dari raja Siantar Waldemar Damanik kepada *Gemeente* Siantar dicatat dalam akta notaris tertanggal 12 Desember 1923 di Pematangsiantar. Pihak Belanda diwakili Jacob Bosch kontrolir urusan dalam negeri, Hermanus Evert Karel Ezerman ketua *Gemeenteraad* di Pematangsiantar dan Westenenk, Gubernur Sumatera Timur. Namun tidak lama setelah penyerahan tanah kerajaan Siantar kepada kotapraja Siantar, Belanda mencopot jabatan Waldemar Damanik sebagai raja dengan dalih Waldemar Damanik dinilai '*tidak becus*' memerintah dan terlibat korupsi terhadap beberapa kas daerah di Kerajaan Siantar.

Jika merujuk pada *Peta Infrastruktur Gemeente Siantar* tahun 1926 diatas, tampak beberapa unit bangunan, kantor, pemukiman, dan keletakannya di inti kota Pematangsiantar, yaitu: 1) pemukiman orang Tionghoa, 2) tangki minyak *Batafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*, 3) Gudang *Deli Spoorweg Maatschappij (DSM)*, 4) Stasiun DSM, 5) Kantor Telepon, 6) Siantar Hotel, 7) *Societeit (International Simalungun Club)*, 8) Kediaman pejabat DSM, 9) Kantor Dinas Pekerjaan Umum (B.O.W), 10) *Hotel Rittener*, 11) *Rex Bioskop*, 12) kantor *showroom mobil Lindeteves*, 13) Kantor Walikota, 14) Kantor *Kerapatan* dan Bank Pribumi, 15) Bank, 16) kediaman Asisten Residen, 17) kediaman Kontrolleur, 18) Museum Simalungun, 19) sekolah, 20) kantor pejabat pemerintah.

Selanjutnya terdapat 21) kantor polisi, 22) kantor agen mobil Ford, 23) stasiun bensin, 24) kantor *Hufner and co*, 25) kantor dan bengkel, 26) pusat pasar, 27) kantor dinas pasar, 28) pengadilan Siantar, 29, pengadilan tinggi, 30) rumah direktur *Harison and Crosfield* berdekatan dengan *Simalungun Central Hospital*, 31) *Gevangenis*, 32) Hotel Orange, 33) Grand Hotel Siantar, 34) Kantor Pos dan Telegraf, 35) *Grote Chines*

Winkel, 36) bioskop, 37) Orange Bioskop, 38) kediaman direktur *Central Hospital Siantar*, 39) rumah direktur sekolah *Central Hospital SDF*, 40) sekolah perawat pribumi *Central Hospital SDF*, 41) Kantor Kepala *Central Hospital SDF*, 42) kediaman Kepala *Central Hospital SDF*, 43) administrasi *Central Hospital SDF*, 44) Perusahaan airminum, 45) pabrik es Siantar, 46) Kolam Renang, 47) Gereja Katolik, 48) gereja Protestan, 49) Sekolah Zending, 50) sekolah perkebunan berasrama, 51) sekolah berasrama persatuan pribumi Simalungun, 52) rumah sakit perkebunan, 53) Gereja Engels, 54) *Dierentuin*, 55) stasiun pengisian bensin untuk Bus, 56) garasi dan bengkel *Koek and Co*, 57) Jembatan Diponegoro.



Gambar 29. Wapen d. Gemeente Pematangsiantar, tahun 1918

Sumber: kitlv.nl

Sebagai langkah awal maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan anggaran kota Pematangsiantar sebanyak 5.700 gulden per tahun. Untuk menjaga ketertiban kota, pemerintah

Hindia Belanda menempatkan polisi bersenjata. Infrastruktur kota dibangun dengan sangat baik dan terencana, seperti pemeliharaan, renovasi, perbaikan dan pembangunan jalan-jalan umum, penyediaan sarana air minum, tanggul anti banjir, selokan (kanal), pasar, jembatan, gorong-gorong, taman bunga, rumah potong hewan, tempat pencucian pakaian, dan lain-lain.



Gambar 30. Gemeentehuis (Balaikota) Pematangsiantar

Sumber: kitlv.nl

Tidak lupa ditetapkan pula tentang sarana kebersihan kota seperti menyediakan tempat pembuangan sampah, lampu jalan dan pemakaman umum. Tidak lupa dinas pemadam

kebakaran secara gratis kepada warga kota Pematangsiantar. Disediakan juga lokasi khusus untuk bisnis. Untuk menunjang kehidupan kota modern, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk dewan kota (*Gemeenteraad van Pematang Siantar*) yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan ketentuan 5 (lima) orang Eropa atau yang dipersamakan (*hen gelijkgestelden*), 3 (tiga) orang penduduk asli (*inlanders*) dan 1 (satu) orang warga Timur Asing (*Vreemden Oosterling*). Ketua *Gemeenteraad* sesuai artikel 6 ayat 3 adalah *Asisten Residen Afdeeling Simalungun* dan Tanah Karo sebagai kepala daerah.

Pada dasarnya, kesembilan anggota dewan kota ini bukanlah merupakan perwakilan rakyat Kota Pematangsiantar, sebab mereka langsung dihunjuk dan diangkat Pemerintah kolonial Belanda. Tugas Dewan Kota Pematangsiantar adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Kota dalam hal penentuan kebijakan di Pematangsiantar. Dalam keputusan itu disebutkan adanya keraguan atau perselisihan tentang tapal batas kota Pematangsiantar yang masuk dalam lingkup tanggungjawab Dewan Kota dan Otoritas Kota Pematangsiantar diputuskan Gubernur Jenderal di *Batavia*. Sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Siantar (1945) belum pernah satu orang pun dari putera Simalungun asli yang diangkat Belanda menjadi anggota Dewan Kota (*Gemeenteraad van Pematang Siantar*). Di antara pribumi yang pernah menjadi anggota *Gemeenteraad* adalah Mahmud Hamzah Harahap, seorang dokter yang dihormati masyarakat karena dedikasinya terhadap kesehatan masyarakat.

Anggaran kota Pematangsiantar ditetapkan dengan keputusan *Gubernur Jenderal Hindia Belanda* dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) nomor 290 tanggal 27 Juni 1917 dan mulai

berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1917. Dewan Hindia Belanda di *Batavia* (Jakarta) memutuskan anggaran untuk *Gemeente* Pematangsiantar masing-masing sebagai berikut: i) anggaran pejabat pemerintah kota 4.684 gulden, ii) anggaran urusan umum (teknis, administrasi, kantor) 3.7565 gulden, iii) anggaran urusan kebersihan 3.624 gulden, iv) anggaran jawatan pemadam kebakaran 400 gulden, v) anggaran infrastruktur jalan raya sebesar 3.255 gulden, vi) anggaran pemakaman umum (termasuk pemakaman etnis Tionghoa dan Muslim) 2.940 gulden, vii) anggaran rumah potong hewan dan ternak babi sebesar 540 gulden, viii) anggaran pemeriksaan ternak dan daging 300 gulden, ix) anggaran sarana air minum 11.602,50 gulden, x) anggaran pertanian 625 gulden dan xi) anggaran biaya tak terduga 3.323,50 gulden. Total anggaran pengeluaran *Gemeente* Pematangsiantar 68.859 gulden per tahun, sedangkan pemasukan kota dapat menutup anggaran pengeluaran sebesar 68.859 per tahun.



Gambar 31. Kantor Otoritas Kota Siantar, 1934

Sumber: Tropen Museum Institut

Sampai tahun 1938, sepertiga tanah Simalungun sudah menjadi perkebunan dari total luas Simalungun 151.295 hektar. Dalam laporannya, J. Tideman (1921) menyebutkan 120.000 hektar tanah di Simalungun sudah dijadikan tanah konsesi perkebunan yang diberikan kepada 46 pengusaha perkebunan. Di antaranya 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, 10 perkebunan campuran (karet, teh, kopi dan kelapa sawit). Selain perusahaan yang disebutkan di atas, di Simalungun (khususnya di Siantar), hak konsesi diberikan kepada *Het Nederlandsch Indisch Landsyndicaat, de Marihat Sumatra Plantage Cy, The Good Year Tire and Rubber Co.*

Setelah Kontrolir pindah ke Pematangsiantar tahun 1907, makin deras arus migrasi dari Tapanuli Utara ke Siantar. Pada tahun 1906-1920 Belanda membuka jalan-jalan utama dari

Siantar menuju Tebingtinggi. Dari Siantar ke Tapanuli melalui Parapat dibuka pada tahun 1911, jalan Siantar ke Tanah Jawa dibuka antara tahun 1916-1917. Jalan dari Siantar hingga ke Saribudolog mulai dikerjakan pada tahun 1917. Dengan adanya pembukaan jalan-jalan baru ini, arus migrasi dari seluruh penjuru masuk ke Siantar. Pematangsiantar mulai tahun 1907 makin berkembang dan mengalami perubahan signifikan.

Tuan Bandar yakni Sawadim Damanik yang sudah lama menginginkan jabatan 'raja' Siantar itu menggantikan Riah Kadim Waldemar Damanik sejak tahun 1923-1946 yakni sampai pecahnya revolusi. Untuk mengisi lowongan jabatan Tuan Bandar yang ditinggalkan, Sawadim Damanik mengangkat puteranya Distabulan Damanik menjadi penguasa di Bandar. Sesuai aturan yang ditentukan Belanda, setiap kepala daerah (baik distrik, *onderdistrik* atau *partuanon*) wajib menyatakan sumpah setia kepada pemerintah *Hindia Nederland* dan ratu Belanda. *Besluit* dikeluarkan raja Siantar dengan sepengetahuan pejabat Belanda.



Gambar 32. De Javasche Bank (kini BRI) Siantar, 1934

Sumber: kitlv.nl

Sejak tahun 1918 seluruh rakyat pendatang pribumi ditempatkan di bawah otoritas pemerintah swapraja Siantar. Komposisi penduduk Siantar sejak tahun 1907 menempatkan penduduk asli Siantar (suku Simalungun) melorot populasinya menjadi kelompok minoritas. *Volkstelling* (sensus penduduk) tahun 1930 menunjukkan *Gemeente* Pematangsiantar didominasi etnis Cina sebesar 4.964 jiwa (23,62%), disusul Toba sebanyak 2.968 jiwa (19,17%), Mandailing 1.297 jiwa (8,26 %), Angkola 953 jiwa (6,16%) dan Simalungun 495 jiwa (3,20%). Untuk masing-masing etnis ini,

Belanda mengangkat pimpinannya, untuk etnis Cina diangkat Letnan Cina (*Luitenant Chinezen*).



Gambar 33. Balai Kota, Simalungun club, Stasiun Kereta Api dan Siantar Hotel di jantung Kota Pamatangsiantar
Sumber: Kitlv.nl

Kelenteng Cina dibangun di dekat istana raja Siantar di Pamatang. Pendidikan tidak luput dari perhatian pemerintah, seiring dengan politik etis sejak 1899 yang dianut pemerintah Belanda, maka di Siantar mulai dibangun sekolah-sekolah dan sarana pendukungnya. Tahun 1915 sebuah sekolah swasta khusus buat anak-anak Eropa di dirikan di Siantar. Setahun kemudian (1916) berdiri *HIS (Hollandsch-Indlandsche School)* dikhususkan untuk anak-anak raja dan kaum terkemuka di Simalungun (lokasinya sekarang berada di sekitar kantor Bupati Simalungun lama di Jl Simarito/Jl. Adam Malik).

Pada tahun 1919 khusus untuk anak-anak raja dan bangsawan Simalungun dibangun asrama khusus (*Internaat voor Hoofden Zonen*). Di antara keluarga bangsawan Simalungun yang pernah bersekolah di sini adalah: Tuan Djomat Purba, Tuan Sarmahata Damanik (anak Sang Na Ualuh Damanik), Djontara Damanik, Djariaman Damanik, dan lain-lain. Sementara itu untuk anak-anak orang biasa (rakyat

kebanyakan) dibangun dua sekolah di Pematangsiantar dan dua kelas di Perdagangan. Sekolah didirikan *Misi Sungai Rhein* sudah sejak tahun 1904 berdiri di Bulu Raya dan mengalami perkembangan seiring dengan berdirinya gereja-gereja di seluruh Simalungun. Tidak ketinggalan misi Metodis dari Amerika mendirikan sekolah di Siantar pada tahun 1921.



Gambar 34. *Chung Hua School* (Sultan Agung) Siantar, 1935
Sumber: kitlv.nl

Selain itu sekolah untuk warga Tionghoa juga tidak ketinggalan hadir di Siantar sejak tanggal 9 September 1909 (Perguruan Sultan Agung sekarang). Pematangsiantar berkembang menjadi kota pusat pemerintahan *Afdeeling Simalungun* dan Tanah Karo (12 Desember 1906) tempat kedudukan asisten residen yang resmi pindah dari Saribudolog ke kota ini pada tahun 1912 dengan *besluit* nomor 4 tanggal 15 Nopember 1912, *staatsblad* nomor 560.

Pematangsiantar perlahan-lahan menjadi pusat perkebunan (*middelpunt van cultuuronderneming*). Sejak 1 Juli 1920 Simalungun resmi masuk daerah perkebunan Pantai Timur Sumatera (*Cultuurgebied Oostkust van Sumatra*).

Lembaga pengadilan ini disebut '*Kerapatan*'. Kerapatan di Simalungun dibagi dua, pertama daerah hukum Pematangsiantar meliputi daerah swpraja Siantar, Tanoh Jawa, Panei dan Raya; kemudian daerah hukum Saribudolog meliputi swapraja: Dolog Silou, Silimahuta dan Purba. Kerapatan di Saribudolog dianggap bahagian dari *Kerapatan Nabolon* (*karapatanlandschap*) di Pematangsiantar.

Di bawah *Kerapatan Nabolon* terdapat kerapatan urung yakni peradilan di masing-masing *Landschap* (kerajaan). Kerapatan Nabolon dipimpin pejabat pemerintah Belanda dengan raja-raja sebagai anggotanya. Sementara itu Kerapatan Urung langsung diketuai raja sebagai pimpinan *landschap* (*urung*) atau kerajaan. *Kerapatan Nabolon* memutuskan perkara yang bukan wewenang Kerapatan Urung. Setiap vonis dijatuhkan *Kerapatan Nabolon* harus disetujui gubernur sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda. Bersamaan dengan pembentukan lembaga peradilan ini, Belanda membangun kantor *Kerapatan Nabolon* di Pematangsiantar (gedung DPRD Siantar sekarang) tempat raja-raja Simalungun dan pejabat pemerintah Belanda bersidang. Pada tahun 1920 terjadi perubahan di mana setiap perkara yang masuk harus diselesaikan sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Hindia Belanda.



Gambar 35. Jembatan Diponegoro Siantar dan Pabrik Es, 1930.

Sumber: Tropen Museum Institut

Mulai tahun 1917 ditetapkan pribumi di bawah otoritas pemerintah swapraja (*zelfbestuur*). Sampai tanggal 1 Nopember 1921 pengadilan di daerah ditentukan hakim yang bertugas. Sebelumnya setiap kasus yang dilimpahkan ke pengadilan dibawa bersidang di Tebingtinggi tempat kedudukan hakim yang ditetapkan pemerintah Belanda. Seiring perkembangan kota Pematangsiantar, sejak tahun 1921 kota ini ditetapkan tempat kedudukan hakim, meskipun persidangan tetap dilakukan di Tebingtinggi. Pada tahun 1917 semua warga pribumi diputuskan pemerintah kolonial berada di bawah otoritas hukum pemerintah swapraja Simalungun.



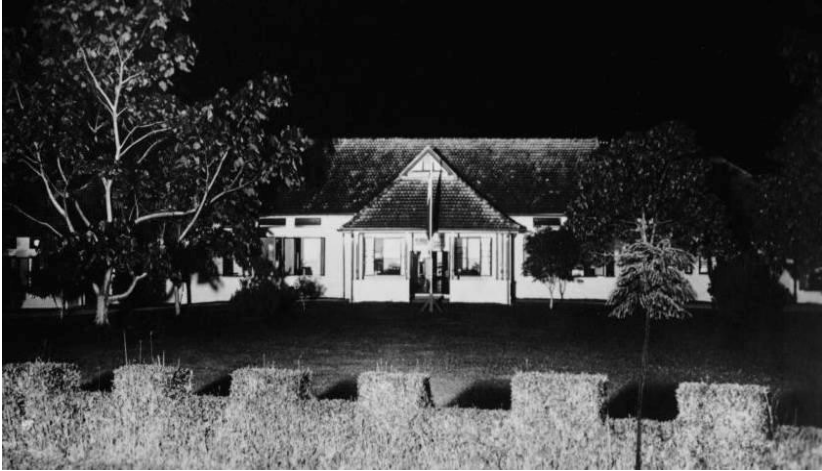
*Gambar 36. Ambacht School (STM HKBP) Siantar.
Sumber: kitlv.nl*

Foto ini memperlihatkan ‘sekolah tukang’ atau dikenal dengannama *Ambachtschool* terutama bagi orang pribumi (*voor Inlanders*). Kini, sekolah ini dikenal dengan STM HKBP Siantar. Tujuan utama pendirian sekolah ini di era kolonial Belanda adalah tersedianya tenaga-tenaga tukang yang handal yang diprioritaskan sebagai tenaga kerja bangunan di Siantar. Para lulusan sekolah inilah yang membangun Kantor Walikota (*Gemeentehuis*), kantor DPRD (*Gemeenteraad*), *de Javasche Bank* (kini BRI Siantar), *Simalungun International Club* (kini Gedung Juang Nasional), jembatan Diponegoro, beragam bioskop dan lain-lain.



Gambar 37. Native School dari Misi Nijkerk, 1927
Sumber: kitlv.nl

Foto di atas adalah sekolah orang pribumi (*Native School*) di Siantar yang dikembangkan misi *Nijkerk*, 1927. Sekolah adalah permintaan penguasa lokal (*zelfbestuur*) Siantar guna memberikan perhatian pada pendidikan dan masa depan orang pribumi (*native*) di Siantar. Walaupun memiliki bangunan yang sederhana, tetapi keberadaan sekolah ini menjadi awal pembangunan mental penduduk native di Siantar. Siswa sekolah ini tidak saja berasal dari orang Simalungun, tetapi juga orang Toba, Mandailing, Jawa, Minangkabau dan lain-lain.



Gambar 38. HVA boardingschool, sekolah Taman Asuhan, 1935.
Sumber: kitlv.nl

Foto di atas memperlihatkan sekolah berasrama (*boarding school*) atau dalam bahasa Belanda di sebut *Internatschool*. Dibangun oleh perusahaan perkebunan *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)* yang mengelola perkebunan teh, karet dan sisal di Siantar. Sekolah ini dibangun khusus bagi anak-anak orang Eropa baik sebagai *planters* maupun pejabat kolonial. Sekolah ini dibangun sejak tahun 1925 dan terus berkembang hingga tahun 1942. Pada masa kini, sekolah ini dikelola PTPN-IV yang dikenal dengan nama Sekolah Taman Asuhan yang berlokasi di Jalan MH. Sitorus di kawasan *Weltreveden* atau *Europeanwijk* (pemukiman orang Eropa) di Siantar.

Gambar di bawah ini adalah bangunan sederhana sekolah yang di dirikan *Rheinische Mission Geselschaf (RMG)* yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Pematangsiantar di Jalan Gereja. Sekolah ini menjadi bagian integral dari upaya *RMG* disamping menyebarkan agama Kristen. Di samping itu, terdapat sekolah khusus bagi kawula pribumi yang disebut dengan *native school*. Sekolah ini didirikan Yayasan Gereja Belanda atau *Nijkerk*. Sebagai yayasan Gereja yang berasal dari Belanda, yayasan ini konsen dengan pendidikan dan keterampilan bagi warga pribumi di Siantar.



Gambar 39. Sekolah zending di Siantar

Sumber: kitlv.nl

Sekolah zending Belanda dan Jerman ini menambah deretan sekolah yang berdiri di Siantar di samping sekolah yang didirikan pemerintah Belanda seperti *Lafarge School*

(sekolah dasar bagi orang Eropa), *Holand Inlandsche School (HIS)*, *AMS*, *Kwekschool*, *Normal School* (sekolah guru bagi pribumi), sekolah perkebunan, sekolah tukang (*ambacht school*), sekolah perawat *Central Hospital SDF* dan lain-lain. Seluruhnya ini menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat di Siantar setidaknya pada era kolonial.



Gambar 40. De Javasche Bank, Siantar 1934

Sumber: kitlv.nl

Pemerintah Kolonial Belanda memiliki badan khusus untuk mengelola keuangan yang disebut dengan *De Javasche Bank* (Bank Jawa). Secara khusus, bank ini menjadi bank sentral yang berfungsi sebagai pencetak uang dan pengawasan uang. Di Siantar, *De Javasche Bank* membuka kantor di Jalan Sutomo yang kini beralih nama menjadi Bank Rakyat Indonesia. Di Medan, *de Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia cabang Sumatera Utara. Bank ini dibuka sejak tahun 1915, sejalan

dengan berkembang pesatnya Siantar. Bangunan berarsitektur *art deco* ini masih berdiri megah di Siantar yang berhadapan dengan Kebun Bunga Pematangsiantar. Selain *de Javasche Bank*, di Siantar pernah berdiri *NV. De Batakbank* yang didirikan orang Angkola sejak tahun 1930. Bank ini bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan uang bagi orang Angkola yang bekerja di Siantar. Pada tahun 1947, Bank ini pernah mengeluarkan uang yang berlaku khusus di Sumatera Utara. Pembangunan ini sejalan dengan konflik antara orang Mandailing dan Angkola terkait pekuburan Sei Mati Medan tahun 1922-1925.



Gambar 41. Pembangunan de Javasche bank di Siantar
Sumber: kitlv.nl



*Gambar 42. Foto udara kawasan Balaikota Siantar, 2020
Sumber: Google Map, 2020*

Penetapan Siantar menjadi *gemeente* berdampak pada penentuan pemimpin kota yang disebut dengan Walikota ataupun *Burgermeister*. Pemimpin kota ini berkantor khusus di kantor kota yang disebut *Gemeentehuis* atau *Townhall*. *Gemeentehuis* Siantar mulai dibangun tahun 1922 dan selesai pada tahun 1926. Bangunan berarsitektur *art deco* ini masih digunakan sebagai Balai Kota Siantar dengan sejumlah renovasi dan penambahan unit bangunan di bagian belakang.

Dari kantor inilah, walikota Siantar menjalankan roda pemerintahan kota. Kantor walikota ini berdampingan dengan *Gemeenteraad* (Dewan Kota) di Jalan *Wilhelminastraat* (Jalan Sutomo) dan berhadap langsung dengan Kebun Bunga Siantar. Kantor Walikota Siantar ini pernah dipergunakan sebagai Kantor Gubernur Sumatera Utara selama delapan bulan pada tahun 1947 pada saat Medan tidak nyaman karena berkecamukannya Perang Medan Area. Bangunan ini menjadi

salah satu ikon dan landmark kota Siantar yang masih terpelihara (terawat) dengan baik.



Gambar 43. Foto Balaikota Siantar tahun 1925
Sumber: kitlv.nl

Foto di bawah adalah *central market* atau pusat pasar yang kini disebut dengan Pasar Horas di Siantar. Embrio pasar ini adalah gagasan Sang Nauluh Damanik tahun 1901. Pada pasar inilah, para penjual dan pembeli saling menukar dagangan baik dengan cara barter maupun dengan uang. Kemudian, sejak Siantar menjadi *Gemeente* (Kotapraja) tahun 1917, pasar ini dikembangkan dengan cara modern seperti terlihat pada foto.



*Gambar 44. Central Market (Pusat Pasar) 'Horas' Siantar, 1935.
Sumber: kitlv.nl.*

Pada tahun 1970-an, pusat pasar ini diperbaharui lagi seperti tampak dewasa ini di Siantar dengan berlantai tiga. Pusat pasar 'Horas' ini adalah pasar kebanggaan orang Siantar. Disana terdapat aneka komoditas sembako, pakaian, furnitur, dan ataupun jajanan instan dengan berbagai rasa. Lokasi pusat pasar ini tidak jauh dari lokasi *Rumah Bolon* (istana) Kerajaan Siantar yang berada di Pulau Holang, Kampung Pamatang di Siantar.



Gambar 45. Pasar Horas tahun 2020
Sumber: Dok. Peneliti

Di Siantar pada era kolonial Belanda terdapat beberapa sarana hiburan seperti bioskop. Diantaranya adalah *Rex Bioscoop*, *Orange Bioscoop*, *Simalungun Bioscoop* dan lain-lain. Bioskop seperti *Orange Bioskop* dikelola oleh pemerintah kolonial, sedangkan bioskop lainnya dikelola oleh pihak swasta. Pada masa itu, film-film yang diputar adalah film hitam putih (*black and white colour*) dengan tambahan suara (*dubber*) dan film dimaksud berasal dari belahan dunia Eropa.



Gambar 46. Rex Bioscoop (Ria Bioskop) Siantar, 1925
Sumber: kitlv.nl

Biasanya, bioskop ini dipadati pengunjung pada akhir pekan (*weekend*) dan terutama yang menjadi penonton adalah para tuan kebun (*planters*), pejabat kolonial (*colonial ambtenar*), dan pengusaha-pengusaha kelas atas lainnya di Siantar. Bioskop pada era kolonial Belanda hingga saat ini merupakan bagian gaya hidup. Berkunjung dan menonton ke bioskop memiliki gaya tersendiri daripada sekedar *nonton* di rumah walaupun menggunakan *home theater* dengan fasilitas CD, DVD dan lain-lain. Itulah sebabnya, bioskop hingga saat ini masih berjalan aktif seperti *XXI*, *21*, *Flixx* maupun *Cinemaxx*. Hingga tahun 1942, bioskop di Siantar masih aktif. Tapi kini, keseluruhan bioskop itu tidak lagi beroperasi.



Gambar 47. *Delispoorweg Maatschappij (DSM) Siantar, 1935.*
Sumber: kitlv.nl

Kereta Api Deli atau sering disebut dengan *De Delispoorweg Maatschappij (DSM)* dibangun sejak tahun 1886 dari Medan ke Labuhan Deli dan seterusnya ke *Belawan Seaport* (Pelabuhan Belawan). Pembangunan ini diprakarsasi Jacob Cremer yakni Presiden Komisaris *NV. De Deli Maatschappij* atau PT Deli Maskapai. Tujuan pembangunan Kereta Api pada mulanya adalah untuk mengangkut hasil perkebunan dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Sejak tahun 1915, sejalan dengan pembukaan dan perkembangan perkebunan di wilayah Siantar, maka jalur kereta api Medan-Tebingtinggi-Siantar mulai dibuka sejak tahun 1918. Pada tahun 1922, jalur kereta api itu sudah dapat dilalui oleh Kereta Api.

Stasiun Kereta Api di Siantar terdapat di *Stationweg* atau Jalan Staisun. Stasiun kereta pembantu terdapat di Dolog Malangir, Kabupaten Simalungun. Setiap hari, kereta api dari Siantar melaju ke Medan dan Belawan untuk mengangkut

hasil perkebunan seperti teh, karet, kelapa sawit, kopi dan termasuk coklat maupun sisal.



Gambar 48. Potret Stasiun Kereta Api Siantar, 1935

Sumber: kitlv.nl

Sejak tahun 1891, perusahaan *NV. de Deli Maatschappij* tidak saja memprakarsai pendirian *NV. De Delispoorweg Maatschappij*, tetapi juga memprakarsai pembangunan kantor Telepon dan Telegraf. Pada mulanya, pembangunan telepon dan telegraf ini berguna untuk mendukung pembangunan jaringan kereta api. Hal mana yang mau disebut ialah bahwa, setiap stasiun maupun pos pemantau Kereta Api dipersimpangan jalan selalu dihubungkan oleh telepon ataupun telegraf. Dengan adanya telepon dan telegraf ini, maka laju kereta api disetiap stasiun dan persimpangan kereta api dapat dipantau. Selain itu, fungsi telepon dan telegraf ini adalah untuk membantu keselamatan kereta api di setiap

persimpangan jalan. Namun, sejak tahun 1901, jaringan telepon dan telegraf tidak saja melayani khusus kereta api tetapi telah merembet kepada kantor-kantor perkebunan, kantor pemerintahan, toko, leveransir, grosir, rumah sakit dan lain-lain.



Gambar 49. Telefoon en Telegraf Kantoor Siantar, 1920

Sumber: Tropen Museum Institut

Sejak tahun 1920, jaringan telepon dan telegraf sudah tersambung ke Pematangsiantar. Jaringan ini percis berada di sepanjang jalur kereta api hingga stasiun kereta api di Siantar. Kantor cabang telepon dan telegraf di Siantar terdapat di jalan W.R. Supratman yang kini menjadi bagian dari lokasi Kantor Telkom Pematangsiantar. Hingga kini, unit bangunan ini masih berdiri megah di Siantar walaupun terdapat penambahan bangunan lainnya.



*Gambar 50. Kantor Pos Pematangsiantar
Sumber: Dok.Penelitian, 2020*

Kantor Pos adalah vital di era kolonial untuk menghubungkan Eropa dan Netherland India. Termasuk Siantar. Kantor Pos Siantar dibangun sejak 1913 di Jalan Merdeka berdekatan dengan Kantor Polisi. Hingga kini, bangunan sejak era kolonial masih berdiri dengan beberapa renovasi. Demikian pula fungsinya masih sebagai kantor pos.



Gambar 51. *Polizei Kantoor* (Kantor Polisi) Siantar, 1923
Sumber: kitlv.nl

Kerawanan sosial seperti pencurian, kriminal, pembunuhan, mabuk-mabukan, peredaran narkotika (opium) maupun pengawasan kota Siantar, maka dibentuk kantor Polisi (*Polizei Kantoor*). Kantor polisi ini tepat berlokasi di ujung Jalan Merdeka, yang saat ini menjadi Mako Polresta Siantar di Jalan Sudirman Pematangsiantar. Sebagaimana disebut Jean Gelman Taylor (2001), pembentukan Polisi disetiap kota (*gemeente*) ialah karena tingginya kerawanan sosial seperti di *Batavia* (Jakarta) yang digambarkan Taylor. Itulah sebabnya, rumah-rumah orang Eropa maupun *planters* (tuan kebun) yang dahulunya tidak menggunakan pagar, tetapi akhirnya harus diberi pagar sehingga tindakan kriminal bisa direduksi. Inilah awal mula rumah-rumah atau kantor pemerintah di era kolonial menggunakan pagar.



*Gambar 52. Simalungun International Club Siantar, 1935.
Sumber: kitlv.nl*

Di Siantar, Polisi di era kolonial Belanda merupakan aparaturnya pemerintah yang digaji pemerintah kolonial. Sumber daya polisi biasanya adalah orang Eropa dan juga orang India. Hal ini karena tubuh orang India cenderung berpostur besar sehingga dianggap tangguh menghadapi para kriminal kota. Disamping itu, polisi ini juga dipersiapkan untuk menjaga kantor-kantor pemerintah maupun pengusaha perkebunan. Mereka ini memegang jabatan penting terutama menciptakan keamanan dan ketertiban Kota Siantar sejak ditetapkan sebagai Gemeente sejak 1917.



Gambar 53. Pasukan KNIL di depan *Simalungun International Club* Siantar, 1947. Sumber: kitlv.nl

Societiet atau Asosiasi Kerah Putih (*white collar*) adalah paguyuban para Tuan Kebun (*Planter*) dan Pejabat Kolonial (*colonial ambtenar*) yang berdiri pada tahun 1879 di Medan. Paguyuban ini berdiri di Siantar sejak pembukaan perkebunan yang resminya sejak 1907. *Societiet* di Siantar berdiri sejak tahun 1910 yang disebut dengan *Simalungun International Club*. Gedung ini merupakan tempat bertemunya para pengusaha perkebunan maupun pejabat kolonial. Mereka saling berinteraksi seputar perkebunan, kuli kontrak maupun politik. Di gedung ini, biasanya mereka mendengarkan musik, baca buku, baca koran, berdansa dan lain-lain sambil minum kopi. Pada masa kini, gedungnya menjadi Gedung Juang Nasional Siantar. Pada era revolusi tahun 1945-1949, gedung ini pernah digunakan sebagai Markas KNIL.

Disamping Bioskop, pemerintah kolonial Belanda maupun pengusaha Belanda selalu membangun Kolam Renang (*zwembaad*). Sarana berupa kolam renang ini menjadi tempat mewah bagi para pengusaha, *planters* (tuan kebun) maupun kaum elit kota untuk menghabiskan waktu dengan cara berenang.



Gambar 54. Siantar Zwembaad (Kolam Renang Siantar)

Sumber: kitlv.nl

Di Siantar, kolam renang pertama yang di bangun Belanda berada di Pulau Holang, Kampung Pamatang, Siantar. Sumber air kolam ini berasal dari Sungai (*Bah*) Bolon yang percis mengalir di sampingnya. Kolam ini pada awalnya merupakan bagian dari Istana Kerajaan Siantar, tetapi kini menjadi milik pengusaha yang disebut dengan *Detis Sari Indah*.



Gambar 55. Pengunjung di Kolam Renang Siantar tahun 1935.

Sumber: kitlv.nl

Jika di Jakarta maupun di Medan terdapat pabrik es batangan yang terkenal yaitu 'Petodjo'. Sama halnya dengan di Siantar, maka dikota inipun terdapat pabrik es yang berada di kampung Pamatang, di lokasi Kerajaan Siantar. Pabrik es ini dibangun sejak tahun 1922 dan menjadi penyuplai es batangan di Siantar. Sumber air guna pembuatan es ini berasal dari Sungai (bah) Bolon. Sungai (bah) Bolon di bendung dan sebagian airnya di belokkan ke pabrik pengolahan es setelah di suling (dibersihkan). Sejak tahun 1950-an, pabrik es menjadi milik swasta di Siantar dan memproduksi minuman kemasan botol cap Badak seperti Sarsaparilla yang sangat terkenal itu. Hingga kini, pabrik Es Siantar masih beroperasi dan menyalurkan produknya ke berbagai wilayah di Indonesia.



*Gambar 56. Dam Siantar Icefabriek (Pabrik Es Siantar), 1930
Sumber: Tropen Museum Institut*



*Gambar 57. Pabrik Es Siantar, 1953
Sumber: Tropen Museum Institut*



Gambar 58. Huis van Controleur (Rumah Kontrolir) Siantar, 1930. Sumber: kitlv.nl

Sejak penetapan Siantar menjadi *Gemeente*, maka pemimpin kota diangkat seorang walikota atau (*Mayor*) atau dalam bahasa Belanda disebut *Burgermeister*. *Huis van Controleur* atau Rumah Kontrolir ini berada di *Weltevreden* (Pemukiman orang Eropa) di jalan M.H. Sitorus Siantar. Rumah ini menjadi rumah dinas walikota yang pada era kolonial sering disebut menjadi *Asisten Residen* atau Walikota.



*Gambar 59. Rumah Walikota Siantar
Sumber: kitlv.nl*

Hingga kini, rumah dinas Walikota ini masih berdiri megah dan ditempati oleh setiap walikota terpilih di Pematangsiantar. Rumah ini tidak jauh dari *Gereja RMG* (Gereja HKBP Jalan Gereja Siantar) ataupun *HVA Internal School* (Sekolah Taman Asuhan) ataupun *Simalungun Central Hospital* (kini Rumah Sakit Tentara), serta *Siantar Zoo* (Taman Hewan Siantar).

Bangunan berarsitektur *art deco* ini cukup asri karena dikelilingi oleh aneka jenis kayu seperti *Trembesi* (pohon pelindung yang dibawa dari Amerika Latin). Juga berdekatan dengan Sungai (bah) Bolon yang mengalir disampingnya menambah keindahan lokasi bangunan ini. Di bagian tengah bangunan terdapat corong asap guna mengalirkan asap dari pembakaran arang guna memberikan kehangatan pada penghuni rumah. Keadaan seperti ini persis seperti rumah-rumah di Eropa.



Gambar 60. Hospital van Mardjandi Estate, Siantar, 1938

Sumber: kitlv.nl

Seja era kolonialisme Belanda di Siantar terdapat beberapa rumah sakit seperti: *Simalungun Central Hospital* (kini Rumah Sakit Tentara) yang dikelola pengusaha Perkebunan *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)*. Demikian pula *Siantar Central Hospital* (kini Rumah Sakit Daerah Kota Siantar) yang dikelola *gemeente* Siantar. Termasuk *Hospital van Mardjandi Estate* yang juga dikelola HVA. Rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Balimbingan maupun Rumah Sakit di Dolog Ilir.



Gambar 61. Kompleks Marjandi Estate tahun 2020

Sumber: Dok. Penelitian, 2020

Hospital van Mardjandi Estate adalah rumah sakit kuli bagi kuli perkebunan *Mardjandi Estate* yang berlokasi di Nagahuta. Pasca kemerdekaan Indonesia, terutama sejak tahun 1954 lokasi rumah sakit ini dikuasai oleh institusi HKBP dan dirubah menjadi kampus Universitas HKBP Pematangsiantar. Sejak pengalihan kepemilikan itu, rumah sakit dinonaktifkan dan diganti menjadi kampus Nomensen yang mengelola

perguruan tinggi, sekolah pendeta maupun persekolahan SMP dan SMA.



Gambar 62. J.J. van Lonkhuyen, Direktur Siantar Central Hospital, 1925. Sumber: kitlv.nl

Salah satu rumah sakit (*krankenhaus*) ataupun hospital yang berdiri di Pematangsiantar adalah *Siantar Central Hospital* atau sering disebut *Krankenhaus van Gemeente Siantar*. Rumah sakit ini dikelola oleh Pemerintah Kota Siantar yang diperuntukkan bagi kawula (penduduk) Kota Siantar. Lokasinya berada di jalan Merdeka Siantar yang tidak jauh berada dari *Central Market* (Pusat Pasar) Horas Pematangsiantar.

Lokasi rumah sakit ini sangat luas yang memanjang dari Jalan Merdeka di sebelah barat hingga Jalan Panei di sebelah timur. Di dalam kompleks rumah sakit ini terdapat ruang rawat inap bagi warga kota. Demikian pula terdapat laboratorium Paru-paru serta Laboratorium penyakit tropis seperti Malaria, Beri-beri, Anemia dan lain-lain. Termasuk ruang direktur rumah sakit, kepala-kepala staf (biro), dokter,

perawat dan karyawan lainnya. Pada tahun 1925, Direktur Rumah Sakit ini adalah J.J. van Lonkhuyen (pada gambar menggunakan tongkat).



Gambar 63. RSUD Djasamen Saragih di Siantar, 2020

Sumber: Dok. Penelitian 2020

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1958 rumah sakit ini di Nasionalisasi menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat-II Kota Siantar yang disebut dengan Rumah Sakit Umum Kota Siantar. Sejak tahun 2003, nama rumah sakit ini diberi nama Djasamen Saragih yakni Dokter Pertama Orang Simalungun, tewas terbunuh tahun 1947, putra Djaudin Saragih, seorang *Pangulu Balei* (Sekretaris) Kerajaan Siantar. Foto ini memperlihatkan keberadaan sebuah rumah sakit yang disebut dengan Rumah Sakit Pusat Simalungun atau *Simalungun Central Hospital*. Lokasinya berdampingan dengan *Siantar Zoo*

(Taman Hewan Siantar). Pada mulanya, rumah sakit ini dibangun oleh Pengusaha Perkebunan *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)* yang memiliki perkebunan paling luas di Siantar Simalungun dengan berbagai komoditas perkebunan seperti Teh, Karet, Kelapa Sawit, Kopi maupun Sisal.

Lokasi rumah sakit ini berada di *Weltreveden* atau Pemukiman orang Eropa (*Europeanwijk*) di Siantar yang berlokasi di sekitar Jalan Simbou Na Bolon yang kini lebih sering disebut Jalan Simbolon, Pematangsiantar. Beberapa bangunan yang terdapat di lokasi rumah sakit ini seperti tertulis pada *Peta Infrastruktur gemeente Siantar* tahun 1926 disebut antara lain: kediaman direktur *Central Hospital Siantar*, 39) rumah direktur sekolah *Central Hospital SDF*, sekolah perawat pribumi *Central Hospital SDF*, Kantor Kepala *Central Hospital SDF*, kediaman Kepala *Central Hospital SDF*, dan administrasi *Central Hospital SDF*.



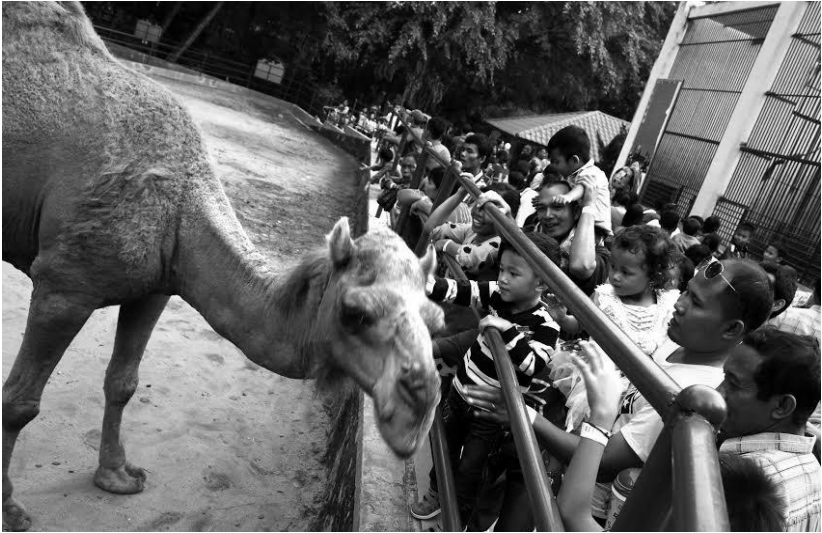
Gambar 64. Simalungun Central Hospital (RSU Tentara) Siantar, 1935. Sumber: Kitlv.nl

Sejak Indonesia merdeka, dan sejalan dengan Nasionalisasi Aset Belanda tahun 1958, maka rumah sakit ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dikuasai oleh militer. Hingga kini, rumah sakit masih berjalan sebagaimana mestinya yang disebut dengan Rumah Sakit Umum Tentara di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kota Pematangsiantar. Tidak jauh dari *Simalungun Central Hospital* atau kini disebut Rumah Sakit Umum Tentara di Siantar, terdapat Taman Hewan (*Siantar Zoo*).



Gambar 65. Siantar Zoo, 2020
Sumber: Dok. Penelitian 2020

Taman Hewan ini terbuka untuk umum dan dibuka setiap hari. Koleksi yang menjadi kebanggaan Taman Hewan ini adalah aneka satwa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Harimau, Orangutan, Buaya, Gajah, Monyet, Unta, aneka Reptil, aneka Burung dan Unggas, aneka Mamalia, dan lain-lain. Pada akhir pekan (*weekend*) ataupun libur lebaran, natal dan hari besar keagamaan lainnya, *Siantar Zoo* selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dari dan disekitar Siantar. *Siantar Zoo* ini dikelola pihak Swasta yakni seorang pengusaha di Medan yang bernama Rahmad Shah, yang juga pemilik *Rahmad Worldwide Museum and Gallery*. Keberadaan *Siantar Zoo* di Kota Pematangsiantar ini menambah deretan destinasi kunjungan wisata di kota itu.



Gambar 66. Hewan Unta di Siantar Zoo
Sumber: Dok. Penelitian, 2020.

Taman hewan Siantar (*Siantar Zoo*) ini berada di lokasi yang berbukit-bukit sehingga menambah keasrian dan keindahan penakaran hewan ini. Aneka kayu dan bambu tersedia sehingga menambah kesejukan. Selain itu, terdapat aneka permainan seperti ayunan, perosotan ataupun tempat bersantai lainnya untuk memanjakan pengunjung. Lokasinya berada di tempat strategis yang termasuk pada inti kota (jantung) Kota Pematangsiantar. Dari Pusat Pasar Horas dapat ditempuh berjalan kaki menuju Kebun Bunga dan seterusnya ke Lapangan Merdeka. Dari lapangan ini terus berjalan menyusuri Jalan M.H. Sitorus dan seterusnya hingga ke Taman Hewan Siantar.



Gambar 67. Grand Siantar Hotel, 1930

Sumber: kitlv.nl

Perkembangan Siantar yang begitu pesat sejak tahun 1908, sejalan dengan pembukaan perkebunan maupun penetapan menjadi *Gemeente* sejak tahun 1917, maka Siantar bertumbuhan sarana hiburan seperti Kolam Renang, Bioskop, Alun-alun dan termasuk hotel. Terdapat beberapa hotel di Siantar seperti *Grand Siantar Hotel* (di *Stationweg*), *Orange Hotel* (di jalan Bandung) dan *Juliana Hotel*. Hotel yang paling ramai adalah *Grand Siantar Hotel*. Ditempat ini tersedia penginapan, hiburan berupa musik dan fasilitas dansa, serta cafe. Pada revolusi fisik tahun 1947, Siantar Hotel pernah menjadi sasaran amuk laskar karena menjadi markas tentara Belanda yang disebut dengan '*Penyerangan Siantar Hotel*'.

Pada saat itu, kesatuan laskar tentara di Siantar Hotel karena tentara Belanda tidak juga meninggalkan Siantar walaupun Indonesia sudah membacakan proklamasi

kemerdekaannya tahun 1945 di Jakarta. Kini, *Grand Siantar Hotel* dimiliki oleh pengusaha Siantar dan tetap mengoperasikan hotel sebagaimana pada era kolonial Belanda. Hotel ini menjadi salah satu *landmark* Siantar. Selain *Grand Siantar Hotel* terdapat *Juliana Hotel* berkedudukan di Siantar, tidak jauh dari Sungai (Bah) Bolon yang berhadapan dengan barak militer (kini Markas Brimob) Kota Pematangsiantar. Hotel ini bersebelahan dengan Pabrik Es Siantar. Nama Juliana diambil dari putri Beatrix yakni Ratu Belanda. Juliana lahir pada tahun 1939 di Negeri Belanda. Kini, hotel ini beralih nama menjadi *Riatur Inn* dan hingga kini tetap berfungsi sebagai hotel yang menyediakan penginapan bagi pengunjungnya.



Gambar 68. Orange Hotel di Siantar 1935

Sumber: kitlv.nl

Hotel lainnya yang tersedia di Siantar adalah *Orange Hotel*. Hotel ini berada di Jalan Bandung yang kini menjadi bagian dari Hotel Garuda di Siantar. Nama *Orange* adalah merujuk pada warna khas Belanda sebagaimana tampak pada bendera kebangsaan mereka. Pada saat ini, di Kota Pematangsiantar terdapat hotel bercorak modern selain Siantar Hotel seperti *Sapadia Hotel*, *Horison Hotel* dan lain-lain yang berada pada kualifikasi bintang tiga. Keberadaan hotel-hotel ini menambah semarak Kota Siantar sebagai daerah transit di Provinsi Sumatera Utara terutama yang hendak berkunjung ke pantai barat Sumatera Utara.

Sama seperti di Medan, maka Siantar juga memiliki taman bunga. Taman ini sengaja dibuat di inti kota sebagai taman kota yang berfungsi bukan saja menambah keindahan kota tetapi yang terpenting adalah memberikan kesejukan bagi udara di pusat kota. Sebagaimana diketahui bahwa, di sekitar taman bunga terdapat bangunan-bangunan penting seperti Balai kota (*gemeentehuis*), Balai DPRD Kota (*gemeenteraad*), *de Javasche Bank* (Bank Java), *Simalungun International Club*, *Grand Hotel Siantar* maupun *Rex Bioskop*. Karena itu, keberadaan taman bunga ini akan menambah keindahan pusat kota Siantar. Pada saat ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pematangsiantar sedang gigih mengembangkan taman ini menjadi tempat tongkrongan asik di Siantar.



Gambar 69. Kebun Bunga (*Alun-alun*) Siantar, 1930
Sumber: kitlv.nl

Di taman ini terdapat monumen menjulang tinggi berarsitektur Simalungun. Disekitarnya, terdapat permainan anak-anak, kursi beton dan jajanan. Di dekat *Simalungun International Club* atau kini Gedung Juang Nasional, terdapat pelataran Parkir Pariwisata yang diprioritaskan bagi pertunjukan budaya seperti lagu, opera, tarian, maupun atraksi lainnya. Di depan pelataran parkir ini terdapat monumen Becak yang didaulat sebagai salah satu ikon (*icon*) kota Pematangsiantar.

Monumen ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi pada tahun 2013 atas inisiatif Rizal Ginting, seorang penggemar dan kolektor barang dan kendaraan antik termasuk Becak. Becak Siantar memiliki karakter sendiri dan menjadi ikon kota Siantar. Mesinnya disebut BSA atau singkatan *Birmingham Small Army* yakni kendaraan militer tentara Inggris yang berasal dari pabrik mesin di Brmingham, Inggris. Pada mulanya, kendaraan ini digunakan sebagai kendaraan perang dan patroli tentara Inggris di Siantar. Namun, sejak penyerahan kedaulatan tahun 1949, kendaraan ini banyak ditemukan di Siantar.



Gambar 70. Sisi lain alun-alun Kota Siantar, 1935

Sumber: kitlv.nl

Oleh masyarakat Siantar kala itu, kendaraan itu diperbaiki menjadi becak. Hingga kini, nama kendaraan ini lebih identik dengan sebutan '*Becak Siantar*', yang mirip dengan *Motor Gede (Moge)* tetapi memiliki bak penumpang di sampingnya. Becak Siantar menjadi salah satu daya tarik pengunjung yang datang ke Pematangsiantar. Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah yang disebut dengan *Esplanade*. Konsep ini berarti 'Lapangan Terbuka' atau dalam bahasa Indonesia disebut *Alun-alun*. Dalam Tata Ruang Kota yang dibentuk di era kolonial Belanda di seluruh kota di Indonesia, maka *Alun-alun* ataupun *Esplanade* serta Taman Bunga pasti ditemukan.

Alun-alun diperuntukkan bagi upacara kenegaraan maupun karnaval budaya. Keletakan '*Alun-alun*' di era kolonial pasti berdekatan dengan *Gemeentehuis* ataupun

stasiun Kereta Api maupun Bank serta Kantor Pos. Sesungguhnya perencanaan seperti ini di berbagai kota di Indonesia adalah mencontoh Tata Kota di Eropa. Peruntukannya jelas bertujuan bagi masyarakat kota yang ingin menghabiskan waktunya menjelajahi kota atau sekedar bermain di kota. Sejak Merdeka, *Esplanade* di rubah menjadi *Lapangan Adam Malik* guna menghargai Adam Malik, Wakil Presiden di era Soeharto yang berasal dari Siantar.



Gambar 71. Ayer Bersih Maatschappij, Siantar 1922
Sumber: kitlv.nl

Sejalan dengan penetapan Siantar menjadi *Gemeente* (Kota) tahun 1917, maka diperlukan kebutuhan air bersih bagi kawula kota. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda di Siantar membangun jaringan air bersih sejak tahun 1921. Perusahaan air ini disebut *NV. Ayer Bersih Maatschappij*. Sumber air yang digunakan sebagai air bersih bagi warga kota saat itu berasal dari hulu Sungai (bah) Bolon yang berada di

Nagahuta. Di hulu itu, Sungai (bah) Bolon berasal dari hutan yang ditumbuhi kayu tropis di *Bah Nalihou* (Aek Nauli).



Gambar 72. Pisanisasi Air Bersih di Siantar, 1930

Sumber: kitlv.nl.

Pipanisasi dibangun sebagai saluran air ke Siantar. Pemerintah kota Siantar pada saat itu, juga membangun bak mandi umum yang dikhususkan bagi warga kota. Hal ini sejalan dengan instruksi *Gubernur Jenderal Belanda di Batavia* yang mengharuskan pengadaan air bagi warga kota. Kini, *NV. Ayer Bersih Maatschappij* dikelola oleh Pemko Siantar yang disebut PDAM Tirtauli Pematangsiantar.



Gambar 73. *Density Kantoor van Siantar*, 1934

Sumber: kitlv.nl

Density kantoor van Siantar adalah kantor kota yang khusus mewadahi penduduk (kawula) kota. Kantor ini terletak di Jalan Sutomo yang berdampingan dengan Gemeentehuis (Kantor walikota Siantar). Pada era Belanda, kantor inilah yang melakukan sensus (*volkstelling*) penduduk seperti pada tahun 1930. Jika sekarang, kantor ini identik dengan *Biro Pusat Statistik* yang mengeluarkan komposisi demografi dengan berbagai indikatornya. Kantor ini mengeluarkan laporan berkala bersifat tahunan tentang keadaan penduduk kota dari segi populasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Dari kantor ini pulalah muncul kebijakan-kebijakan pemerintah kota guna mengembangkan kebijakan populis di kota Siantar. Pemukiman-pemukiman berbasis etnik seperti Kampung Jawa, Kampung Karo, Kampung Mandailing,

Kampung Toba, Kampung Simalungun, termasuk pekuburan berbasis religi adalah kebijakan yang diteruskan oleh kantor ini. Kenyataan seperti ini ditempuh pemerintah kota guna membatasi paguyuban etnik yang bisa berdampak pada ketegangan antar masyarakat di Kota Siantar. Hingga kini, bangunan berarsitektur *art deco* ini masih berdiri megah di Pematangsiantar yang difungsikan sebagai kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar.



Gambar 74. Museum Simalungun di Siantar, 2020
Sumber: Dok. Penelitian 2020

Museum Simalungun ini menjadi salah satu Landmark atau Ikon Kota Pematangsiantar. Museum ini dibangun pada tahun 1939 dan diresmikan pada tahun 1941. Inisiator pembangunan museum ini adalah Dr. Petrus Voorhoeve, seorang ahli Linguistik dari Leiden University Belanda. Biaya pembangunan museum ini berasal dari 7 (tujuh) Kerajaan Simalungun sebesar 1.600 Gulden. Bangunan berarsitektur

Simalungun ini beratap ijuk, dinding kayu dan tiang galang yang terbuat dari kayu gelondongan. Adapun koleksi museum ini adalah temuan-temuan artefak dari tujuh Kerajaan Simalungun berupa arca (patung), *laklak*, *hiou*, maupun benda-benda kebudayaan artefaktual lainnya.



Gambar 75. Museum Simalungun tahun 1939

Sumber: kitlv.nl

Dalam buku *Pedoman Museum Indonesia* (2014) disebut bahwa Museum Simalungun termasuk diantara 6 (enam) museum di Indonesia yang dibangun pada era kolonial Belanda sekaligus museum pertama di Sumatera Utara. Hingga kini, museum yang beralamat di Jalan Sudirman Pematangsiantar ini masih berdiri tegak dan dapat dikunjungi setiap hari.



Gambar 76. Avalokitesvara Buddhist Monastery Pematangsiantar. Salah satu destinasi kunjungan yang terbuka bagi masyarakat umum di Kota Pematangsiantar

Sumber: Dok. Penelitian, 2020

BAB V
KOTA PERKEBUNAN
DAN MODERNISASI SIANTAR

Hingga tahun 1938, sepertiga tanah Simalungun sudah menjadi perkebunan dari total luas Simalungun 151.295 hektar. Dalam laporannya, J. Tideman (1921) menyebutkan 120.000 hektar tanah di Simalungun sudah dijadikan tanah konsesi perkebunan yang diberikan kepada 46 pengusaha perkebunan. Di antaranya 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, 10 perkebunan campuran (karet, teh, kopi dan kelapa sawit). Selain perusahaan yang disebutkan di atas, di Simalungun (khususnya di Siantar), hak konsesi diberikan kepada *Het Nederlandsch Indisch Landsyndicaat, de MARIHAT Sumatra Plantage Cy, The Good Year Tire and Rubber Co.*



Gambar 77. Kebun Karet dan Kopi Robusta di Siantar, 1920

Sumber: kitlv.nl

Demikian halnya di Siantar. Perkebunan yang menjadi penyokong Siantar telah jatuh kepada pengusaha Belanda dan macangera seperti *HVA*, *Goodyear* dan *Londsum* dan lain-lain. Eksistensi perkebunan inilah yang pada akhirnya menopang dan mendukung Siantar menjadi kota majemuk (*plural society*) dan multi budaya (*multiculture*) karena tingginya arus urbanisasi ke Siantar. Perkembangan pesat yang dialami Siantar sejak tahun 1885 (dan resminya sejak 1907) hingga 1915 membuat pemerintah kolonial menetapkan Siantar sebagai Ibukota *Afdeling* Simalungun tahun 1913 sekaligus menetapkannya menjadi *Gemeente* (kotapraja) tahun 1917. Siantar adalah kota Perkebunan (*Plantations Citys*)



Gambar 78. Konversi lahan menjadi perkebunan, 1925
Sumber; kitlv.nl

Sebelumnya, tanah-tanah di lokasi *partuanon* Siantar yakni Kota Padang (Tebingtinggi) maupun beberapa *partuanon* di kerajaan Dolog Silou (kerajaan marga Tambak) khususnya yang berbatasan dengan Melayu Serdang Bedagei sejak tahun 1885 telah direbut pemerintah kolonial guna ditanami komoditas perkebunan. Singkatnya, sejak tahun 1906 yakni tahun dimana Sang Na Ualuh Damanik di buang ke Bengkalis, maka sejak itu pula seluruh tanah-tanah di Simalungun jatuh ke tangan pemerintah kolonial. Pemberian yang disebut dengan: '*Hibah, Anugerah, dan Pemberian*' ini ditandai oleh penandatanganan *Korte Verklaring* (Pernyataan Pendek) pada tahun tanggal 16 Oktober 1907 oleh seluruh Raja dan *Partuanon* di Simalungun (Damanik, 2015).

Sejak saat itu, tanah-tanah di lokasi kerajaan ini jatuh kepada pemerintah kolonial yang diberikan kepada sejumlah pengusaha seperti perusahaan perkebunan milik *Handels Vereeniging Amsterdam (HVA)* yakni perusahaan terluas di Siantar Simalungun yang mengelola: 4 (empat) unit komoditas Serat (Sisal) di Dolog Ilir, Laras, Bah Djambi dan Bandar Betsy, 5 (lima) unit Kebun Kelapa Sawit yakni di Tindjowan, Dolog Sinumbah, Pagar Djawa dan Tonduhan di Simalungun serta Bulu Blang Ara, 3 (tiga) unit Kebun Teh yakni di Balimbingan dan Sidamanik (Simalungun) serta Kayu Aru serta 4 (empat) unit Kebun Karet seperti di Bangun (Simalungun) serta Gohor Lama, Ayer Jambu, Pulau Tiga.

Selain itu, perusahaan HVA juga mengelola Rumah Sakit (*hospital*) Balimbingan serta sekolah berasrama (*boarding school*) yang disebut dengan *Internaat voor Schoolgande Kinderen* di Pamatang Siantar (kini disebut Taman Asuhan) serta sejumlah poliklinik di perkebunan. Pada tanggal 27 Desember 1958, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 86

tentang *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia* dan HVA ini dialihkan menjadi aset Indonesia yang dikelola dibawah PTPN-IV



Gambar 79. Planters di perkebunan kopi Siantar, 1930
Sumber; kitlv.nl

Selanjutnya, terdapat perusahaan non Belanda seperti *Harrison and Crosfield* (kini London Sumatera atau Lonsum) yang berpusat di London, Inggris yang bergerak pada komoditas utama seperti teh dan karet. Perusahaan ini masuk ke Sumatera di Medan sejak tahun 1906 dan mendapatkan konsesi tanah di Simalungun sejak tahun 1907. Perusahaan ini bergerak pada dua komoditas utama yakni karet (*rubber*) dan teh (*tea*). Perusahaan ini pernah diambilalih sesuai kebijakan Nasionalisasi 1958, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya pada tahun 1962.

Di *Bah Lias* Simalungun, Lonsum mengoperasikan komoditas Kelapa Sawit, sedangkan di *Bah Bulian* mengoperasikan komoditas Kelapa Sawit, Coklat dan Kelapa. Sejak bulan Oktober 2007, *Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri)*, anak perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk di bidang perkebunan, menjadi pemegang saham mayoritas di Lonsum.



Gambar 80. Perkebunan teh di Siantar, 1920

Sumber: kitlv.nl

Selain itu, terdapat perkebunan *Bridgestone Sumatra Rubber Estate*. Sejak tahun 2005 sahamnya di kuasai Jepang. Sebelumnya, *Bridgestone Sumatera Rubber Estate* bernama *Goodyear Sumatra Plantation* yang berdiri di Dolog Merangir dan Dolog Ulu (Simalungun) dan Aek Nabara (Labuhanbatu), Nagaraja (Serdang Bedagei) sejak 1917 dan merupakan anak

perusahaan *The Goodyear Tire and Rubber Company* yang berpusat di Ohio, Amerika Serikat sejak 1898.

Pada tahun 1964, *Goodyear Sumatra Plantation* diambilalih Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1964, namun pada tahun 1967 dikembalikan kepada pemiliknya. Kebun Dolog Merangir dan Dolog Ulu diusahai berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 3/HGU/DA/80 dan telah memperoleh perpanjangan selama 25 tahun sesuai SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 117/HGU/BPN/1997 tanggal 16 September 1997 seluas 11.226,38 Hektar.



Gambar 81. Perkebunan Kelapa Sawit di Siantar Estate, 1930
Sumber: kitlv.nl

Perusahaan lainnya yang bergerak di komoditas Kelapa Sawit dan Karet adalah RCMA yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1924. Di Gunung Bayu, Bosar Maligas, Simalungun, RCMA mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sedangkan di Dolog Batu Nanggar, RCMA mendirikan Pabrik Karet, tetapi

sejak 1958 pabrik karet ini telah dibongkar sejalan dengan konversi karet ke kelapa sawit. Perusahaan *Rubber Cultuur Matschappij Amsterdam (RCMA)* diambilalih menjadi milik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia No. 24 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi milik Belanda. Kini, PKS Gunung Bayu dikelola PTPN-IV di Indonesia. PKS Gunung Bayu dahulunya bernama *NV. RCMA* ini mengoperasikan 10 *afdeeling* perkebunan diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 21/HGU/BPN/2003 tertanggal 14 Maret 2003 seluas 8.479, 83 hektar tanah.



Gambar 82. Planters di perkebunan Teh Nagahuta, Siantar, 1925. Sumber: kitlv.nl

Sebagaimana disebut Tideman (1922), komoditas pertama yang ditanam di Siantar-Simalungun adalah perkebunan teh yakni sejak tahun 1908. Masuknya komoditas lain seperti karet, kelapa sawit, sisal dan bahkan coklat telah

mengakibatkan pergeseran lahan di Simalungun menjadi areal perkebunan. Hingga tahun 1938, sepertiga tanah Simalungun sudah menjadi areal perkebunan dari luas total Simalungun 151.295 hektar. Dalam laporannya, Tideman (1922) menyebutkan bahwa 120.000 hektar tanah di Simalungun sudah dijadikan tanah konsesi perkebunan diberikan kepada 46 pengusaha perkebunan. Di antaranya terdapat 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, dan 10 perkebunan campuran (karet, teh, kopi dan kelapa sawit).

Selain perusahaan disebutkan di atas, di Simalungun (khususnya di Siantar), hak konsesi diberikan kepada *Het Nederlandsch Indisch Landsyndicaat, de Marihat Sumatra Plantage Co, The Good Year Tire and Rubber Co*. Tanah-tanah yang dikonsesikan kepada pengusaha perkebunan Belanda maupun non-Belanda seperti Inggris dan Amerika Serikat memang disatu sisi telah menjadi faktor modernisasi kewilayahan di Simalungun, tetapi disisi lain memunculkan sengketa agraria berkepanjangan (Pelzer, 1991). Tanah-tanah yang seharusnya dikembalikan kepada orang Simalungun pasca selesainya *Hak Guna Usaha (HGU)* terutama yang dimiliki Belanda, ternyata tidak pernah kembali kepada mereka. Rezim kolonial Belanda berganti menjadi rejim Indonesia yang tetap mengabaikan pengembalian tanah-tanah milik ulayat orang Simalungun itu (Damanik, 2017). Kenyataan inilah yang kerab menimbulkan unjuk rasa bahkan protes kepada 'negara' (*state*) maupun sejumlah perusahaan perkebunan lainnya di Simalungun.

Sejak tahun 1907, wilayah (teritorial) Simalungun mengalami perkembangan yang sangat cepat khususnya terkait dengan pembukaan perkebunan milik kolonial. Dalam perkembangan itu, Siantar-Simalungun memperoleh jaringan

jalan yang baik. Jalur kereta api sepanjang 58 km dibuka tepat pada tanggal 5 Mei 1916. Pada tahun 1920 sebuah cabang kecil dibuka menuju pabrik serat di Lima Laras (Batubara) agar dengan mudah dapat mengangkut produk perkebunan ini melalui Dolog Merangir, yang terletak di tengah perjalanan ke Tebing Tinggi.



Gambar 83. Pabrik pengolahan Teh di Balimbingan, 1925
Sumber: kitlv.nl

Jalur Tebing Tinggi-Siantar bukan merupakan salah satu jaringan jalan kereta terpendek, terbukti dari statistik dalam laporan Perusahaan Kereta api Deli (*Deli Spoorweg Matschappij*). Pada 15 kilometer pertama dari Pematang Siantar, jalan ini memotong 8 jalur air penting, yakni Bah Bolon, saluran dari Bah Korah, Bah Biak, Bah Buldakbuldak, Bah Sapuran, Bah Hilang, Bah Birong dan Bah Kasindir. Selanjutnya, ada beberapa selokan dan sebuah jembatan indah yang di bangun melengkung di atas kolam air di depan Parapat. Ketika melewati tempat ini akan dijumpai jembatan di atas Binanga Sorasora dan Mursahan

Lahan yang cenderung datar dan komposisi tanah yang sangat cocok untuk perkebunan di Siantar-Simalungun adalah dengan komoditas Teh, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Sisal (Serat) maupun Coklat. Aneka komoditas ini menjadi unggulan Kota Siantar pada saat itu dan menjadi salah satu faktor Kota Pematangsiantar bertumbuh menjadi Kota Perkebunan (*plantation city*) dan menjadi bagian integral dari *Cultuurgebid van Sumatra Ooskust* (perkebunan Sumatra Timur). Salah satu komoditas unggulan tersebut adalah teh (*tea*) yang banyak dikembangkan oleh *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)* seperti di Mardjandi Estate, Sidamanik Estate dan Kasindir Estate. Perkebunan ini menghasilkan bubuk (serbuk) teh yang sangat baik dan diekspor ke Amsterdam guna di pasarkan di Eropa.



Gambar 84. Perempuan di pabrik teh Sidamanik
Sumber: kitlv.nl

Pabrik pengolahan bubuk teh ini terdapat di Marjandi, Sidamanik, Bah Butong, Tobasari serta Kasindir. Namun saat ini, sebagian dari lokasi perkebunan ini telah di konversi ke Kelapa Sawit. Sejak Nasionalisasi 1958, HVA menjadi milik Indonesia dibawah perusahaan perkebunan negara yang disebut dengan PTPN-IV.

Selain perkebunan teh, terdapat jenis perkebunan lain di Siantar yakni perkebunan Karet. Jenis perkebunan ini banyak di kembangkan di *Martoba Estate*, *Siantar Estate* terutama oleh *HVA*, *Harison and Crosfield* (Londsum) maupun *Goodyear* ataupun *Brigestone*. Perusahaan ini berasal dari mancanegara seperti Belanda, Inggris, Amerika dan Jepang. Hingga kini, beberapa perusahaan ini masih berdiri dan bertahan di Indonesia. Kecuali aset HVA karena milik Belanda, maka perusahaan yang bukan milik Belanda tidak ikut serta di nasionalisasi pada tahun 1958, di saat Presiden Soekarno memerintahkan pengambilalihan seluruh aset-aset pemerintah dan pengusaha kolonial Belanda guna memperbaiki perekonomian Indonesia.



*Gambar 85. Planter di perkebunan karet Martoba
Sumber: kitlv.nl*

Keberadaan perkebunan milik asing ini menyumbang Siantar sebagai Kota Perkebunan yang terus melanjut hingga dewasa ini. Keberadaan itu ialah daya dukungnya sebagai pembayar pajak bagi Pemerintah setempat. Foto di bawah ini adalah perkebunan Kelapa Sawit milik *HVA* di daerah Bangun, berdekatan dengan Dolog Malela, Siantar. Kelapa sawit untuk kali pertama di kembangkan di Siantar oleh *HVA* setelah sebelumnya hanya dijadikan sebagai tanaman hias di rumah-rumah *tuan keboen (panthers)* di Medan. Namun, penyelidikan terhadap minyak yang dihasilkan dari jenis kelapa ini membawa kesimpulan untuk dikembangkan secara massif. Karena itulah, akhirnya kelapa sawit dikembangkan secara massif terutama di Siantar-Simalungun dimana

komposisi tanahnya sangat cocok untuk jenis budidaya ini. Komoditas inipun telah mendukung peneguhan Siantar sebagai kota perkebunan atau *Plantation City*.



Gambar 86. Perkebunan sawit di Sarbelawan

Sumber: kitlv.nl

Keberadaan perkebunan-perkebunan yang berada di sekitar Kota Pematangsiantar ini sangat cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata lewat Wisata Agro. Hal ini karena perkebunan yang menjadi komoditas unggulan Indonesia dewasa ini perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya guna memberikan pemahaman kuat bagi generasi muda.

Untuk mendukung Wisata Agro ini, maka Pemko Siantar melalui Dinas Pariwisata perlu menjalin kerjasama dengan pengelola perkebunan baik pemerintah maupun swasta. Di lokasi perkebunan itu, para pengunjung diperkenalkan

berbagai hal mulai dari tanaman, pengolahan, hasil ataupun pabrik serta aneka jenis pangan yang dihasilkan dari produk budidaya itu. Demikian pula kepada mereka diberikan kepengatahuan bahwa perkebunan itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional Indonesia.

WISATA AGRO DI SIANTAR SEKITARNYA



Kelapa sawit

Sumber: Dok. Penelitian 2020



Perkebunan teh

Sumber: Dok. Penelitian 2020



Perkebunan karet
Sumber: Dok. Penelitian 2020

Dewasa ini, Kota Pematangsiantar disebut salah satu sebagai '*Kota Toleran*' (*the most of tolerance city*) di Indonesia. Indikator dari sebutan ini didasarkan pada minusnya konflik horisontal antar sesama pemeluk agama yang berlainan. Demikian pula, jika melihat pendirian rumah ibadah, maka tidak heran jika rumah ibadah dari agama yang berbeda dapat berdiri berdampingan. Bibit-bibit toleransi ini telah ditanamkan sejak era Sang Nauluh Damanik tampil sebagai pemimpin di Swapraja Siantar sebelum ia ditangkap dan di makzulkan dari singgasana kekuasaannya oleh Belanda.

Sebagaimana diketahui bahwa, Sang Nauluh Damanik menerima agama Islam sejak tahun 1902. Walaupun ia telah menganut agama Islam, tetapi ia tetap memberikan izin bagi pendirian rumah ibadah berupa Gereja maupun sekolah yang dikelola gereja oleh RMG Jerman maupun Yayasan Gereja

Belanda. Bukan saja mengizinkan, tetapi juga menunjuk lokasi pendirian gereja, sekolah dan pemakaman bagi pemeluknya di sekitar Jalan Gereja Pematangsiantar.

Demikian pula Sang Naualuh Damanik memberikan ijin pendirian rumah ibadah berupa Masjid di Kampung Timbang Galung, serta memberikan lokasi pekuburan Muslim di Jalan Panei, Pematangsiantar. Hal lainnya adalah bahwa Sang Naualuh Damanik memberikan ijin pendirian pembangunan Klenteng atau vihara khususnya bagi orang Tionghoa di Jalan Panei, berdekatan dengan Kampung Pamatang di Siantar.



Gambar 87. Kuil Budha di Siantar

Sumber: kitlv.nl

Masuknya agama di Siantar-Simalungun berdampak pada dua hal: *pertama* merubah keyakinan orang Simalungun dari

religi asli *habonaron* ke agama Islam yang dominan di Simalungun bagian bawah, *kedua* berkembangnya agama Kristen Protestan pada masyarakat Simalungun di bagian atas. Keadaan ini berimplikasi pada kerajaan-kerajaan Simalungun seperti Kerajaan Siantar, Tanoh Djawa dan Dolog Silou yang menganut agama Islam sedangkan Kerajaan Panei, Raya, Purba dan Silimahuta menganut agama Kristen.

Di wilayah Siantar-Simalungun, agama Islam pertama sekali masuk di bagian bawah Simalungun terutama daerah Bandar yang berbatasan langsung dengan masyarakat Melayu. Perkembangan Islam di Simalungun seperti di wilayah kerajaan Siantar dan Tanoh Djawa dimulai sejak akhir abad 19. Di Siantar, penyiar Islam yang utama adalah Syech Yusuf dan Muhammad Thaib yang berasal dari Siak, Riau. Demikian pula pada tahun 1919, seorang Simalungun bernama Basyir Saragih telah menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Di Siantar-Simalungun, agama Protestan di siarkan dan di kembangkan August Theis sejak tahun 1903. *Zendeling* ini tiba di Tigaras dan mendaki perbukitan hingga sampai di daerah Raya. Dari daerah inilah agama Kristen Protestan disiarkan bagi orang Siantar-Simalungun dan terus berkembang hingga saat ini (Dasuha dan Sinaga, 2003). Sementara itu, agama Katolik masuk ke Simalungun sejak tahun 1933 dari arah Siantar, lalu ke Haranggaol hingga ke Silimahuta. Di daerah ini, adapun penggiat-penggiat agama Katolik adalah seperti Elpidius Van Duijnhoven yang dikenal dengan panggilan *Oppung Dolog* (Saragih, 2014).



Gambar 88. Gereja Protestan (HKBP) jalan Gereja

Sumber: kitlv.nl

Foto di atas adalah bangunan *RMG Kerk* atau *Gereja Rheinische Missiongesellschaft* yang kini dikenal dengan sebutan Gereja HKBP berlokasi di Jalan Gereja, Siantar Selatan. Lokasi pembangunan gereja ini adalah atas rekomendasi Sang Naualuh Damanik tahun 1904 sebelum ia ditangkap dan dimakzulkan sebagai penguasa lokal di Siantar. Gereja ini merupakan gereja pertama di Siantar pasca penyebarluasan injil dari Tarutung ke 'Tanah Timur' (*Timor landend*) terutama di Siantar. Di belakang gereja ini terdapat pemakaman Kristen yang ditetapkan pasca pembentukan *Gemeente* Kota Siantar tahun 1917. Salah satu penguasa lokal dari Kerajaan Raya, dimakamkan di lokasi pemakaman Kristen ini.

Sebagaimana di ketahui, di era pemerintahan *Gemeente* Siantar, ditetapkan lokasi pemakaman seperti Tionghoa di Jalan Panei, pemakaman Islam di Jalan Panei, dan pemakaman Kristen di Jalan Gereja. Sementara itu, pemakaman orang Eropa dilakukan di Jalan Asahan, yang kini dikenal dengan '*Taman Makam Pahlawan Nagur*' Siantar. Di samping gereja ini, terdapat *RMG School* (Sekolah RMG) yang dikhususkan bagi anak-anak pribumi (*native*) sebagai cara pembangunan fisik anak-anak Misi RMG di era kolonialisme Belanda dan pekerjaan *zending* RMG.

Pada saat ini, lokasi bangunan berupa gereja dan sekolah serta pemakaman menjadi milik institusi HKBP terutama setelah pemisahan (*manjae*) antara institusi Gereja Kristen Protestan Simalungun dari HKBP tahun 1963. Sesudah itu, institusi GKPS membangun gerejanya sendiri yang terletak di Jalan Sudirman Pematangsiantar yang bersebelahan dengan Sungai (Bah) Bolon. Pendirian rumah ibadah ini menjadi tonggak kemandirian GKPS dari HKBP sekaligus menemukali

identitas Simalungun yang berbeda dengan HKBP yakni orang Toba.



*Gambar 89. Gereja Kristen Protestan Simalungun
Jalan Sudirman Pematangsiantar
Sumber: Dok. Penelitian, 2020*

Berdirinya institusi gereja yang bernama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) sejak tahun 1963 dari HKBP, berdampak pada pendirian rumah ibadah berupa GKPS di Jalan Sudirman Pematangsiantar ini. Pada awalnya, di lokasi gereja ini menjadi bagian integral sebagai Kantor Pusat GKPS sebelum pindah ke Jalan J. Wismar Saragih di Kota Pematangsiantar. Lokasi rumah ibadah berdampingan dengan Sungai (*bah*) Bolon yang membelah Kota Pematangsiantar. Rumah ibadah ini berdampingan pula dengan Museum

Simalungun yang dibangun sejak tahun 1939 dan diresmikan pada tahun 1941.

Tidak jauh dari bangunan gereja ini adalah tempat berdirinya rumah ibadah bagi pemeluk agama islam yakni Masjid. Lokasinya berada di Timbanggalung, yakni pemukiman Islam terutama orang Mandailing di Kota Pematangsiantar. Kebhinekaan kota Siantar dari aspek agama dan kepercayaan ini telah membuat kota Siantar tidak saja majemuk dari agama tetapi juga mendukung predikat sebagai *Kota Toleran*.



Gambar 90. Masjid Agung Pematangsiantar

Sumber: Dok. Penelitian, 2020

Kemajemukan agama di Siantar tampak pada hadirnya agama-agama besar di kota ini seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, maupun Kong Hu Chu. Salah satu agama dengan komunitas besar adalah Islam. Agama ini berkembang dan masuk ke Siantar sejak tahun 1902, yang ditandai oleh penerimaan agama Islam oleh Sang Nauluh

Damanik. Untuk mendukung penyebaran agama Islam di Siantar, maka Sang Nauluh Damanik mendukung dengan cara memberikan ijin lokasi pendirian rumah ibadah berupa mesjid di Timbang Galung, tepatnya Jalan Kartini Pematangsiantar. Kini, mesjid itu disebut dengan Masjid Agung Kota Pematangsiantar. Mesjid ini menjadi rumah ibadah kebanggaan warga Siantar khususnya bagi pemeluk agama islam di Kota Pematangsiantar. Keberadaan mesjid di Kota Pematangsiantar ini menjadi penanda kebhinekaan agama di kota ini. Karena wajar apabila kota ini mendapat predikat '*Kota Tolerans*' karena koeksistensi dan minusnya konflik horisontal.



Gambar 91. *Avalokitesvara Buddhist Monastery Siantar*
Sumber: Dok. Penelitian, 2020

Eksistensi komunitas orang Tionghoa yang menganut agama Buddha di Kota Pematangsiantar tampak pada berdirinya vihara yang disebut *Monastery Avalokitesvara Buddhist* di Siantar. Vihara ini berdiri megah di Jalan Panei Kota Pematangsiantar. Sebuah patung perempuan yang disebut dengan *Dewi Kwan Im* berdiri megah dan menjadi patung tertinggi di Sumatera Utara. Pembangunan vihara ini percis berada di lokasi *Chinese Temple* sejak tahun 1920. Dewasa ini, vihara ini menjadi lokasi yang ramai didatangi atau dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberadaan vihara Buddha ini di Kota Pematangsiantar, semakin menambah heterogenitas agama di Siantar. Dengan demikian, eksistensinya sangat mendukung pemberian predikat kota Siantar sebagai *Kota Tolerans* di Indonesia.



Gambar 92. Kuil Shree Guru Nanak Devji Gurdwara
Sumber: Dok. Penelitian, 2020

Eksistensi orang India yang beragama Hindu di Pematangsiantar di tandai oleh berdirinya rumah ibadah berupa Kuil Hindua yang disebut dengan *Shree Guru Nanak Devji Gurdaya*. Bangunan ini berlokasi di Jalan Thamrin No. 50 di Kota Pematangsiantar. Sama seperti orang China (Tionghoa) yang hadir di Siantar, maka orang India juga hadir di Siantar pada saat pengembangan dan perkembangan perkebunan milik kolonial berkembang pesat. Karena kebutuhan tenaga kerja yang cukup tinggi di perkebunan, maka sejumlah pengusaha berupaya mendatangkan karyawan yang disebut dengan *coelie contract* guna dipekerjakan di perkebunan.



Gambar 93. Gereja Rome Katolik Siantar

Sumber: Dok. Penelitian, 2020

Tersebut, pertama kali karyawan yang didatangkan ke Siantar adalah Orang Tionghoa, India dan Jawa pada permulaan tahun 1910 sejalan dengan pembukaan hutan-hutan di Martoba, Nagahuta, Kasindir, Dolog Ilir dan Balimbingan sebagai areal perkebunan. Jumlah mereka ini sangat tinggi sehingga menambah heterogenitas masyarakat termasuk agama di Siantar. Kehadiran Agama Hindu dari komunitas India di Siantar menambah khasanah keberagaman agama di Siantar.



Gambar 94. Retreat Fransiskan di Siantar

Sumber: Dok. Penelitian, 2020

Gereja Rome Katolik (RK) berdiri di Siantar sejak tahun 1920. Penyebaran agama Katolik ini sejalan dengan masuknya penganjur agama Katolik dari Sumatera Utara terus ke Siantar, Haranggaol dan Saribudolok. Di Siantar, bangunan gereja pertama yang dimiliki oleh agama Katolik berlokasi di

Jalan Sibolga, Pematangsiantar. Bangunan ini berlokasi dengan sekolah perguruan RK Cinta Rakyat. Selain itu, beberapa tempat yang dikelola Gereja Katolik adalah seperti tempat *Retreat Fransiskan* Nagahuta Siantar. Juga terdapat *Sekolah Frater* di Sinaksak. Juga rumah sakit yang dikelola Katolik seperti Rumah Sakit Harapan maupun Seminari di Jalan Lapangan Bola, Pematangsiantar. Sekolah lain yang dikelola Katolik adalah seperti Yayasan Perguruan Budi Mulia, Yayasan Asisi, dan lain-lain.



Gambar 95. Parade Mobil Hias dan Karnaval budaya pada perayaan 35 tahun Ratu Wilhelmina di Kota Pematangsiantar tahun 1936

Sumber: kitlv.nl

BAB VI

KOTA MAJEMUK DAN MULTIBUDAYA: MASYARAKAT DI SIANTAR

Kota Pematangsiantar sangat tepat diberi label dengan sebutan *Plural society and multiculture city* atau Kota Majemuk dan Multibudaya. Hal ini karena dukungan kenyataan bahwa hingga dewasa ini terdapat lebih kurang 8 (delapan) kelompok etnik (*ethnic group*) di Kota Siantar. Mereka itu adalah seperti Simalungun (*host population*) dan masyarakat pendatang (*imigrant society*) seperti Toba, Jawa, Tionghoa, Mandailing/Angkola, Karo, Nias, dan India serta lain-lainnya. Masuknya kaum imigran ke Siantar di dorong oleh keinginan bekerja di Perkebunan, berdagang, menjadi pegawai pemerintah, penyebar agama, maupun sekedar mencari penghidupan yang layak.

Pada tahun 1910 sawah-sawah dibuka di daerah Simalungun untuk pertama kalinya. Rumah kaum pendatang mirip dengan gubuk yang terbuat dari bahan alang-alang dan daun-daun. Namun, setelah panen pertama selesai, mereka membangun beberapa rumah dari bahan lebih kokoh dan menjadi pemukiman di daerah pengairan. Akhirnya daerah pemukiman ini berkembang menjadi kampung-kampung yang maju. Menurut sensus pada akhir 1920 terdapat 21.832 orang Toba dan 4.699 orang Mandailing (total 26.531) imigran tinggal di Simalungun.

Pemukim berupa imigran di Siantar-Simalungun terdiri dari berbagai etnik. Imigran di Simalungun untuk beberapa tahun lamanya berada di luar wewenang pemerintah. Kemudian, dibentuk pemukiman orang Jawa disekitar

diibukota Pematang Siantar yakni Pantoan, Jorlang Hataran dan Bandar. Pemukiman orang Jawa terbesar adalah Bandar Jawa yang tidak jauh letaknya dari pusat perdagangan yang berada di daerah irigasi Bandar Meratur.



Gambar 96. Kampung Jawa di Siantar, 1929
Sumber: kitlv.nl

Di Bandar Jawa, imigran pertama tinggal pada tahun 1915. Setiap tahun jumlah imigran meningkat. Mereka adalah kerabat dan kenalan yang bukan hanya berasal dari Pulau Jawa tetapi juga dari Tamiang. Para imigran datang bergabung dengan orang-orang yang telah tinggal di Bandar Jawa. Para imigran memperoleh sebidang tanah untuk dikerjakan dan secara perlahan-lahan pemukiman ini berkembang. Pada tahun 1920, sekitar 800 jiwa tinggal di Bandar Jawa.

Malaise yang terjadi sebagai akibat Perang Dunia I, menyebabkan banyak perkebunan teh dan karet memecat sejumlah besar tenaga kontrak. Dengan tujuan berusaha

menampung sebagian besar kuli kontrak yang dipecat, Gubernur Sumatera Timur pada keputusannya tertanggal 17 Maret 1921 Nomor 203 membentuk *Dana Kolonisasi* yang berasal dari sumbangan penguasa, lembaga dan penyumbang. Pada tahun 1921, sebanyak 200 keluarga ditetapkan tinggal di daerah Pematang Bandar. Mereka bekerja pada lahan kolonisasi seluas 900 hektar di sekitar perkebunan Kerasaan dan Pematang Bandar. Pada akhir September 1921, kampung pertama dibuka di Bandar yang disebut Purwodadi. Pemukim di daerah ini terdiri dari 117 pria, 97 wanita dan 71 anak-anak. Kampung kedua dibuka sebanyak 72 buah persil dengan total pemukim sebanyak 72 pria, 71 wanita dan 58 anak-anak.

Pada tanggal 15 Nopember, kampung kedua telah penuh dihuni. Kolonisasi perkebunan masih belum menonjol di Siantar-Simalungun hingga tahun 1921. Pada tanggal 1 September 1921 di seluruh wilayah Siantar-Simalungun di pekerjakan 136.638 pria dan 47.804 wanita sebagai tenaga kontrak di perkebunan. Sebagian besar penduduk pribumi sebagai kuli kontrak pada awal 1921 berjumlah sekitar 44.000 dari 164.000 jiwa.

Pada tahun itu sebagai akibat resesi di sejumlah perkebunan sebesar 11.000 orang kuli kontrak dipecat dan diambilalih perkebunan tembakau atau di kirim kembali ke Jawa. Di seluruh wilayah Siantar-Simalungun terdapat 24.500 pria dan 20.337 wanita dipecat, termasuk 18.178 pria dan 2.127 wanita dikembalikan ke Jawa. Sementara 4.446 kuli kontrak (kebanyakan pria) diambilalih perkebunan tembakau. Hanya sedikit kuli kontrak yang tinggal di Siantar-Simalungun yaitu wanita yang mencapai 12.000 orang. Di seluruh Siantar-Simalungun terdapat 50 perkebunan. Pada mulanya kuli

kontrak menghadapi kesulitan terutama di bidang kesehatan. Untuk alasan kesehatan ini, Dr. W. J. Bais dikirim sebagai tenaga kesehatan. Pada tahun 1911, angka kematian kuli kontrak mencapai 180 setiap 1000 orang. Penyebab kematian adalah cacangan dan disentri. Di beberapa tempat kematian mereka disebabkan penyakit tipus, kolera dan malaria.

Menurut sensus pada bulan November 1920 di Siantar-Simalungun terdapat 816 orang Eropa, termasuk 479 di Siantar, 172 di Panei, 146 di Tanah Jawa, dan 19 di daerah lain. Menurut etnik dan keturunannya, penduduk Eropa di Siantar-Simalungun tahun 1920 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *European di Siantar-Simalungun tahun 1920*

No	Negara Asal	Laki-laki	Perempuan
1	Belanda	337	219
2	Inggris	55	12
3	Jerman	64	15
4	Jepang	34	31
5	Swiss	26	8
6	Denmark	7	2
7	Amerika	4	-
8	Austria	2	-

Sumber: Volkstelling, 1920.

Sebagian besar orang Eropa hidup di perkebunan. Orang Jepang sebagai pedagang kecil dan pekerja ringan. Di Siantar tinggal 174 orang Eropa dan 28 orang Jepang. Jumlah orang Timur Asing mencapai 10.865 jiwa termasuk 10.122 orang Cina. Diantaranya mencakup 20 orang Arab, sementara 740 orang *Keling* dan Benggala (India). Menurut sensus pada

akhir tahun 1920, jumlah seluruh penduduk Siantar pada akhir Nopember 1920 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penduduk *Gemeente* Siantar tahun 1920

Inlanders		European		Timur Asing	
Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
3347		2749	110		93
6.096		203		3.161	
Jumlah keseluruhan				9.460	

Sumber: Volkstelling, 1920.

Berdasarkan sensus penduduk (*volkstelling*) tahun 1930, penduduk di Kota Siantar adalah seperti tertera di tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah populasi *Gemeente* Siantar, 1930.

Kelompok suku/Bangsa	Jumlah	Persentase
Toba	2.968	19,17
Mandailing	1.279	8,26
Angkola	953	6,16
Simalungun	495	3,20
Karo	267	1,72
Lainnya	92	0,59
<i>Jumlah</i>	<i>6.054</i>	<i>39,10</i>
Indonesia lainnya	3.657	23,63
Cina	4.964	32,06
Eropa	317	2,05
Asia lainnya	490	3,17
<i>Jumlah</i>	<i>15.482</i>	<i>100,0</i>

Sejak budaya Eropa masuk ke Simalungun, jumlah penduduk untuk tiga daerah pertama (Siantar, Tanah Jawa, dan Panei) meningkat tajam. Kepadatan penduduk per km² pada tahun 1912 meningkat dari 13 menjadi 48 tahun 1920. Pemukim Eropa sebagian besar adalah orang-orang yang bekerja di perkebunan, disertai anggota keluarganya. Sebagian besar penduduk pribumi adalah Kuli Kontrak (44.040), sementara orang Timur Asing bekerja diperkebunan sebagai tukang, buruh atau pekerjaan lain.



Gambar 97. Pedagang Tionghoa di Siantar
Sumber: kitlv.nl

Perkampungan pribumi berkembang menjadi tempat besar adalah: Pematang Tanah Jawa, Djorlang Hataran dan Serbelawan. Di antara penduduk pribumi diluar daerah perkebunan terdapat sekitar 20.000 pendatang Jawa dan tenaga kontrak yang tinggal di daerah koloni yang dibentuk pemerintah atau di luarnya, sementara sekitar 26 ribu pendatang dari Tapanuli menghuni Simalungun dan sebagian tinggal di Kampung Kristen.

Jumlah tenaga kontrak tumbuh dari 6.916 pada tahun 1911 menjadi 44.040 pada tahun 1920. Setelah terjadinya *malaise* di perkebunan, ketika perkebunan mulai tumbuh dengan jumlah tenaga kontrak besar, yang sebagian besar membuat kontrak di perkebunan tembakau di daerah lain, sebagian yang jauh lebih kecil sebagai warga bebas tinggal di tanah itu dan sebagian besar lagi kembali ke Jawa, berdampak pada penurunan jumlah tenaga kontrak sekitar 12 ribu orang.



Gambar 98. Buruh Jawa di perkebunan teh Siantar

Sumber: kitlv.nl

Pada tahun 1917, Siantar yang mengalami perkembangan pesat itu ditetapkan sebagai '*kota praja*' (*gemeente*). Salah satu ciri kota Siantar pada era kolonial Belanda adalah terbentuknya perkampungan etnik di Siantar yakni: i) kampung Eropa di sekitar jalan Simbolon, ii) kampung China disekitar stasiun kereta api, iii) kampung Simalungun di

sekitar pematang, dan iv) kampung pribumi islam di Timbanggalung. Sementara itu, diluar kota Siantar terdapat perkempungan etnik lainnya seperti: i) Kampung Toba yakni Kampung Kristen Siantar dewasa ini, ii) Kampung Jawa dan kampung Banjar di sekitar jalan Bali, iii) sementara kampung Simalungun diluar *gemeente* Siantar terdapat di sekitar jalan Asahan yakni kampung Martoba sekarang ini.

Sebagai catatan, luas lahan kota Siantar pada saat ditetapkan pada tahun 1917 ialah 1.040 hektar yang di hibahkan pemangku raja Siantar yakni Riah Kadim Waldemar Damanik (saudara lain ibu dari Sang Nauuluh Damanik). Batas-batas *gemeente* Siantar pada saat itu adalah mulai dari Sungai Bah Bolon di arah timur hingga Stasiun Kereta Api di sebelah Barat. Sedangkan di utara adalah kampung Eropa di jalan Simbolon hingga rumah sakit perkebunan *Pantoan* (kini lokasi Universitas HKBP Siantar).

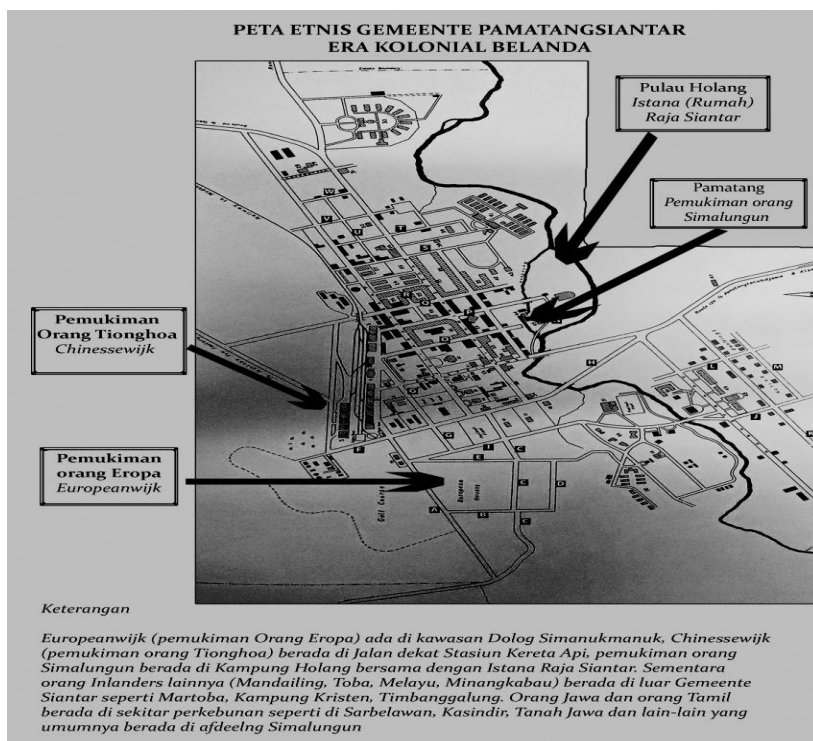


Gambar 99. Ziarah makam bagi orang Tionghoa di Siantar
Sumber: kitlv.nl

Masuknya sejumlah imigran ke Siantar yang mulai terjadi sejak tahun 1907, membuat Siantar ketika ditetapkan sebagai *Gemeente* tahun 1917 merupakan kota majemuk. Masyarakatnya tersusun secara polietnik yakni *plural and multiculture society*. Pemukiman berbasis etnik di Siantar yang terjadi sejak era pekebunan sejak 1907 masih dapat dijumpai hingga saat ini. Keadaan ini menimbulkan nasionalisme etnik (*ethno nationalism*) di mana masing-masing etnik mengembangkan identitas, spirit, kesetiakawanan dan solidaritas berdasarkan etnik masing-masing.

Namun demikian, setiap imigran lokal di Siantar harus tunduk dan diatur peradilan Kerajaan Siantar, sedangkan

masyarakat kota Siantar terutama orang Eropa dan Timur Asing diatur hukum dan peradilan Eropa yang diterapkan di Siantar. Dalam konteks Otonomi Daerah dewasa ini, jabatan struktur Walikota tidak sekedar dimaknai sebagai jabatan politis tetapi juga dimaknai sebagai representasi identitas etnik. Karena itu, setiap walikota terpilih tidak seharusnya memperhatikan distribusi jabatan pemerintahan berdasarkan etnik dan agama. Menurut Damanik (2017) peta pemukiman berbasis etnisitas di Pematangsiantar, sebagai berikut:



Gambar 100. Peta etnis di Kota Pematangsiantar

Sumber: Damanik, 2017

Berikut di bawah ini adalah daftar walikota Pematangsiantar yang memerintah sejak tahun 1945-2018, yaitu:

Tabel 4. Walikota Pematangsiantar sejak 1945-2018

No	Nama Walikota	Periode	Etnisitas
1	Madja Purba	1945-1946	Simalungun
2	O.K.H. Salamuddin	1956-1957	Melayu
3	Jamaluddin Tambunan	1957-1959	Toba
4	Rakkoeta Sembiring	1960-1964	Karo
5	Abner Situmorang	1964	Toba
6	Pandak Tarigan	1964-1965	Karo
7	Zainuddin Hasan	1965-1966	Jawa
8	Tarif Siregar	1966	Angkola
9	Malatua Pardede	1966-1967	Toba
10	Laurimba Saragih	1967-1974	Simalungun
11	Sanggup Ketaren	1974-1979	Karo
12	M.J.T. Sihotang	1979-1984	Toba
13	Djabanten Damanik	1984-1989	Simalungun
14	Zulkifli Harahap	1990-1994	Mandailing
15	Abu Hanifah	1994-2000	Jawa
16	Marsal Hutagalung (Plt)	Jun 1999-Jan 2000	Toba
17	Makmur S. Pasaribu (Plt)	Jan-Jun 2000	Toba
18	Marim Purba	2000-2005	Simalungun
19	Nabari Ginting (Plt)	2005	Karo
20	R.E. Siahaan	2005-2010	Toba
21	Hulman Sitorus	2010-2015	Toba
22	Eddy Sofyan Purba	2015	Simalungun

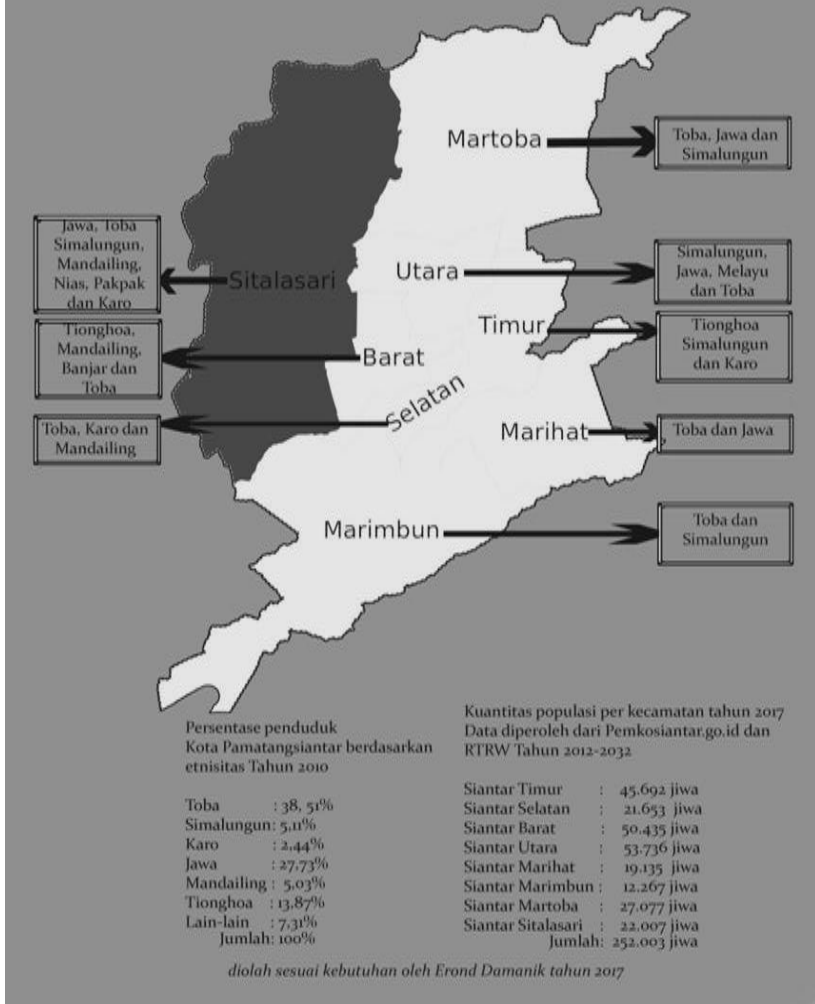
	(plt)		
23	Jumsadi Damanik (plt)	2015-2016	Simalungun
23	Anthony Siahaan (plt)	2016-2017	Toba
24	Hefriansyah Noor	Feb 2017- Sekarang	Melayu

Tabel 5. Populasi Siantar berdasar etnik dan agama, 2017

No	Etnisitas	Persentase
1	Toba	38,51%
2	Simalungun	5,11%
3	Karo	2,44%
4	Jawa	27,73%
5	Mandailing	5,03%
6	Tionghoa	13,87%
7	Lainnya	7,31%
	JUMLAH	100%
No	Agama	Persentase
1	Protestan	46,54%
2	Khatolik	4,71%
3	Islam	43,9%
4	Hindu	0,11%
5	Buddha	4,36%
6	Konghucu/Lainnya	0,01%
	JUMLAH	100%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber data (BPS dan KPU)

Sebaran penduduk dan pemukiman etnis di Kota Pamatangsiantar tahun 2017



Gambar 101. Sebaran dan pemukiman etnik di Siantar, 2017

Sumber: Damanik, 2017

BAB VII

GERBANG PARIWISATA SUMATERA UTARA

Letak geografis Kota Pematangsiantar berada pada posisi strategis. Kota ini menjadi gerbang utama pariwisata Sumatera Utara (*the gateway of North Sumatera Tourism*). Kota ini menjadi gerbang utama menuju Parapat, Balige, Tarutung dan Samosir di sekitar Danau Toba. Kota ini juga menjadi gerbang menuju *Istana Niat Limalaras* di Batubara, juga menjadi gerbang menuju panorama *Bukit Indah Simarjarunjung (BIS)* ataupun *Pantai Paris Tanjungunta* dan Pelabuhan Ferry Tigaras. Sekaligus juga menuju wisata alam Pohon Pinus di *Bah na Lihou (Aek Na Uli)*. Demikian pula kota ini dikelilingi perkebunan seperti Teh, Karet dan Sawit yang potensial dikembangkan menjadi objek wisata agro (*agro-tourism*). Di kota ini juga tersedia beberapa bangunan bersejarah (*historical building*) yang masih berdiri megah yang potensial dikembangkan menjadi wisata kota yang disebut dengan *citytours*.



Gambar 102. Culture perform di Pematangsiantar, 2017
Sumber: Humas Pemko Siantar, 2017

Singkatnya, kota ini menjadi penyangga pariwisata Danau Toba yang saat ini dikembangkan menjadi salah satu destinasi Pariwisata Nasional di Indonesia. Karena itu, Pemerintah Kota Pematangsiantar harus mengambil peluang wisata (*tourism opportunities*) sehingga wisatawan tidak hanya lintas dari Pematangsiantar. Tentu saja, guna merebut peluang wisata ini, Kota Pematangsiantar tidak berdiri sendiri, tetapi dapat menjalin kerjasama dengan daerah-daerah di sekitarnya.



Namun demikian, destinasi wisata Kota Pematangsiantar harus mumpuni dan menarik perhatian bagi wisatawan. Objek wisata buatan maupun objek non-buatan seperti alam, budaya, lingkungan berupa *ecotourism* dan *eco-voluntourism* harus

benar-benar tercipta di Pematangsiantar. Peluang-peluang wisata yang selama ini belum mendapat perhatian harus dapat di optimalkan sehingga berfungsi maksimal bagi pengembangan pariwisata. Karena itu, hal utama yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah membenahi, menciptakan dan menata berbagai objek (destinasi) yang ada ataupun menciptakan destinasi wisata lainnya di Kota Pematangsiantar. Tentu saja, gambaran kepariwisataan yang disebutkan diatas merupakan image pariwisata ideal seperti tersedia di negara-negara maju.

Berbagai peluang wisata yang tersedia di Kota Pematangsiantar adalah seperti *citytours* terhadap bangunan bersejarah, *cultural tourism* terhadap *plurall and multiculture society*, *agro-tourism* terhadap perkebunan di sekeliling kota Pematangsiantar, *cullinary tourism* ataupun *religion tourism* sebagai daya dukung terhadap julukan Pematangsiantar sebagai *the most of tolerance citys* tahun 2017.



Suatu hal yang perlu dicermati adalah apabila beberapa kawasan di sekitar Danau Toba berhasil menjadi destinasi MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) maka, Kota Pematangsiantar harus muncul sebagai penyangganya. Hal ini sangat mungkin dilakukan dan diciptakan mengingat jarak tempuh dari Parapat menuju Medan. Dengan demikian, atraksi dan performa budaya, ekhibisi budaya, keberadaan objek dan destinasi wisata, maupun cenderamata (*souvenir*) harus tersedia di Kota Pematangsiantar. Ke depan, yang harus dipikirkan bersama adalah menyoyal kunjungan wisatawan

yang bukan hanya 'sehari kunjungan' tetapi justru meningkat ke rata-rata tingkat penghunian kamar hotel.

Pemerintah Kota Pematangsiantar harus menerapkan dan menetapkan kebijakan populis bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) guna menarik minat wisatawan berkunjung di Pematangsiantar. Kebijakan-kebijakan yang proaktif terhadap pariwisata ini adalah seperti: *pertama* menciptakan destinasi-destinasi kunjungan wisata (*to create a tourism destination*), *kedua* meningkatkan *citytour of*



historical building, *ketiga* mengatur performa dan atraksi budaya (*a set of cultural performance and exhibition*), *keempat* melaksanakan wisata agro

perkebunan (*agro-tourism of plantation*) dengan melibatkan perusahaan perkebunan dan lain-lain.

Modal dasar pembangunan pariwisata Kota Pematangsiantar sebenarnya sudah tersedia berupa predikat sebagai '*Kota Toleran, 2017*'. Predikat ini menjajal ke beberapa aspek lain seperti minusnya konflik horisontal dan vertikal, koeksistensi dan *social cohesion* antara etnik dan budaya yang beranekaragam, tersedianya *halal food* ataupun adanya atraksi dan performa budaya dari setiap etnik yang beragama di Kota Pematangsiantar. Kemampuan Pemko Siantar menjadikan wilayahnya dengan berbagai atraksi budaya, *citytour historical building*, wisata agro, wisata kuliner, karnaval budaya, *rest area and souvenirshop* menjadi peluang ketertarikan wisatawan berkunjung ke Siantar.



Gambar 103. Atraksi budaya di Siantar

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Siantar, 2020

Sebenarnya, potensi wisata di Kota Pematangsiantar sangat mumpuni. Wilayah ini menyimpan bangunan bersejarah yang relatif banyak (*city tour*), dikelilingi perkebunan (wisata agro), multukultur (wisata budaya), multi etnik (atraksi dan performa budaya), kuliner dan lain-lain. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah mempopulerkan destinasi wisata yang tersedia serta kemudian meningkatkan *hospitality* masyarakat kota Pematangsiantar terhadap wisatawan sekaligus menata dan mengoptimalkan tata kelola pariwisata Kota Pematangsiantar.

Beberapa hal yang telah di lakukan dan terus di lakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar guna mensosialisasikan kepariwisataan di Pematangsiantar patut diapresiasi seperti

penyelenggaraan *Gala Desa* dan *Haornas, Semarak Budaya (Serbu) Pematangsiantar, Imlek Fair, Ramadhan Fair, Christmas Seasons, Siantar Art Festival*, atraksi dan performa budaya di Lapangan Parkir Pariwisata berfungsi meningkatkan *image* dan citra masyarakat Siantar dihadapan publik. Tersedianya kuliner yang melegenda dari Siantar seperti *Ganda* dan *Asli* ataupun makanan populer berupa *Burung Goreng* dan lain-lain menjadi sentuhan tersendiri bagi setiap pengunjung ke Siantar. Sentuhan lain yang cukup bermakna adalah keberadaan BSA berupa *Becak Motor Gede* yang cukup banyak dijumpai di Kota Pematangsiantar. Termasuk diantaranya adalah *Museum Simalungun* yang berdiri di jantung Kota Pematangsiantar, yaitu salah satu dari 7 (tujuh) museum yang dibangun di era kolonial Belanda di Indonesia.



Demikian pula tersedianya bangunan-bangunan bersejarah (*historical building*) sebagai bukti kejayaan Pematangsiantar sebagai *plantations citys* sangat memikat bagi wisatawan mancanegara. Kelak, salah satu dari *historical building* itu seperti *Simalungun International Club* atau kini menjadi Gedung Juang Nasional sangat cocok di kembangkan menjadi *Coffee shop* di Kota Pematangsiantar. Semuanya ini menjadi modal dasar pariwisata guna mengembangkan aspek kepariwisataan Kota Pematangsiantar.

BEBERAPA TERMINAL WISATA DI SIANTAR



Salah satu oleh-oleh berupa makanan khas dari Kota Pematangsiantar adalah Roti Ganda



Salah satu tempat tongkrongan berupa warung kopi (coffee shop) di kota Pematangsiantar adalah Kok Tong yang berdiri sejak tahun 1925.



Salah satu menu makanan favorit (kuliner) dari Kota Pematangsiantar adalah Burung Goreng.

BAB VIII PENUTUP

Kota Pematangsiantar merupakan kota majemuk (*plural society*) yang dihuni 8 (delapan) suku bangsa (*ethnic group*). Kebhinekaan ini menjadi salah satu indikator kota multi-budaya (*multiculture*). Kemajemukan ditopang minusnya konflik vertikal dan horisontal sekaligus adanya kohesi sosial (*social cohesion*) menjadi parameter tentang koeksistensi sosial (*social coexistence*). Pada akhirnya, predikat kota Pematangsiantar menjadi *'the most tolerance citys in Indonesia 2017*. Lewat kemajemukan masyarakat dan budaya ini, Pematangsiantar memperkuat basis ke-Indonesia-an lewat corak keberagaman masyarakat dan budayanya. Kota ini menjadi barometer toleransi di Indonesia.

Pada perspektif ke-pariwisata-an, khasanah multi-budaya menjadi salah satu objek destinasi karena tersedianya beraneka ragam *culture performance, religion, cullinary* maupun atraksi budaya seperti permainan (*traditional games*) seni tari (*traditional dance*), seni suara (*traditional sing*), maupun souvenir (*souvenir shop*). Program ini dikembangkan Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama dengan *stakeholder* lewat *Gala Desa, Siantar Art Festival, Karnaval Budaya, Semarak Budaya (Serbu), sayembara olahraga, pagelaran tari dan suara* dan lain-lain di tingkat Kota Pematangsiantar.

Terkecuali destinasi berbasis budaya, Kota Pematangsiantar menyediakan destinasi wisata lain berupa alam, sejarah, dan buatan. Kemasan wisata ini dimaksimalkan lewat kolaborasi antar institusi ataupun antar teritorial berupa: *ecotourism, citytour, agro-tour, dan wisata rohani* pada

sejumlah destinasi seperti perkebunan, bangunan bersejarah, rumah ibadah ditambah destinasi buatan seperti *Siantar Zoo*, *Siantar Timepark*, *Siantar flower garden* (Alun-alun) dan lain sebagainya.

Maksimalisasi terhadap pengembangan destinasi wisata di Pematangsiantar ini menjadi mutlak karena posisinya yang berada pada jalur transit (*transitte gate*) menuju Danau Toba yang kini diplot sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional di Indonesia. Dengan pengembangan objek destinasi di Kota Pematangsiantar ini, tentu saja wisatawan tidak hanya sekedar 'melewati'nya tetapi diharapkan merangsang '*singgah*' yang diukur lewat rata-rata kunjungan dan penghunian kamar hotel. Karena itu, harapannya di masa yang akan datang adalah munculnya Pematangsiantar sebagai salah satu Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang didukung oleh maksimalnya objek destinasi, toleransi masyarakat serta hotel. Pada gilirannya, kenyataan ini memacu tingkat PAD atau devisa daerah dari sektor kepariwisataan.

EPILOG

Historical tourism at Pematangsiantar and Its Surrounding: Menakar Potensi Wisata Bangunan Pusaka Budaya di Pematangsiantar

Pengantar

Keberhasilan sektor Pariwisata tidak muncul dengan sendirinya. Pariwisata bukanlah sekedar menjual keindahan alam, lansekap geografis atau topografis yang berbeda-beda bagi setiap negara. Pariwisata bukan sekedar mengandalkan alam, tetapi juga kreasi manusia (destinasi buatan), atau juga berpola historis, religius, budaya maupun lingkungan, yaitu karakteristik lokal yang membedakannya dengan di tempat lain. Pariwisata menjual 'nostalgia' yaitu mengubah identitas dan memori kolektif bernilai ekonomi. Nostalgia adalah pengemasan objek menjadi destinasi yang mencerminkan tingkat peradaban, pengetahuan dan kecerdasan manusia dari masa lalu.

Pariwisata, dengan demikian adalah seluruh aktifitas manusia yang dimanfaatkan untuk mengubah selera pengunjung, dari hal-hal biasa menjadi luar biasa, menumbuhkan semangat berkunjung, menghabiskan waktu dan belanja sesuai karakteristik lokal.

Bali misalnya, menjadi destinasi wisata internasional dewasa ini tidak muncul dengan sendirinya. Bali menjadi destinasi internasional telah dikemas sejak tahun 1914. Mengalami pasang surut namun kepiawaian masyarakatnya yang didukung oleh *political will* dari pemerintah setempat. Sebenarnya, promosi wisata Bali dengan Danau Toba hanya dilakukan berselisih waktu selama 10 tahun. Keduanya dipromosikan oleh *KLM Line*, perusahaan pelayaran kerajaan Belanda. Namun, dibanding Bali, Danau Toba mengalami stagnasi terutama sejak tahun 1997. Kemerossotan tajam berdampak sistematis bagi Danau Toba, yakni matinya industri hotel, biro perjalanan, hiburan dan sektor informal ekonomi masyarakat.

Pariwisata membutuhkan kebijakan, apresiasi dan tanggapan trampil untuk mengubah dan mengelola alam bagi pendidikan, pengetahuan, refleksi, nostalgia, rekreasi bagi manusia. Pariwisata tidak sekedar menjual lensekap dan panorama alam, sebagaimana terjadi hingga tahun 1980-an. Pariwisata menjelang Abad 21, terutama sejak tahun 1980-an berubah menjadi *eco-tourism* (wisata lingkungan) maupun *city-tourism* (wisata kota). Konsep pariwisata pertama adalah wisata yang memadukan keindahan geografis dan topografis dengan kultural beragam manusia. Konsep wisata kedua adalah paradigma yang memandang bahwa kota dapat dikemas menjadi destinasi wisata. Namun, konsep kedua dibedakan dengan *urban tourism* (wisata kota metropolitan)

yang cenderung menjadikan urbanisasi sebagai cara menghasilkan uang karena urusan pendidikan, bisnis, perdagangan dan lain-lain.

Di banding *urban-tourism*, yang cenderung mencerminkan modernisasi kota-kota Abad 21 sebagai destinasi wisata, *city tourism* lebih kepada pengemasan kota-kota menengah sebagai destinasi wisata. Di kota-kota menengah, biasanya, embrio dan jati diri, ikon dan identitas kota relatif terlindungi (terlestarikan) dibanding *urban-tourism* yang cenderung modern atau disebut metropolitan. Pada kota-kota metropolitan, wisata cenderung diarahkan pada kepuasan belanja, konsumerisme dan gaya hidup modern. Wisata metropolitan cenderung mengarah pada 'masyarakat konsumtif' sebagaimana digambarkan Jean Baudrillard. Kepuasan konsumeris menjadi inti pokok wisata urban. Pengalaman wisata dipadu dengan hiburan modern serta sedikit sekali pengalaman asli sebagaimana ditemukan pada masyarakat di kota-kota menengah.

City tourism masih mencerminkan pengalaman rekreasi yang kompleks. Kerumitan dan kompleksitas kota-kota menengah tidak seperti kota metropolitan. Di kota menengah, pengunjung masih dapat menemukan embrio kota, bangunan-bangunan dari periode lampau dengan usia ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Kuliner dominan mencerminkan kekhasan lokal, berbeda dan tidak homogen seperti di kota-kota metropolitan. *City tourism* mengenalkan keagunan kota berdasar peninggalan-peninggalan sejarah yang dimilikinya, kuliner yang diperkenalkan beragam dan mencerminkan kekhasan masyarakat. Performa dan atraksi budaya menggambarkan karakteristik lokal, cenderung berbeda-beda dan sangat menarik perhatian pengunjung.

City tourism cenderung mengedepankan objek-objek historis, yang dikemas menjadi destinasi wisata. Dalam hal ini, inti pokok wisata adalah menjual nostalgia, kenangan atau memori masa lalu sebagai identitas kota. Kota-kota yang terdapat di Turkey seperti Istanbul, maupun di Israel seperti Betlehem dan Yerusalem, ataupun di Arab Saudi seperti Mekkah dan Medinah, di Mesir seperti di Kairo, atau bahkan di Vietnam seperti di Ho Chi Min dan Hanoi, atau di Filipina seperti di Manila, atau bahkan di Malaysia seperti di Pulau Penang, dan lain-lain, semuanya menjual bangunan-bangunan pusaka budaya (*cultural heritage building*) sebagai destinasi wisata. Kenyataan sama terdapat di kota menengah, Pematangsiantar di Sumatera Utara.

Historical tours at Pematangsiantar and Its Surrounding

Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara mengandung potensi wisata *city tourism* terutama bagi wisata bangunan pusaka budaya (*cultural heritage building tourism*). Adapun potensi wisata *city tours* di Pematangsiantar terangkum pada wisata perkebunan (*plantations tourism*), yakni nostalgia tentang perkebunan yang menjadi embrio kota Pematangsiantar.

Sebagai catatan, perkembangan pesat 'Kampung Siantar' menjadi 'Kota Siantar' tidak terlepas dari faktor perkebunan. Dalam catatan sejarah, disebut bahwa perkebunan menjadi faktor modernisasi kota Siantar. Perkebunan mendorong perkembangan kampung menjadi kota (*municipality*). Kekhususan perkebunan di Siantar terlihat dari perkebunan, warisan sejumlah besar pengusaha (*planters*) Eropa di Siantar. Perkebunan teh, karet, sawit termasuk coklat, hingga hari ini masih terdapat di sekeliling kota Pematangsiantar. Sementara

itu, ditengah-tengah kota Pematangsiantar, terdapat ratusan bangunan-bangunan berarsitektur *art deco*, *modern* dan *renaissance* dari periode perkebunan. Kekhususan bangunan mencerminkan keberfungsian awal sebagai sekolah, bank, rumah ibadah, hotel, cafe, percetakan, bioskop, kantor walikota, taman bunga, jembatan, museum dan lain-lain. Bangunan-bangunan dimaksud tidak saja mencirikan kegemilangan perkebunan tetapi juga menggambarkan modernisasi, atau perubahan geografi dan topografi menjadi lansekap kota di periode 100 tahun silam.

Konsep wisata sejarah perkebunan di Pematangsiantar dan sekitarnya, (*Historical tours at Pematangsiantar and Its Surrounding*) adalah model ditawarkan sebagai *city tourism* di kota Pematangsiantar. Konsep dan model *historical tours at Pematangsiantar and Its Surrounding* menawarkan wisata sejarah untuk bernostalgia dengan periode sejarah perkebunan. Dalam hal ini, wisata sejarah dikombinasikan dengan tinggalan-tinggalan perkebunan seperti bangunan pusaka budaya dan perkebunan. Keduanya membawa pengunjung pada kedudukan kota menengah yang mengikutsertakan bangunan pusaka budaya di inti kota maupun perkebunan di sekeliling kota. Konsepsi *Historical tours at Pematangsiantar and Its Surrounding* memadukan wisata kota dan lingkungan kota (*eco-city tourism*), destinasi wisata yang menarik bagi kalangan urban dan pengunjung potensial yang hadir di kota.

Urgensi dan signifikansi pengemasan bangunan pusaka budaya dalam konsepsi *historical tours at Pematangsiantar and its surounding* mencakup 4 poin utama; (1) melestarikan, melindungi dan memanfaatkan bangunan pusaka budaya sebagai objek dan destinasi wisata; (2) mendorong ekonomi kreatif di perkotaan serta memberikan insentif bagi pengelola,

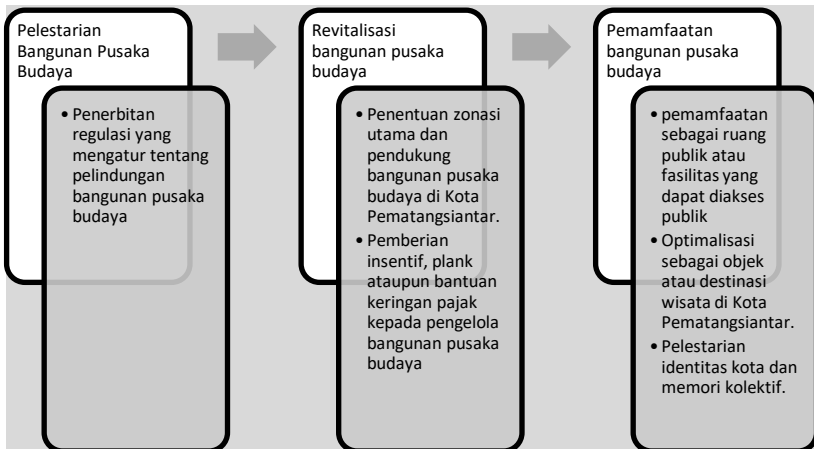
pemilik dan *stakeholder* yang berkepentingan terhadap bangunan pusaka budaya, (3) merawat memori kolektif dan identitas kota, yaitu warisan perkebunan di perkotaan, awal modernisasi, pertumbuhan dan perkembangan kota dari sebuah kampung menjadi kota modern, dan (4) menyediakan destinasi guna mendukung pariwisata kota seperti agrowisata, *eco-tourism* dan kekhasan kota Pematangsiantar sebagai kota perkebunan di Provinsi Sumatera Utara.

Urgensi dan signifikansi *historical tours at Pematangsiantar and its surrounding* sangat mungkin dilakukan mengingat point-point di berikut ini; (i) bangunan pusaka budaya, warisan perkebunan yang masih tersedia, eksis dan berdiri megah di jantung Kota Pematangsiantar, (ii) adanya kesempatan melestarikan dan melindungi bangunan pusaka budaya, warisan perkebunan karena kebanyakan diantaranya dikuasai pemerintah maupun swasta yang dijadikan sebagai ruang publik, (iii) kekhasan Kota Pematangsiantar sebagai warisan perkebunan hanya ditopang oleh bangunan-bangunan pusaka budaya sebagai jati diri, identitas dan perwujudan memori kolektif, dan (iv) Kota Pematangsiantar adalah kota transit, kota pelajar dan tujuan urbanisasi dari utara Danau Toba maupun Selatan Selat Malaka serta daerah industri kawasan khusus Sei Mangkei.

Kesulitan yang dialami dalam upaya menjadikan bangunan pusaka budaya sebagai objek atau destinasi *historical tours at Pematangsiantar and its surrounding*, dirangkum dalam dua poin berikut ini; (a) rendahnya keterlibatan publik dan swasta dalam pelestarian, perlindungan dan pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai objek atau destinasi wisata di Kota Pematangsiantar, dan (b) kurangnya *political will* pemerintah kota dalam menerbitkan regulasi terkait dengan pelestarian

dan perlindungan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi atau objek wisata di Kota Pematangsiantar. Pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai objek destinasi *historical tours at Pematangsiantar and its suronding*, dapat dilakukan dengan dua poin utama; (1) sinergi swasta dan pemerintah kota, ataupun (2) melibatkan komunitas dan kalangan penikmat bangunan pusaka budaya.

Tahapan ataupun urutan pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi *historical tours at Pematangsiantar and its suronding*, mencakup langkah-langkah sebagai berikut:



Tahapan pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi *historical tourism at Pematangsiantar and its surrounding*

Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bangunan pusaka budaya terdapat di Kota Pematangsiantar. Ke-29 bangunan berdiri di jantung kota Pematangsiantar di 4 (empat) segmen seperti dijelaskan pada prolog di bagian depan naskah ini. Mayoritas, ke-29 unit bangunan dimiliki pemerintah dan

swasta. Sebagian kecil dimiliki individu yang dimanfaatkan sebagai toko, dan warisan keluarga. Melihat kenyataan bangunan pusaka budaya saat ini di Pematangsiantar, memiliki potensi bila dikembangkan menjadi destinasi wisata. Kenyataan ini dipengaruhi 3 hal pokok, yaitu: (i) Pematangsiantar berdampingan dengan Danau Toba serta Jalur pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung (BIS) yang terhubung ke Tanah Karo dan Medan; (2) akses masuk dari jalur timur, Batubara dan Asahan menuju Danau Toba, dan (3) akses dari utara menuju Kualanamau, Medan ataupun Selat Malaka di Batubara.

Historical tours at Pematangsiantar and its surrounding, dengan demikian memiliki potensi untuk dikembangkan berdasar pada bangunan pusaka budaya. Pemamfaatan ini bukan saja menjaga warisan kota perkebunan, namun sekaligus menyediakan destinasi-destinasi bagi kaum urban yang bermigrasi atau tinggal di Kota Pematangsiantar. Kesempatan dan peluang menuju *Historical tourism at Pematangsiantar and its surrounding* sangat terbuka apabila terdapat sinergi antara pemerintah kota maupun swasta serta *stakeholder* yang menaruh apresiasi terhadap bangunan pusaka budaya. Namun, seperti disebut di awal epilog ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah *political will* pemerintah, kemudian bersinergi dengan swasta ataupun *stakeholder*. Kombinasi ketiganya dapat mendorong laju pertumbuhan pariwisata kota, guna mendongkrak faktor-faktor ekonomi, terutama informal yang digeluti 2/3 penduduk kota. Tanpa sinergi dan *political will*, pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai destinasi wisata di perkotaan hanyalah sebuah keniscayaan.

Penutup

Buku ini disusun sebagai hasil pengkajian terhadap pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai objek dan destinasi *historical tourism at Pematangsiantar and its surrounding*. Sebagai hasil kajian, naskah ini menyajikan ide-ide atau gagasan tentang bagaimana dan mengapa mengemas bangunan-bangunan pusaka budaya warisan perkebunan menjadi objek dan destinasi wisata perkotaan. Ide-ide yang dituangkan dalam naskah ini membutuhkan implementasi nyata guna mewujudkannya.

Suatu hal yang harus digarisbawahi bahwa pemamfaatan bangunan pusaka budaya sebagai objek atau destinasi wisata di Kota Pematangsiantar, sesungguhnya bukanlah hal sulit. Mengapa? Seluruh objek atau bangunan pusaka budaya masih dapat ditemukan di jantung kota dan terletak tidak saling berjauhan. Eksistensi di pusat kota memungkinkan kedekatan dengan maksud dan tujuan bisnis, perdagangan ataupun urusan pemerintahan di inti kota. Jalur-jalur pedestrian yang terdapat di inti kota dapat mendukung pariwisata kota yang elegans. Kemajemukan kota dari segi etnik, agama dan atribut kultural menambah daya gedor wisata yaitu kekhususan lokalitas. Kemudian, predikat kota toleran, memungkinkan pengunjung semakin nyaman meminjakkan kakiknya di Pematangsiantar.

Objek atau destinasi modern yang ditambahkan belakangan seperti Monumen Kwan Im ataupun Monumen Becak serta pertumbuhan cafe-cafe tongkrongan maupun restoran yang menyajikan kekhasan lokal, turut mendukung pertumbuhan wisata di Kota Pematangsiantar. Hanya saja, meskipun bangunan-bangunan pusaka budaya masih berdiri di Pematangsiantar, pemamfaatannya sebagai destinasi wisata

kota belum berfungsi maksimal. Kenyataan ini terjadi karena kurangnya apresiasi masyarakat maupun owners bangunan pusaka budaya untuk memanfaatkan potensi wisata yang dikandung bangunan pusaka budaya itu. Kenyataan ini berdampak bagi privatisasi bangunan yang lebih eksklusif, atau tertutup bagi wisatawan. Privatisasi berdampak bagi tidak adanya keinginan wisatawan untuk melihat dan mendapatkan pengalaman kongkret ketika berada di Pematangsiantar. Oleh karena itu, pemerintah kota berkewajiban menerbitkan regulasi yang mengatur tentang bangunan-bangunan pusaka budaya sehingga dapat diakses publik dan memberikan keuntungan ekonomi bagi pengelolannya. Tanpa itu, upaya apapun untuk menjaga identitas kota, memori kolektif yang menjual nostalgia perkebunan tidak akan pernah tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang no. 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya*

Undang-Undang no 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan*

Permendikbud no. 45 Tahun 2018 tentang *Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah*.

B. Referensi (buku, journal, disertasi dll)

ABTA. 2014. The consumer holiday trends report - ABTA consumer survey 2014 [pdf] London: ABTA Ltd. Tersedia online: https://c0e31a7ad92e875f8eaa-5facf23e658215b1771a91c2df41e9fe.ssl.cf3.rackcdn.com/publications/1420_ABTA_Consumer_Survey_2014_WEB.pdf.

Diakses 4 Agustus 2020.

Anderson, John. 1967. *Mission to the Eastcost of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia.

Adishakti, T.L. 1997. *A Study on the Conservation Planning of Yogyakarta Historic-tourist City Based on Urban Space Heritage Conception*. Disertasi. Graduate School of Global Enviromental Engineering, Kyoto University, Japan.

Anrooij, Francien van. 2014. *De koloniale Staat, 1854-1942: Archief van het Ministrie van Kolonien*. (Panduan Penelitian Negara Kolonial: penerjemah: Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam). Leiden: Nationaal Archief.

Anderson, John. 1971. *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia Historical Reprints.

Ashworth, G. (1989), "Urban tourism: an imbalance in attention", in Cooper, C. (Ed.), *Progress in Tourism Recreation*

- and Hospitality Management*, Vol. 1, Belhaven, London, pp. 33-54.
- Ashworth, G. and Page, S.J. (2011), "Urban tourism research: recent progress and current paradoxes", *Tourism Management*, Vol. 32 No. 1, pp. 1-15.
- Basundoro, Purnomo. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Breman, Jan. 1992. *Menjackson Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: Grafiti.
- Buiskool, Dirk A. 2005. *Medan Historical Tours and its Surrounding*. Medan. Trijaya Travel and Agency.
- Bock, Kerstin. 2015. The changing nature of city tourism and its possible implication for the future of cities. *European Journal of Futures Research*, vol. 3, 20 <https://doi.org/10.1007/s40309-015-0078-5>
- Colombijn, Freek., M. Berwegen, P. Basundoro, dan J. A. Khusyairi. 2005. *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, John W. 2011. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Damanik, Erond Litno. 2016. *Kisah dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas Kota Medan tahun 1870-1942. Jilid I*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond Litno dan Juandaharaya P. Dasuha. 2016. *Kerajaan Siantar: dari Pulau Holang ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond Litno. 2017. *Agama, Perubahan Sosial dan Identitas Etnik: Moralitas Agama dan Kultural di Simalungun*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond Litno. 2016. *Danau Toba: Permata Mahkota Pulau Sumatra*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond Litno. 2018. *Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir Kebudayaan Lewat Foto*. Medan: Simetri Institute.
- Dijk, PALE van. 1894. *Betreffende de Sibaloengensche lanschappen Tandjoeng Kassau, Tanah Djawa en Si Antar. Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land-En Volkenkunde, XXXVII, 145-200.*
- Dunne, Gerard., Sheila Flanagan & Joan Buckley. 2010. *Towards an understanding of international city break travel. International Journal of Tourism Research, vol. 12, no. 5, hlm. 409-417. <https://doi.org/10.1002/jtr.760>*
- ETOA. 2014. *Cities, Tourists and the Future of Europe's Tourism*, European Association of Tour Operators ETOA, London. Tersedia online: www.travelandtourworld.com/news/article/cities-tourists-future-europe-tourism/. Diakses 4 Agustus 2020.
- Euromonitor International. 2015. *Top 100 City Destinations Ranking* [Online]. Tersedia online: <http://blog.euromonitor.com/2015/01/top-100-city-destinations-ranking.html>. Diakses 4 Agustus 2020.
- Greene, J.C. 2008. "Is Mixed Methods Social Inquiry a

- Distinctive Methodology?" *Journal of Mixed Methods Research* 2 (2): 7–22.
<https://doi.org/10.1177/1558689807309969>.
- Hidayat, Wahyu., Ganie, Tunggul H., dan Harefa, Jurnalismen. 2018. Kajian Bangunan Bersejarah Dinilai dari Historis dan Estetika Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Saintek ITM*, 31(2):40-49. <https://doi.org/10.37369/si.v31i2.34>
- Holt, Claire. 1968. *Art in Indonesia: Continuities and Change*. Ithaca: New York: Cornell University Press.
- Hutauruk, Denny Meisandy dan Rambe, Yunita Syafitri. 2017. Konservasi Bangunan Tjong A Fie dalam Usaha Keberlanjutan Mempertahankan Bangunan Bersejarah Kota Medan. *JAUR: Journal of Architecture and Urbanism Research*, 1(1):37-44.
- Johnson, R.B. 2004. "Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come." *Educational Researcher* 33 (7): 14–26. <http://doi.org/10.3102/0013189X033007014>.
- Kusno, Abidin. 2009. *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif*. Yogyakarta: Ombak.
- Kroesen, J. A. 1987. Eine reis door de Landschappen: Tandjung Kasau, Siantar en Tanah Jawa (Res. Ooskust van Sumatera) dalam *Tidjschrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde*, Dell, 39
- Loderics, E.A. 2008. *Medan: Beeld van een Stad: Pictures of a city*. Purmerend: Asia Maior.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari. 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Postma, Albert.; Dorina-Maria Buda, Katharina Gugerell, (2017) "The future of city tourism", *Journal of Tourism*

- Futures*, vol. 3, no. 2, hlm. 95-101.
<https://doi.org/10.1108/JTF-09-2017-067>
- Ritzer, George. 1988. *Contemporary Sociological Theory*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
- Rooijackers, G. (1999). Identity factory Southeast towards a flexible cultural leisure infrastructure. In D. Dodd & A.M. Van Hemel (eds.), *Planning European cultural tourism*. Amsterdam: Boekman Foundation.
- Richards, G. (2001). *Cultural attractions and European tourism*. Oxon and New York: CABI Publishing.
- Stock, M. 2007, "European cities: towards a recreational turn?", *HAGAR. Studies in Culture, Polity and Identities*, vol. 7, no. 1, hlm. 115-134.
- Taylor, Jean Gelman.. 2008. Aceh: Narasi foto, 1873-1930, dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (eds). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV-Jakarta.
- Taylor, Jean Gelman. 2003. *The Social World of Batavia: Kehidupan Sosial di Batavia, Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*, (diterjemahkan Tim Komunitas Bambu). Jakarta: Komunitas Bambu.
- Tideman, Joseph. 1922. *Simeloengen: Het Land der Timoer Bataks in Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot Een Deel van het Cultuurgebied van de Ooskust van Sumatera*. Leiden: Louis H. Becherer.
- Tripadvisor (2015) TripBarometer 2015: Five key traveler trends. [Online] Available at: <http://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/n2582/tripbarometer-2015-five-key-traveler-trends>. Accessed 23 Aug 2020

- UNWTO. 2014. Global benchmarking for city tourism measurement. AM Reports, Volume Ten [pdf] Madrid: UNWTO. Available at: <http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416691>. Accessed: 3 Aug 2015
- UNWTO. 2012. Global Report on City Tourism. AM Reports, Volume Six [pdf] Madrid: UNWTO. Tersedia di laman: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/am6_city_platma.pdf. Diakses 4 Agustus 2020.
- Wijanarka. 2007. *Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah*. Yogyakarta: Ombak.

LAMPIRAN

Bangunan pusaka budaya di Kota Pematangsiantar



Gambar 1:

**Pesanggerahan Kerajaan Siantar
di Pulau Holang**

Pesanggerahan Kerajaan Siantar, terdapat di Pulau Holang, jantung Kota Pematangsiantar. Berarsitektur *art deco*, dibangun tahun 1920 menggantikan rumahbolon (Istana) yang terbakar tahun 1919. Hingga kini masih berdiri dan dapat dikunjungi setiap saat



Gambar 2:

**Rumah Raja Siantar di Pulau
Holang**

Bangunan berarsitektur *art deco* ini berdiri 50 meter dari Pesanggerahan di Pulau Holang. Namun, kondisinya cenderung tidak terawat. Bangunan relatif terlantar dan rusak. Atap dan dinding mulai rusak sedang cat warna kuning mulai memudar.



Gambar 3:
Ruko Tionghoa di Jalan Cipto
Pematangsiantar

Bangunan berarsitektur Tionghoa ini masih lestari dan terlindungi di jalan Cipto Pematangsiantar. Jumlahnya kurang lebih 250 unit di kiri dan kanan ruas jalan. Kawasan ini adalah bagian dari pecinan yang terhubung hingga ke jalan Panei.



Gambar 4:
Kantor Walikota
Pematangsiantar

Bangunan bergaya *renaissance* ini berdiri di jantung Kota Siantar. Di bangun tahun 1920-1922 sebagai city hall (kantor walikota). Hingga kini, bangunan tetap difungsikan sebagai kantor walikota. Bangunan masih asli walaupun terdapat penambahan di belakang



Gambar 5:
Bappeda Kota Siantar

Bangunan berarsitektur art deco ini pada awalnya difungsikan sebagai kantor otoritas kota. Kemudian berganti menjadi kantor Gemeenteraad, yaitu Dewan Kota. Hingga kini masih eksis dan difungsikan sebagai Bappeda.



Gambar 6:
Kantor BRI Siantar

Bangunan berarsitektur art deco ini masih berdiri di Siantar. Pada awalnya, bangunan di fungsikan sebagai Javasche Bank dan pasca kemerdekaan dikuasai dan menjadi Bank Rakyat Indonesia. Bangunan masih asli meskipun terdapat beberapa penambahan di dalam dan luar.



Gambar 7:
Sekolah Sultan Agung

Bangunan berarsitektur art deco ini masih berdiri di Siantar. Bangunan ini dikelilingi bangunan baru. Pada awalnya bernama Chun Hua School namun sejak tahun 1972 diganti menjadi Yayasan Perguruan Sultan Agung di Kota Siantar.



Gambar 8:
STM HKBP Siantar

Bangunan berarsitektur art deco ini, sebagian masih berdiri dan sekelilingnya ditambah kelas baru. Sejak awal hingga kini, bangunan dipergunakan sebagai 'sekolah tukang' atau kini disebut dengan STM yang dikuasai Yayasan perguruan HKBP.



Gambar 9:
Sekolah Taman Asuhan

Bangunan berarsitektur art deco ini dibangun oleh HVA-Belanda. Fungsi awal adalah sekolah berasrama. Hingga kini, masih difungsikan sebagai sekolah yaitu Taman Asuhan di Jalan M.H. Sitorus, Kota Pematang Siantar.



Gambar 10:
Pasar Horas Kota Pematang Siantar

Bangunan berarsitektur modern ini dibangun tahun 1925 sebagai Siantar Central Market. Pasca kemerdekaan, bangunan difungsikan sebagai pasar yang disebut Pajak Horas. Bangunan sudah berganti total dengan yang baru.



Gambar 11:

Ria Bioskop Siantar

Bangunan berarsitektur art deco ini masih berdiri di Siantar. Pada awalnya berfungsi sebagai Bioskop. Saat ini, bangunan masih berdiri namun tidak difungsikan sebagai bioskop. Kondisinya sudah kupak kapik dan dalam proses pembiaran.



Gambar 12:

Stasion Kereta Api Siantar

Bangunan berarsitektur art deco ini masih berdiri megah di Pematangsiantar. Sejak dibangun tahun 1917 hingga kini tetap dioperasikan sebagai stasion kereta api. Penambahan dan renovasi bangunan tetap dilakukan sesuai kebutuhan.



Gambar 13:
Kantor Telkom Siantar

Bangunan berarsitektur art deco ini masih berdiri di Siantar. Pada awalnya, bangunan di fungsikan sebagai kantor telepon dan telegraf untuk mendukung Kereta Api. Bangunan tidak jauh dari Stasiun Kereta Api Pematangsiantar .



Gambar 14:
Gedung Djuang Siantar

Bangunan berarsitektur art deco ini masih berdiri di Kota Siantar. Simalungun International Club adalah cafe di era perkebunan. Pasca Indonesia merdeka di fungsikan sebagai Gedung Djuang hingga saat ini.



Gambar 15:

Kolam renang Siantar

Terdapat di Pulau Holang. Di bangun tahun 1923 yang disebut Siantar Zwembaad atau Kolam Renang Siantar. Pasca kemerdekaan dikuasai individu dan diubah nama menjadi Detis. Sumber air berasal dari Bah Bolon yang dijernihkan.



Gambar 16:

Pabrik Es Siantar

Terletak di Pulau Holang dan memanfaatkan air dari Bah Bolon yang membelah kota Siantar. Pasca Indonesia merdeka, dikuasai individu dan tetap difungsikan sebagai pabrik es, baik batangan maupun minuman instan di konsumsi.



Gambar 17:
Sekolah HKBP Siantar

Pada awalnya adalah rumah sakit milik perkebunan Marjandi Estate yang diperuntukkan bagi buruh. Pasca Indonesia merdeka di kuasai swasta dan difungsikan sebagai sekolah dibawah yayasan HKBP di Pematangsiantar.



Gambar 18:
Rumah dinas Walikota

Bangunan berarsitektur art deco ini adalah rumah dinas walikota Siantar. Sejak di bangun tahun 1923 dan hingga kini masih tetap berfungsi sebagai kantor walikota. Berada di kawasan Eropa di Pematangsiantar.



Gambar 19:
STT HKBP Siantar

Pada awalnya adalah Sekolah Ningrat bagi keluarga bangsawan Simalungun. Namun, pasca Indonesia merdeka, bangunan dikuasai swasta dan difungsikan sebagai sekolah yaitu STT HKBP Pematangsiantar



Gambar 20:
Rumah dinas Walikota

Siantar Central Hospital atau sering disebut *Krankenhaus van Gemeente Siantar*. Kini, bangunan ini tetap menjadi rumah sakit yang disebut RSUD Djasamen Saragih yang dikelola Pemko Pematangsiantar.



Gambar 21:

Rumah Sakit tentara di Siantar

Simalungun Central Hospital atau dikenal dengan Rumah Sakit Pusat Simalungun. Di bangun tahun 1933. Pasca Indonesia merdeka, rumah sakit dikuasai militer dan fungsinya tetap menjadi rumah sakit, yaitu RS Tentara Pematangsiantar.



Gambar 22:
Siantar Zoo

Di bangun tahun 1938 oleh seorang ahli ternah (binatang) dari Belanda. Kompleks berada di lembah di sisi Bah Bolon. Taman Margasatwa ini memiliki koleksi binatang dan kini diasuh oleh Yayasan Museum Rahmat dari Medan.



Gambar 23:

Sekolah HKBP Siantar

Siantar Hotel, dibangun tahun 1923 dan menjadi hotel pertama di Siantar. Penyerangan Siantar Hotel tahun 1947 adalah embrio perlawanan menentang Belanda di Siantar. Hingga kini, masih berfungsi sebagai hotel yang dikuasai pengusaha swasta di Pematangsiantar



Gambar 24:

PDAM Tirtauli Siantar

Bangunan ini didirikan tahun 1922 untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Siantar. Pasca Indonesia merdeka, bangunan difungsikan sebagai PDAM Tirtauli, perusahaan air minum di Kota Pematangsiantar. Bangunan sudah total berganti dengan yang baru.



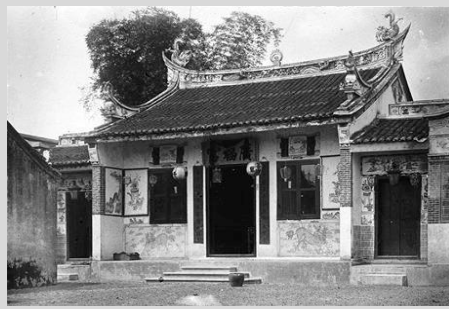
Gambar 25:
Sekolah HKBP Siantar

Density Kantor atau Kantor Kependudukan. Kantor ini, pada saat ini identik dengan Biro Pusat Statistik. Pada saat ini, bangunan masih berdiri dan dapat dilihat walaupun terdapat penambahan atau pengurangan guna menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masa kini.



Gambar 26:
Museum Simalungun

Bangunan berarsitektur Simalungun, dibangun tahun 1938 dan diresmikan tahun 1939, sebagai Museum. Merupakan museum ke 3 di Sumatra dan ke 6 di Indonesia sebelum kemerdekaan. Hingga kini, bangunan masih original dan berdiri di jantung kota Siantar.



Gambar 27:
Kuil Tionghoa di
Pematangsiantar

Bangunan berarsitektur Tionghoa ini adalah kuil. Beralamat di Jalan Panei, Pematangsiantar. Hingga kini, bangunan asli masih di temukan namun telah dikelilingi bangunan baru dan besar, di lokasi patung megah Kwan Im di Pematangsiantar.



Gambar 28:
Gereja HKBP Siantar

Gereja Protestan (Protestant Kerk) pertama di Siantar, beralamat di jalan Gereja. Di bangun sebagai pertanda masuknya agama Protestan di Siantar. Hingga kini, bangunan masih original dan berfungsi sebagai rumah ibadah bagi pemeluknya.



**Gambar 29:
GKPS Sudirman**

Bangunan adalah GKPS beralamat di Jalan Sudirman Pematangsiantar. Pada awalnya, bangunan ini adalah HKBPS. Namun, pasca kemandirian GKPS dari HKBP, bangunan ini dikuasai GKPS dan dirombak sesuai ciri khas Simalungun di bagian pendopo dan bergaya Eropa-Jerman di menaranya.



**Gambar 30:
Gereja RK Jln Sibolga**

Bangunan berarsitektur Modern ini adalah gereja Katolik di jln Sibolga. Dibangun tahun 1939 sebagai pertanda masuknya agama Katolik di Siantar. Hingga kini, bangunan tetap difungsikan sebagai rumah ibadah bagi pemeluknya.

TENTANG PENULIS:



Erond L. Damanik (Dr, M.Si, S.Pd), Adalah pengajar tetap di Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Menamatkan studi doktoral (S3) Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (2016), studi magister (S2) Antropologi Sosial dan sarjana (S1) di Universitas Negeri Medan, masing-masing tahun 2005 dan 2000. Sejak Januari 2020, menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Kegiatan bertaraf internasional yang diikuti adalah narasumber pada *16th UNDV Conference di Hanoi, Vietnam* (Mei, 2019), *7th SSEASR Conference di Ho Chi Min, Vietnam* (Juli, 2017), *6th SSEASR Conference di Colombo, Srilangka* (Juni, 2015), *5th SSEASR Conference di Manila, Philipina* (Mei, 2013), *4th SSEASR Conference di Thimpue, Bhutan* (Juli, 2011), dan *13th EurASSEA Conference* di Berlin, Jerman (September, 2010). Kegiatan internasional diorganisir adalah *1th dan 2nd ICSSIS Conference* di Medan tahun 2018 dan 2019, *the Cross-culture and History of Asia Pacific in Nothern Sumatera* bekerjasama dengan *Japan Foundation* di Medan tahun 2012 dan 2013, dan *4th Encompas Conference Leiden* di Medan tahun 2010.

Visiting Lecture diantaranya adalah Vietnam Buddhist University, (2017), University of Kelaniya, Sri Lanka (2015), Pontifical and Royal University of Santo Tomas, Manila (2013), Royal University of Bhutan (2011), dan Frie University, Berlin (2010). Menjadi Reviewer Journal Society and Media, Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Anthropos dan Buddayah, keduanya di Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan, Jurnal JUPPIS di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, JPPUMA, Perspektif dan Administrasi Publik, ketiganya di Universitas Medan Area.

Aktif penelitian di Balai Arkeologi Sumatera Utara, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, dan Yayasan Museum Perkebunan Indonesia di Medan. Aktif terlibat dalam penelitian kerjasama di Pemkab maupun Pemko di Provinsi Sumatera Utara. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris Asosiasi Museum Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Aktif pada kegiatan seminar maupun webinar berskala nasional, regional Sumatera Utara maupun lokal Universitas Negeri Medan. Karya tulis berupa bab buku berskala internasional diantaranya “Inter-Race, Religion and Cultural Tolerance: the Spread of Buddhism by Tjong’s Family’s in Medan, North Sumatra, Indonesia” dalam *Buddhism Around the World*, Thich Nhat Tu (ed.). Vietnam: Religion Publisher (2019), dan “Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Putri Hijau, Namurambe, Northeast Sumatera” dalam *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2*. Dominik Bonatz, Andreas Reinecke dan Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). Singapore: NUS Press (2010). Hingga Juni 2020, menulis 13 artikel terindeks Sinta, Copernicus dan Scopus, 3 artikel prosiding internasional, dan 2 prosiding nasional. Menulis 16 judul buku, 10 editor buku, 2 bab buku internasional, 4 bab buku nasional, dan 2 buku kolaborasi, semuanya ber-ISBN.



Daud (M.Si., S.Pd), adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Kelahiran Panyabungan III, Kabupaten Mandailing Natal, pada 28 Mei 1986, menamatkan studi sarjana (S1) Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial tahun 2012 dan studi magister (S2) Antropologi Sosial tahun 2018, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Pernah meniti karir pada layanan ICT dan Bidang Kehumasan selama 9 (sembilan) tahun di Universitas Negeri Medan.

Sejak bertugas sebagai dosen tetap tahun 2019, menerbitkan buku kolaborasi berjudul "*Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*" (Yayasan Kita Menulis, 2020) serta menulis pada berbagai prosiding nasional. Di luar kesibukan mengajar, meneliti dan mengabdikan, juga tercatat sebagai pengelola (editor) pada Jurnal *Buddayah* (Jurnal Pendidikan Antropologi S1), dan Jurnal *Antropologi Sumatera* (Program Pascasarjana Antropologi Sosial S2). Dapat dihubungi melalui surat elektronik (surel); daud@unimed.ac.id.



Daniel H.P. Simanjuntak (S.Sos, M.Si), adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pria kelahiran Medan, 01 Desember 1980 silam, menamatkan sarjana (S1) Sosiologi di Universitas Lampung (2004), dan magister (S2) Sosiologi (2013) di Universitas Indonesia. Penulis memiliki pengalaman sebagai pengajar dan *home room teacher* di berbagai sekolah, seperti Sekolah Dian Harapan Makassar, Sekolah Cita Hati Christian Surabaya, Saint Peter International School Jakarta, Tunas Bangsa Christian School, Sekolah Victory Plus International School, dan PSKD Mandiri/Sekolah Perkumpulan Mandiri Jakarta.

Selain aktif menulis diberbagai jurnal dan prosiding nasional dan internasional, Daniel juga menulis buku secara kolaborasi, baik bersama mahasiswa maupun kolega sesama dosen dari Prodi Pendidikan Antropologi maupun penulis dari luar UNIMED. Daniel juga juga memiliki beberapa kegiatan yang menunjang aktivitas kelilmuannya seperti menjadi Ketua Pengelola Jurnal *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi*, dan Sekretaris Pengelola *Jurnal Antropologi Sumatera*, anggota AP3SI, dan Ikatan Peneliti Indonesia. Kontak yang dapat digunakan untuk menghubunginya yaitu danihp@unimed.ac.id.



POTRET SIANTAR TEMPO DULU

Buku yang Anda pegang ini membawa Anda bernostalgia tentang perkebunan yang dirangkum dalam konsepsi “*historical tourism in Pematangsiantar and its surroundings*”. Ibarat pepatah, “Kota Yang Baik Adalah Kota Yang Mengingat Masa lalunya”. Dengan demikian, kehadiran naskah ini menjadi salah satu dokumentasi di era modern tentang perkembangan kota Pematangsiantar. Dari pengerjaan ini, kemudian disusun *follow-up* ataupun rekomendasi kepada pemerintah Kota Pematangsiantar guna melindungi, merawat dan melestarikan unit bangunan yang masih tersedia guna ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana tersebut pada UU nomor 11 Tahun 2010 tentang *Cagar Budaya* ataupun UU no. 5 tahun 2017 tentang *Pemajuan Budaya*.

Pelestarian dan Bangunan Pusaka Budaya di Siantar hanya dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata yang berkontribusi bagi masyarakat. Sebagai destinasi *city tourism*, bangunan pusaka budaya harus memiliki 3 (tiga) karakteristik khusus, yaitu: (1) dimanfaatkan sebagai ruang publik sehingga dapat diakses oleh setiap orang, tidak tertutup bagi pengunjung, atau pengunjung dapat leluasa memasuki bangunan untuk melihat dan menyaksikan sejarah, pengetahuan, arsitektur dan kekhasan bangunan; (2) memiliki kontribusi bagi pertumbuhan sejarah kota, identitas, dan memori kolektif bagi penduduk kota dan pengunjung dengan minat khusus. Kontribusi, dalam hal ini berkorelasi dengan pendekatan kesejahteraan yakni memberikan insentif kemakmuran bagi masyarakat kota, dan (3) pelestarian bangunan pusaka budaya melalui regulasi pemerintah sehingga terhindar dari demolisasi ataupun pembiaran dari kerusakan.



Erond L. Damanik, pengajar di Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Menamatkan studi Doktor (S3) di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2016, Magister (S2) dan Sarjana (S1) tahun 2005 dan 2000 di Universitas Negeri Medan.

ISBN 978-623-7300-06-9

